



Laporan Kinerja
Perwakilan BPKP
Provinsi Papua Barat

2023



Kawal Pembangunan,
Wujudkan Kesejahteraan
di Bumi Kasuari



PERWAKILAN BPKP
PROVINSI PAPUA BARAT

**LAPORAN KINERJA
PERWAKILAN BPKP
PROVINSI PAPUA BARAT
2023**

NOMOR OT.04/LPP-01/PW27/6/2024
TANGGAL 5 JANUARI 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

CAPAIAN KINERJA

114,47% **Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah**
 Rp**5.007,83**juta Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi
 Rp**29.659,33**juta Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah
 Rp**61.945,76**juta Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah

117,65% **Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional**
 Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan **2** Kegiatan Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi

113,44% **Meningkatnya Kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP**
90,75% Persentasi rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti

0 BUMD BUMD dengan kinerja sehat
1 BLUD BLUD dengan kinerja sehat
10 BUMDes BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan
66,67% **Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha**

79,41% **Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi**
100% Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti
100% Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti
3 Pemda Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik
0 Badan Usaha Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik

1 APIP APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP >= Level 3
4 APIP Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP >= Level 3
1 Provinsi Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP >= Level 3
1 Kab/Kota Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP >= Level 3
0 Kab/Kota Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI >= Level 3
0 Pemda Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah
88,30% **Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU**
102 Desa Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel
30 Desa Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai
0 BLUD Jumlah BLU/D dengan MRI >= Level 3

109,67% **Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja**
81,07 Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja
82,15 Nilai SAKIP Unit Kerja
90% Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)
100% Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)
84,35 Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja
91,56 Skor IKPA Unit Kerja
97,60 Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja

KINERJA LAINNYA

1. Penghargaan **SDM AWARDS TAHUN 2023** dengan Predikat Terbaik untuk kategori Pengelolaan Manajemen Data dan Penilaian Kinerja.
2. Penghargaan Peringkat Pertama atas pencapaian penyusunan **Laporan Keuangan (LK) Terbaik** per semester I tahun 2023.
3. Juara 2 **Lomba Microlearning** tahun 2023 HUT BPKP Ke 40.
4. Penghargaan sebagai **Strategic Partner on Local Government Financial Advisory** dari Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Provinsi Papua Barat.

FAKTOR PENGHAMBAT CAPAIAN KINERJA

1. Kurangnya komitmen dari pimpinan pemda dalam peningkatan Kapabilitas APIP, Maturitas SPIP, MRI, dan IEPK ;
2. Kurangnya komitmen dari pimpinan pemda dalam implementasi SAKIP ;
3. Belum seluruh pemda memiliki kebijakan manajemen risiko di daerah;
4. Kebijakan manajemen risiko di daerah masih bersifat formalitas dan belum diimplementasikan dengan baik;
5. Auditi kurang responsif dalam penugasan pengawasan;
6. Target Perkin yang tinggi tidak diimbangi sumber daya yang ideal;
7. Kegiatan pembinaan tidak berjalan maksimal karena terkendala kondisi geografis, biaya besar, maupun jaringan;
8. Kegiatan pengawasan yang saling berkaitan antar bidang masih berjalan secara parsial.

STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

1. Meningkatkan sinergi, koordinasi, dan kolaborasi dengan mitra kerja;
2. Meningkatkan kegiatan pengawasan dan pembinaan pengendalian intern;
3. Mengembangkan pengawasan atas permasalahan dan isu-isu strategis serta metode pengawasan berbasis IT;
4. Meningkatkan kualitas kegiatan pengawasan represif, preventif, dan edukatif dalam pengendalian korupsi;
5. Mendorong pemda menerapkan kebijakan manajemen risiko di daerah;
6. Mendorong pemenuhan SDM APIP untuk memiliki kompetensi yang memadai;
7. Mendorong peningkatan kompetensi SDM mitra kerja terutama terkait manajemen risiko;
8. Meningkatkan strategi kegiatan pengawasan melalui sinergi dan kolaborasi antar bidang;
9. Melaksanakan kegiatan pengawasan dengan berfokus terhadap isu-isu strategis nasional dan kewilayahan;
10. Meningkatkan kompetensi pegawai melalui diklat pengawasan maupun PPM;
11. Menggali lebih dalam risiko-risiko operasional kantor serta RTP yang diperlukan.





Manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat 2023



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran kegiatan tahun anggaran 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat tahun 2020 – 2024.

Penyajian Laporan Kinerja ini telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Sekretaris Utama BPKP Nomor OT.04/S-2009/SU/01/2023 tanggal 15 Desember 2023 hal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2023.

Laporan Kinerja ini berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali, dan alat pemacu peningkatan kinerja bidang dan bagian di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat. Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat tahun 2023.

Tahun 2023 sebagai tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) periode 2020 – 2024 dengan kata lain mendekati tahun terakhir pelaksanaan Renstra tentu memberikan tekanan tersendiri atas target yang harus dipenuhi. Namun, para insan di Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dengan semangat kerja yang tinggi telah berupaya maksimal dalam melaksanakan pengawasan atas akuntabilitas keuangan dan Pembangunan di wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja ini. Kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Manokwari,
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat

Ditandatangani secara elektronik oleh

Lepot Setyanto





Gedung Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat



DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	iv
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar	iv

Bab 1 Pendahuluan 2

A. Tugas dan Fungsi Organisasi	2
B. Struktur Organisasi	3
C. Isu-Isu Strategis Organisasi	6
D. Sistematika Laporan	7

Bab 2 Perencanaan Kinerja 10

A. Indikator dan Target Kinerja Tahun 2020 - 2024 10	
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	13
C. Perbandingan Target Tahun 2023 dalam Renstra 2020-2024 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023	14

Bab 3 Akuntabilitas Kinerja 18

A. Kerangka Pengukuran Kinerja	18
B. Capaian Kinerja Outcome	18
C. Capaian Kinerja Output	75
D. Akuntabilitas Keuangan	77
E. Analisis Efisiensi	78
F. Kinerja Lainnya	79

Bab IV Penutup 82

A. Kesimpulan Kinerja Tahun 20223	82
B. Rencana Tindak Tahun 2024	82

Kilas Peristiwa 2023 86

Lampiran 92



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	10
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	13
Tabel 2.3 Perbandingan Target Tahun 2023 dalam Renstra 2020-2024 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023	14
Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	19
Tabel 3.2 Risiko untuk Setiap Sasaran Kegiatan Tahun 2023	21
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan 1	21
Tabel 3.4 Rincian Hasil Evaluasi Optimalisasi PAD	22
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 1.1 dengan Tahun 2022	22
Tabel 3.6 Rincian Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	24
Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 1.2 dengan Tahun 2022	24
Tabel 3.8 Rincian Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah	26
Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 1.3 dengan Tahun 2022	28
Tabel 3.10 Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan 2	30
Tabel 3.11 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 2.1 dengan Tahun 2022	31
Tabel 3.12 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 2.2 dengan Tahun 2022	32
Tabel 3.13 Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan 3	33
Tabel 3.14 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 3.1 dengan Tahun 2023	34
Tabel 3.15 Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan 3	35
Tabel 3.16 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 4.1 dengan Tahun 2022	36
Tabel 3.17 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 4.2 dengan Tahun 2022	37
Tabel 3.18 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 3.3 dengan Tahun 2022	38
Tabel 3.19 Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan 5	40
Tabel 3.20 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 5.1 dengan Tahun 2022	41
Tabel 3.21 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 5.2 dengan Tahun 2022	42
Tabel 3.22 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 5.3 dengan Tahun 2022	45



Tabel 3.23 Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan 6	48
Tabel 3.24 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 6.1 dengan Tahun 2022	49
Tabel 3.25 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 6.2 dengan Tahun 2022	50
Tabel 3.26 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 6.3 dengan Tahun 2021	52
Tabel 3.27 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 6.4 dengan Tahun 2022	53
Tabel 3.28 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 6.5 dengan Tahun 2022	55
Tabel 3.29 Desa yang Pengelolaan Keuangannya Akuntabel	58
Tabel 3.30 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 6.7 dengan Tahun 2022	60
Tabel 3.31 Perbandingan Capaian Indikator 6.8 dengan tahun 2022	61
Tabel 3.32 Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai	61
Tabel 3.33 Perbandingan Capaian Indikator 6.8 dengan tahun 2022	63
Tabel 3.34 Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan 7	64
Tabel 3.35 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 7.1 dengan Tahun 2022	65
Tabel 3.36 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 7.2 dengan Tahun 2022	67
Tabel 3.37 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 7.3 dengan Tahun 2022	68
Tabel 3.38 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 7.4 dengan Tahun 2022	69
Tabel 3.39 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 7.5 dengan Tahun 2022	70
Tabel 3.40 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 7.6 dengan Tahun 2022	72
Tabel 3.41 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 7.7 dengan Tahun 2021	73
Tabel 3.42 Target Output RKA Tahun 2023	75
Tabel 3.43 Realisasi Output Tahun 2023	76
Tabel 3.44 Anggaran dan Realisasi Keuangan Menurut Jenis Belanja	77
Tabel 3.45 Anggaran dan Realisasi Keuangan Menurut Program/Kegiatan	77
Tabel 3.46 Hasil Penghitungan Efisiensi Berdasarkan Capaian Kinerja Outcome Tahun 2023	78
Tabel 3.47 Hasil Penghitungan Efisiensi Berdasarkan Capaian Kinerja Output Tahun 2023	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Wilayah Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat	2
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat	4
Gambar 1.3 Rincian SDM di Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat	4
Gambar 3.1 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja 1.1	23
Gambar 3.2 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja 1.2	25
Gambar 3.3 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja 1.3	28
Gambar 3.4 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja 2.2	31
Gambar 3.5 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja 3.1	36
Gambar 3.6 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja 4.2	37
Gambar 3.7 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja 3.3	39
Gambar 3.8 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja 5.1	41
Gambar 3.9 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja 5.2	43
Gambar 3.10 Skor IEPK Pemerintah Daerah di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya	44
Gambar 3.11 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja 5.3	45
Gambar 3.12 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja 5.4	46
Gambar 3.13 Level Kapabilitas APIP Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya	50
Gambar 3.14 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja jumlah APIP dengan Kapabilitas \geq Level 3	51
Gambar 3.15 Perkembangan Capaian jumlah Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	53
Gambar 3.16 Level Maturitas SPIP pada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya	53
Gambar 3.17 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja 6.5	55
Gambar 3.18 MRI pada Pemerintah Daerah di provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya	56
Gambar 3.19 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja 6.8	62
Gambar 3.20 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja 7.1	66
Gambar 3.21 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja 7.2	67
Gambar 3.22 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja 7.5	71
Gambar 3.23 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja 7.6	72



Bab 1

Pendahuluan

- A. Tugas dan Fungsi Organisasi
- B. Struktur Organisasi
- C. Isu-Isu Strategis Organisasi
- D. Sistematika Laporan



BAB 1 PENDAHULUAN

Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2023, disusun dalam rangka mewujudkan dukungan terhadap sistem administrasi di bidang pengawasan yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Komitmen menyelenggarakan akuntabilitas kinerja yang baik diawali dengan tersedianya perencanaan kinerja sebagai tahapan penting dalam melaksanakan rencana strategis, yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi dalam mencapai kinerja yang diinginkan.

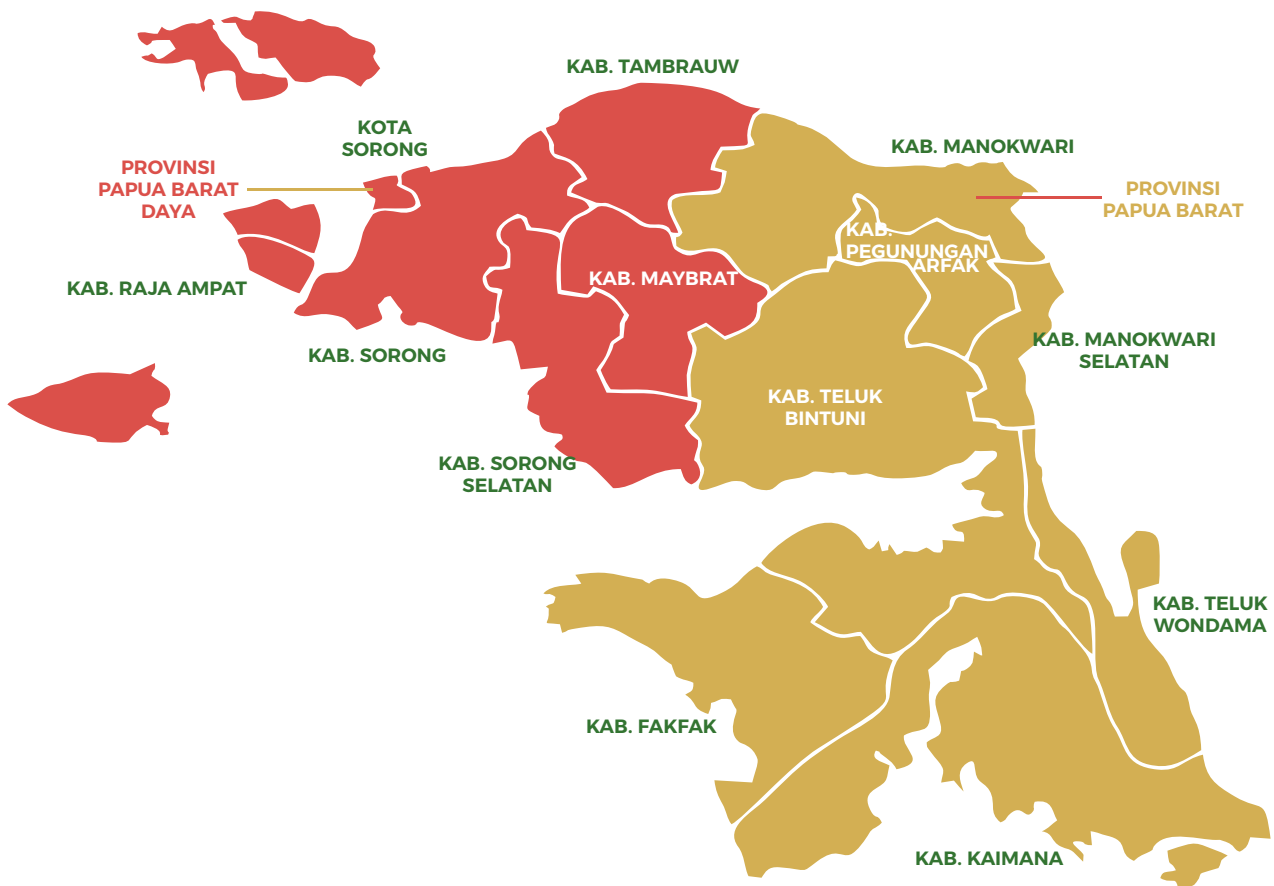
Perencanaan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan penugasan yang ditetapkan dalam PKPT.

A. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Sesuai amanat dalam Peraturan BPKP Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKP, Perwakilan BPKP adalah instansi vertikal BPKP di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Perwakilan BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi BPKP dalam wilayah kerja perwakilan yang bersangkutan. Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat berlokasi di Manokwari dan memiliki wilayah kerja yaitu Provinsi

Papua Barat dan kabupaten/kota di wilayahnya. Namun, sejak diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya maka wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat menjadi terdiri dari Provinsi Papua Barat dan kabupaten/kota di wilayahnya serta Provinsi Papua Barat Daya dan kabupaten/kota di wilayahnya.

Gambar 1.1 Wilayah Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat



Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat menyelenggarakan uraian fungsi sebagai berikut:

1. pelaksanaan audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;
2. pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;
3. pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis;
4. pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
5. pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;
6. pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada satuan kerja instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
7. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan;
8. pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah;
9. pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara/daerah; dan
10. pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, kesekretariatan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

B. STRUKTUR ORGANISASI

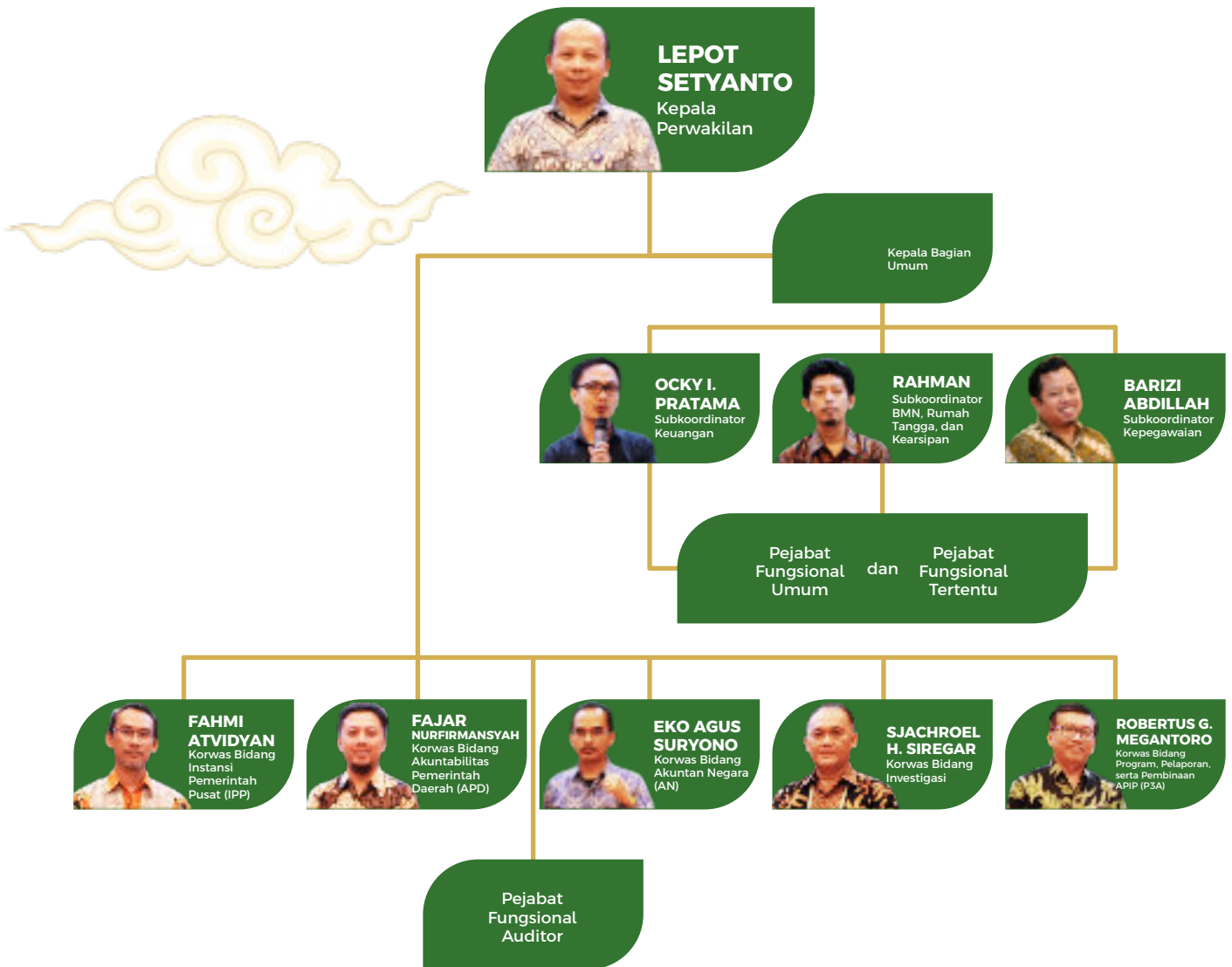
Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahaan atas Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Per 31 Desember 2023, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dipimpin oleh Kepala Perwakilan Bapak Lepot Setyanto yang telah diangkat menjadi Kepala

Perwakilan BPKP sejak tanggal 29 Desember 2023, sedangkan jabatan Kepala Bagian Umum per 31 Desember 2023 belum ditetapkan secara definitif.

Gambaran lengkap struktur organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat bisa dilihat pada Gambar 1.2.

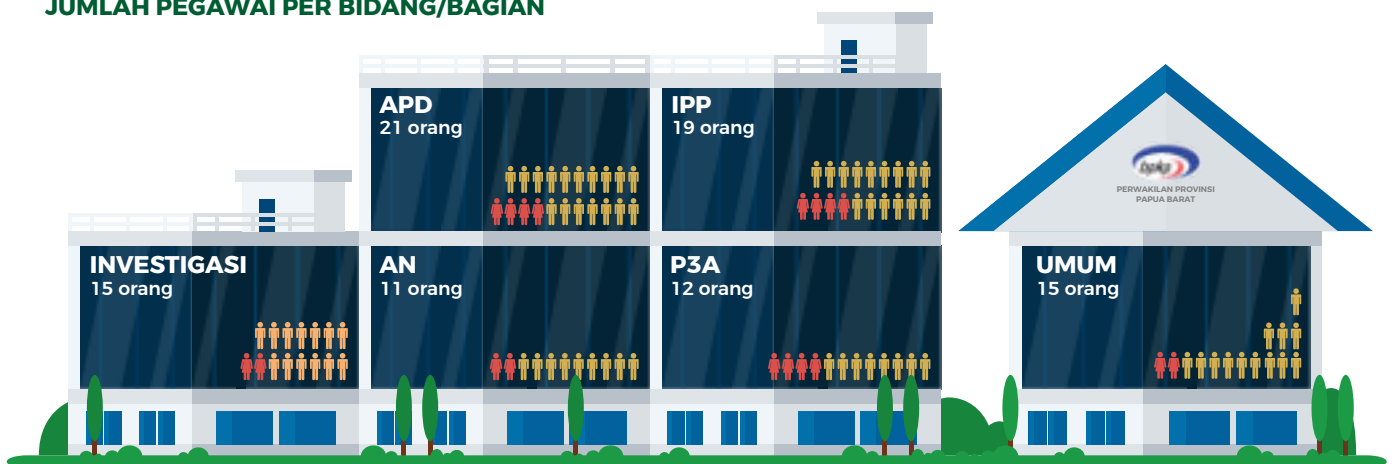
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat memiliki Sumber Daya Manusia per 31 Desember 2023 sebanyak 110 orang pegawai yang terdiri atas 93 orang ASN dan 17 orang THL. Per 31 Desember 2023, dengan rincian pegawai ASN terdapat pada Gambar 1.3.

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat

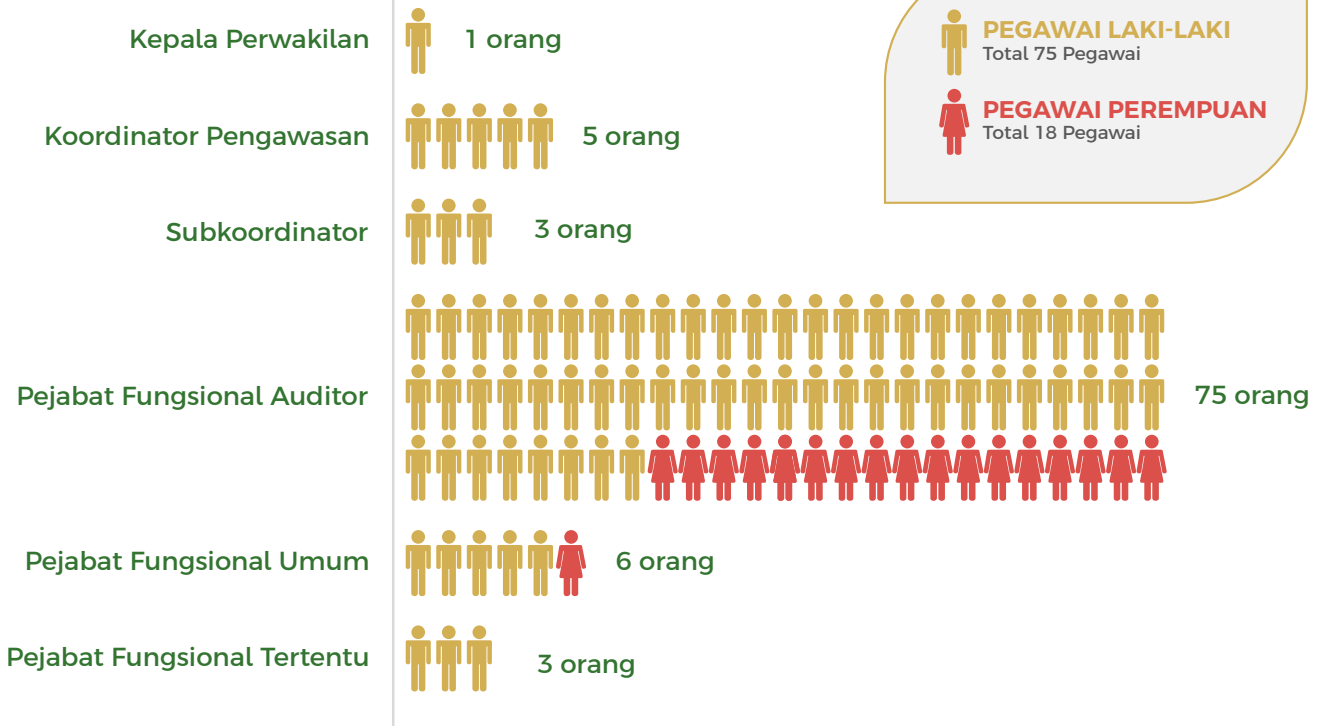


Gambar 1.3 Rincian SDM di Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat

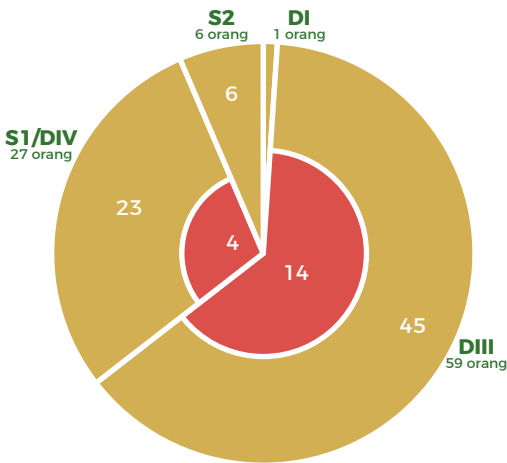
JUMLAH PEGAWAI PER BIDANG/BAGIAN



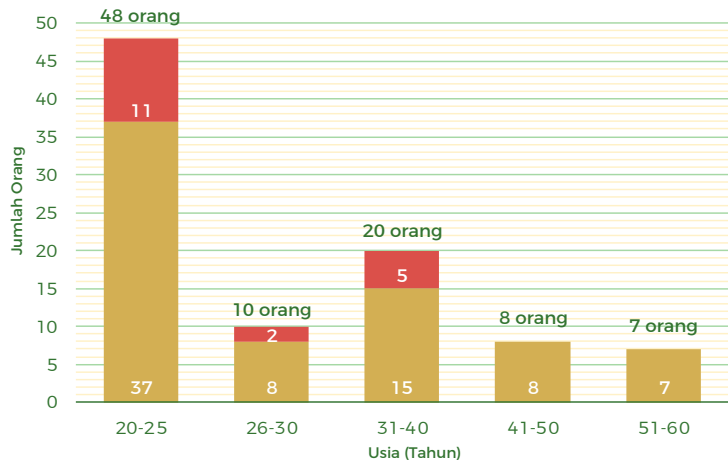
JUMLAH PEGAWAI MENURUT JABATAN



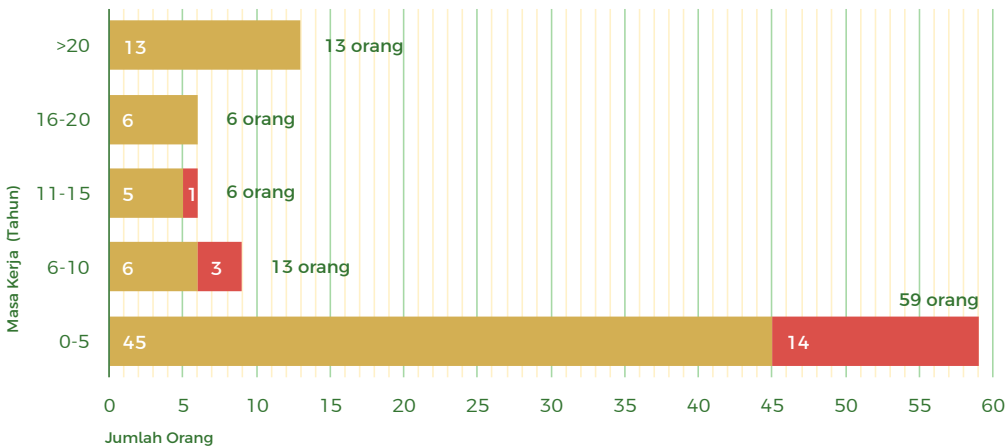
JUMLAH PEGAWAI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN



JUMLAH PEGAWAI MENURUT USIA



JUMLAH PEGAWAI MENURUT MASA KERJA



C. ISU-ISU STRATEGIS ORGANISASI

Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat sebagai instansi pengawasan intern pemerintah pusat di daerah, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perwujudan tata Kelola pemerintah daerah yang baik , khususnya dalam mengawal pemerintah daerah menuju kemandirian daerah yang transparan, bertanggung jawab dan akuntabel.

Selain itu, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat diharapkan mampu memberikan kontribusi agar kebijakan pemerintah pusat dapat dilaksanakan di daerah dengan baik melalui evaluasi tingkat keberhasilan program-program yang ada di daerah.

Memperhatikan peran BPKP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014, maupun Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014, kegiatan pengawasan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Papua

Barat dilaksanakan melalui sinergitas dan koordinasi dengan APIP lain dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan.

Untuk mendukung peran BPKP tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat telah menetapkan Rencana Strategis tahun 2020-2024 melalui Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Nomor KEP-180/PW27/6/2020.

Pelaksanaan pengawasan intern oleh Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat atas akuntabilitas keuangan, pembangunan dan tata kelola pemerintah baik pusat maupun daerah menitikberatkan pada beberapa isu strategis sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah,
2. Akuntabilitas Pembangunan Nasional,
3. Akuntabilitas Badan Usaha (BUMD/BLUD),
4. Efektivitas Pengendalian Korupsi,
5. Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda,
6. Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja



D. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2023 melaporkan capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat selama tahun 2023. Capaian kinerja 2023 diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2020 – 2024.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2023 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai masukan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2023 terdiri dari:

Ringkasan Eksekutif

Berupa infografis yang memuat ringkasan capaian kinerja, ringkasan faktor pendukung atau penghambat capaian target kinerja tahun 2023, ringkasan kinerja lainnya, termasuk penghargaan yang diterima tahun 2023; dan ringkasan strategi peningkatan kinerja.

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan Uraian tugas dan fungsi, Struktur organisasi dan komposisi sumberdaya manusia, Aspek/isu strategis yang menjadi perhatian/ akan ditangani sesuai Renstra Tahun 2020-2024, dan Sistematika penyajian LKj.

BAB II Perencanaan Kinerja

Bab ini menguraikan Target kinerja Tahun 2020-2024 sesuai dengan Renstra dan sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) dan Target kinerja sesuai dengan Perkin tahun 2023.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menguraikan Ringkasan kinerja tahun 2023, uraian kinerja untuk setiap sasaran kegiatan, uraian untuk setiap indikator kinerja baik target maupun realisasi capaian kinerja, rencana dan realisasi dukungan keuangan dan sumberdaya manusia, serta Risiko inherent dan risiko residual sesuai dengan laporan manajemen risiko untuk setiap sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan. Di samping itu memuat Rencana dan realisasi output, target dan realisasi penggunaan anggaran dan penggunaan SDM (OH), penyimpulan mengenai efisiensi penggunaan anggaran dan SDM, dan kinerja lainnya.

BAB IV Penutup

Bab ini menyajikan kesimpulan pencapaian kinerja tahun 2023, kesimpulan mengenai faktor pendukung atau penghambat capaian target kinerja tahun 2023, kesimpulan mengenai kinerja lainnya, termasuk penghargaan yang diterima BPKP pada tahun 2023, dan kesimpulan mengenai rencana tindak ke depan (tahun 2024) dalam rangka meningkatkan kinerja.







Bab 2

Perencanaan Kinerja

- A. Indikator dan Target Kinerja Tahun 2020-2024
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- C. Perbandingan Target Tahun 2023 dalam Renstra 2020-2024 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023



BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

Tugas dan fungsi BPKP diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut maka BPKP telah merumuskan visi, yaitu Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan *Trusted Advisor* Pemerintah untuk Meningkatkan *Good Governance* Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden 'Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong'. Untuk mewujudkan visi tersebut, BPKP telah menetapkan dan melaksanakan misi sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional;
2. Membangun sumber daya pengawasan yang berkualitas.

A. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUN 2020 - 2024

Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat telah menetapkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 melalui Surat Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Nomor KEP-180/PW27/6/2020 tanggal 30 Agustus 2020.

Seluruh indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra tersebut merupakan indikator kinerja kegiatan (IKK).

Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat telah menetapkan 6 sasaran kegiatan dengan 45 indikator kinerja yang terdiri dari 32 indikator kinerja kegiatan pengawasan (*delivery*) dan 13 indikator kinerja kegiatan dukungan pengawasan (*enabler*) yang dilaksanakan selama 5 tahun 2020-2024. Sasaran kegiatan dan IKK dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

No.	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
I Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/ Daerah							
1.1	Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/ Daerah yang Terealisasi	Rupiah (Juta)	115	138	345	345	345
1.2	Potensi Penerimaan Negara/ Daerah yang Dioptimalisasi	Rupiah (Juta)	230	230	576	576	576
1.3	Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rupiah (Juta)	1.123	186.779	154.487	136.270	112.930
1.4	Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah	Rupiah (Juta)	27.124	40.679	49.715	56.500	51.982
1.5	Nilai Penyelamatan Pengelolaan Dana Transfer	Rupiah (Juta)	0	118	120	122	125
1.6	Nilai Penyelamatan Pembiayaan Daerah	Rupiah (Juta)	0	59	60	61	62
II Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional							
2.1	Jumlah Kegiatan Prioritas yang Diawasi	Jumlah KP	7	7	7	7	7
2.2	Jumlah Kegiatan Prioritas yang Tercapai sesuai Target	Jumlah KP	7	7	7	7	7
2.3	Jumlah yang Tercapai sesuai Target	Jumlah PSN	1	1	1	1	1

No.	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
2.4	Jumlah Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah yang Tercapai sesuai Target	Jumlah Program	0	1	1	1	1
2.5	Persentase Desa yang Diaudit Kinerja dengan Hasil Baik	%	0	12,5	18,75	31,25	37,5
2.6	Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan	%	75	80	85	85	85
III Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha							
3.1	Jumlah BUMD dengan Pengelolaan Korporasinya Baik	Jumlah BUMD	0	0	0	0	1
3.2	Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat	Jumlah BUMD	2	2	2	2	2
3.3	Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat	Jumlah BLUD	1	1	1	1	1
3.4	Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan Keuangan	Jumlah BUMDes	4	4	5	7	7
IV Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi							
4.1	Persentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/ Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
4.2	Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang Dimanfaatkan/ Ditindaklanjuti	%	70	75	80	85	90
4.3	Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik	Jumlah Pemda	0	0	2	3	4
4.4	Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik	Jumlah Badan Usaha	0	0	1	2	2
V Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern pada K/L/P/BU							
5.1	Jumlah APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Jumlah APIP	3	5	6	8	9
5.2	Jumlah K/L/P dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Jumlah Pemda	3	4	5	6	6
5.3	Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	Jumlah Pemda	0	1	2	3	4
5.4	Persentase Jumlah Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah	%	0	0,18	0,37	0,55	1,11
5.5	Tersedianya Rekomendasi Strategis (Policy Brief) kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi	1	1	1	1	1
5.6	Persentase Jumlah Desa yang Mneyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	%	35	39,99	44,98	50,03	55,02
5.7	Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa secara Memadai	Jumlah Desa	0	5	15	54	104

No.	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
5.8	Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes	Jumlah APIP	1	1	2	3	6
5.9	Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3	Jumlah BUMD	0	0	0	0	1
5.10	Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3	Jumlah BLUD	0	1	1	2	3
5.11	Jumlah BUMD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern \geq Level 3	Jumlah BUMD	0	0	0	0	1
5.12	Jumlah BLUD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern \geq Level 3	Jumlah BLUD	0	0	0	1	1
VI Meningkatnya Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja							
6.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Nilai Skala 100	75	76	77	78	79
6.2	Persentase Pegawai yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	%	100	100	100	100	100
6.3	Persentase Adminstrasi SDM yang Diselesaikan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100
6.4	Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja	%	100	100	100	100	100
6.5	Skor IKPA Unit Kerja	Nilai Skala 100	86	87	88	89	90
6.6	Persentase SPM yang Terbit Tepat Waktu	%	90	91	92	93	95
6.7	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP	%	100	100	100	100	100
6.8	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Nilai	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
6.9	Nilai SAKIP Unit Kerja	Nilai Skala 100	80	81	82	83	84
6.10	Maturitas SPIP Unit Kerja	Level 1 - 5	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4
6.11	Indeks MR Unit Kerja	Level 1 - 5	-	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4
6.12	Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja	Indeks Skala 100	70	76	80	81	82
6.13	Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja	Indeks Skala 100	70	73	76	80	81

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Mempertimbangkan isu-isu strategis dan Rencana Strategis tahun 2020-2024, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat merumuskan target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023 dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023. Rincian target yang ditetapkan dalam Perjanjian kinerja tahun 2023 disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1.1 Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	4.360,24
	1.2 Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rupiah (Juta)	23.468,38
	1.3 Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (Juta)	56.570,05
2 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	2.1 Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan	(%) Persen	85,00
	2.2 Jumlah kegiatan pembangunan prioritas daerah yang diawasi	Kegiatan Prioritas Daerah	2
3 Meningkatkan Kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP	3.1 Persentasi rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti	(%) Persen	80
4 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	4.1 Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	1
	4.2 Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	1
	4.3 Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	10
5 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	5.1 Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	(%) Persen	100,00
	5.2 Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	(%) Persen	85,00
	5.3 Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik	Pemda	3
	5.4 Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Pemda	1
6 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	6.1 Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Provinsi	1
	6.2 Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Kabupaten/ Kota	8
	6.3 Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Provinsi	1
	6.4 Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Kabupaten/ Kota	6
	6.5 Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3	Kabupaten/ Kota	3

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
6 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	6.6 Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Pemda	3
	6.7 Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	25
	6.8 Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	25
	6.9 Jumlah BLU/D dengan MRI \geq Level 3	BLU/D	1
7 Meningkatkan Tata Kelola Unit Kerja	7.1 Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75,00
	7.2 Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82,00
	7.3 Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)	(%) Persen	70,00
	7.4 Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	(%) Persen	100,00
	7.5 Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	75,00
	7.6 Skor IKPA Unit Kerja	Indeks Skala 100	95,00
	7.7 Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala 100	80,00

C. PERBANDINGAN TARGET TAHUN 2023 DALAM RENSTRA 2020-2024 DENGAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Target tahun 2023 dalam Renstra 2020-2024 jika dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 terdapat pergeseran di beberapa indikator sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Perbandingan Target Tahun 2023 dalam Renstra 2020-2024 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	
			RENSTRA 2020-2024	PERJANJIAN KINERJA 2023
1 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1.1 Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	345,00	4.360,24
	1.2 Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rupiah (Juta)	112.930,00	23.468,38
	1.3 Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (Juta)	51,982,00	56.570,05
2 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	2.1 Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan	(%) Persen	85,00	85,00
	2.2 Jumlah kegiatan pembangunan prioritas daerah yang diawasi	Kegiatan Prioritas Daerah	-	2

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET		
			RENSTRA 2020-2024	PERJANJIAN KINERJA 2023	
3 Meningkatkan Kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP	3.1	Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti	(%) Persen	-	80
	4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	4.1 Jumlah BUMD dengan kinerja sehat 4.2 Jumlah BLUD dengan kinerja sehat 4.3 Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMD BLUD BUMDes	2 1 7
5 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	5.1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	(%) Persen	100,00	100,00
	5.2	Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	(%) Persen	85,00	85,00
	5.3	Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik	Pemda	3	3
	5.4	Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Pemda	2	1
6 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	6.1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Provinsi	1	1
	6.2	Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Kabupaten/ Kota	7	8
	6.3	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Provinsi	1	1
	6.4	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Kabupaten/ Kota	5	6
	6.5	Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3	Kabupaten/ Kota	3	3
	6.6	Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	-	0,55%	3 Pemda
	6.7	Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	-	50,03%	25 Desa
	6.8	Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	54	25
	6.9	Jumlah BLU/D dengan MRI \geq Level 3	BLU/D	2	1
7 Meningkatkan Tata Kelola Unit Kerja	7.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	78,00	75,00
	7.2	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	83,00	82,00
	7.3	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)	-	Level 3	70,00 %
	7.4	Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	-	Level 3	100,00 %
	7.5	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	80,00	75,00
	7.6	Skor IKPA Unit Kerja	Indeks Skala 100	89,00	95,00
	7.7	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	-	Baik	80,00





Bab 3

Akuntabilitas Kinerja

- A. Kerangka Pengukuran Kinerja
- B. Capaian Kinerja Outcome
- C. Capaian Kinerja Output
- D. Akuntabilitas Keuangan
- E. Analisis Efisiensi
- F. Kinerja Lainnya



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka penyusunan laporan kinerja tahun 2023, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat mengumpulkan data kinerja dari seluruh bidang dan bagian berupa uraian rinci kinerja, target dan realisasi keuangan, target dan realisasi penggunaan sumber daya manusia, berbagai penghargaan, serta informasi lain yang terkait dengan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk memperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten untuk pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip manfaat dan biaya, efisiensi, serta efektivitas.

Pengukuran capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat secara keseluruhan menggunakan nilai rata-rata dari capaian kinerja tujuh sasaran kegiatan yang tertuang dalam

Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2023. Pengukuran capaian kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah menggunakan persentase total realisasi kontribusi keuangan negara dan daerah dibandingkan dengan total target yang ditetapkan. Capaian kinerja sasaran kegiatan ini dihitung berdasarkan angka target dan realisasi total karena ketiga indikator kerjanya menggunakan satuan yang sama yaitu Rupiah (juta). Pengukuran capaian kinerja sasaran kegiatan dua sampai dengan sasaran kegiatan tujuh menggunakan nilai rata-rata dari capaian indikator kinerja untuk masing-masing sasaran kegiatan. Pengukuran realisasi kinerja menggunakan formula yang telah ditentukan untuk setiap indikator kinerja.

B. CAPAIAN KINERJA OUTCOME

Rata-rata capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat tahun 2023 adalah 97,25%.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap tujuh sasaran kegiatan dengan 29 IKK yang ditargetkan pada tahun 2023, terdapat empat sasaran kegiatan yang mencapai rata-rata kinerja di atas 100% dan tiga sasaran kegiatan yang masih berada di bawah 100%.

Uraian rata-rata capaian kinerja masing-masing sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Rata-rata capaian kinerja sasaran kegiatan 1 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah adalah sebesar 114,47%;
2. Rata-rata capaian kinerja sasaran kegiatan 2 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional adalah sebesar 108,82%;
3. Rata-rata capaian kinerja sasaran kegiatan 3 Meningkatnya Kesadaran perbaikan tata kelola

pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP adalah sebesar 113,44%;

4. Rata-rata capaian kinerja sasaran kegiatan 4 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha adalah sebesar 66,67%;
5. Rata-rata capaian kinerja sasaran kegiatan 5 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi adalah sebesar 79,41%;
6. Rata-rata capaian kinerja sasaran kegiatan 6 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU adalah sebesar 88,30%;
7. Rata-rata capaian kinerja sasaran kegiatan 7 Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja adalah sebesar 109,67%.

Rincian capaian masing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja disajikan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1.1 Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	4,360.24	5.007,83	114.85% ●
	1.2 Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rupiah (Juta)	23,468.38	29.659,33	126.38% ●
	1.3 Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (Juta)	56,570.05	61.945,76	109,50% ●
Rata-rata kinerja Sasaran Kegiatan 1			84,398.67	96.612,92	114.47% ●
2 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	2.1 Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan	(%) Persen	85,00	100,00	117,65% ●
	2.2 Jumlah kegiatan pembangunan prioritas daerah yang diawasi	Kegiatan Prioritas Daerah	2	2	100,00% ●
Rata-rata kinerja Sasaran Kegiatan 2					108,82% ●
3 Meningkatkan Kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP	3.1 Persentasi rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti	(%) Persen	80	90,75	113,44% ●
Rata-rata kinerja Sasaran Kegiatan 3			80	90,75	113,44% ●
4 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	4.1 Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	1	0	0,00% ●
	4.2 Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	1	1	100,00% ●
	4.3 Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	10	10	100,00% ●
Rata-rata kinerja Sasaran Kegiatan 4					66,67% ●
5 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	5.1 Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	(%) Persen	100,00	100,00	100,00% ●
	5.2 Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	(%) Persen	85,00	100,00	117,65% ●
	5.3 Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik	Pemda	3	3	100,00% ●
	5.4 Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Pemda	1	0	0,00% ●
Rata-rata kinerja Sasaran Kegiatan 5					71,08% ●
6 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	6.1 Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3	Provinsi	1	1	100,00% ●
	6.2 Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3	Kabupaten /Kota	8	4	50,00% ●
	6.3 Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3	Provinsi	1	1	100,00% ●

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
6 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	6.4 Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Kabupaten /Kota	6	1	16,67% ●
	6.5 Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3	Kabupaten /Kota	3	0	0,00% ●
	6.6 Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Pemda	3	0	0,00% ●
	6.7 Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	25	102	408,00% ●
	6.8 Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	25	30	120,00% ●
	6.9 Jumlah BLU/D dengan MRI \geq Level 3	BLU/D	1	0	0,00% ●
Rata-rata kinerja Sasaran Kegiatan 6					88,30% ●
7 Meningkatkan Tata Kelola Unit Kerja	7.1 Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75,00	81,07	108,09% ●
	7.2 Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82,00	82,15	100,18% ●
	7.3 Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)	(%) Persen	70,00	90,00	128,57% ●
	7.4 Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	(%) Persen	100,00	100,00	100,00% ●
	7.5 Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	75,00	84,35	112,47% ●
	7.6 Skor IKPA Unit Kerja	Indeks Skala 100	95,00	91,56	96,38% ●
	7.7 Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala 100	80,00	97,60	122,00% ●
Rata-rata kinerja Sasaran Kegiatan 7					109,67% ●
Rata-rata kinerja Perwakilan					97,25% ●

Rincian capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat tahun 2023 dengan sumber daya anggaran dan SDM (OH) pendukungnya disajikan pada Lampiran I dan rincian capaian kinerja tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 disajikan pada Lampiran II.

Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat telah mampu mengelola risiko-risiko dalam kegiatan untuk meraih kinerja tahun 2023 di atas. Pada tahun 2023, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat berhasil mengidentifikasi dan mengelola 263 risiko terkait pencapaian sasaran kinerja. Sebaran risiko yang telah dikelola disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Risiko untuk Setiap Sasaran Kegiatan Tahun 2023

No	SASARAN KEGIATAN	JUMLAH RISIKO
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/ Daerah	36
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	15
3	Meningkatnya Kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP	30
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	10
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	18
6	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/ L/P/BU	47
7	Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja	107
Jumlah Risiko		263

SASARAN KEGIATAN 1: MENINGKATNYA PENGAWASAN PEMBANGUNAN ATAS AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA/DAERAH

Rata-rata capaian kinerja Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/ Daerah adalah 114,47%. Capaian Sasaran Kegiatan Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah diukur melalui oleh 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu:

1. Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi;
2. Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah;
3. Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah.

Capaian masing-masing indikator kinerja disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan 1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.1	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (juta)	4,360.24	5.007,83	114.85%
1.2	Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rupiah (juta)	23,468.38	29.659,33	126.38%
1.3	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (juta)	56,570.05	61.945,76	109,50%
Rata-rata kinerja Sasaran Kegiatan 1			84,398.67	96.612,92	114.47%

Uraian masing-masing indikator kinerja sasaran kegiatan “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah” adalah sebagai berikut.

1.1 NILAI OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA/DAERAH YANG TEREALISASI

Lorem ipsum pokoknya di sini idealnya teks simpulan gitu deh.

Nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi dihitung berdasarkan hasil kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan BPKP. Penerimaan negara/daerah sesuai dengan rincian sumber penerimaan APBN/D, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, antara lain seperti pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Realisasi nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi pada tahun 2023 adalah sebesar Rp5.007.829.259,00 atau mencapai 114,85% dari target sebesar Rp4.360.240.000,00. Nilai realisasi tersebut bersumber dari evaluasi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Manokwari tahun 2022 sampai dengan April tahun 2023 dan evaluasi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Provinsi Papua Barat tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 dengan rincian pada Tabel 3.4

Tabel 3.4 Rincian Hasil Evaluasi Optimalisasi PAD

No.	Bidang	Nomor dan Tanggal ST	Uraian Laporan (LHE)	Nilai Temuan (Rp)
1	APD	PE.09.02/ST-236/ PW27/3/2023 10 Mei 2023	Laporan Hasil Evaluasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Manokwari Tahun 2022 dan s.d April Tahun 2023	713.011.013
2	APD	PE.09.02/ST-237/ PW27/3/2023 10 Mei 2023	Laporan Hasil Evaluasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2022 s.d. 2023	4.294.818.246
Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi				5.007.829.259

Perolehan nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi pada tahun 2023 dibandingkan nilai realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 101,13% seperti dalam Tabel 3.5.

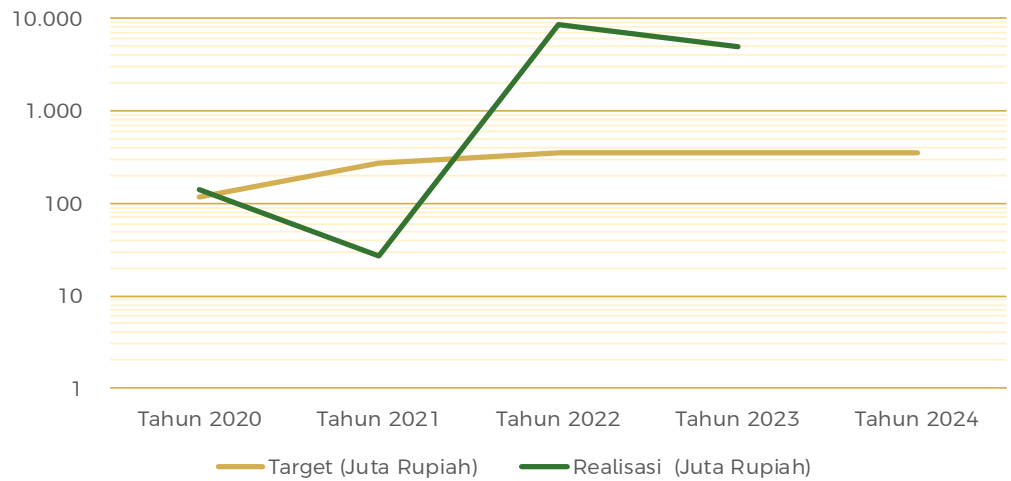
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 1.1 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	+ / (-)	%
Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rp8.413.295.206,00	Rp5.007.829.259,00	-Rp3.405.465.206,00	-101,13%

Nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi dibandingkan dengan target Renstra tahun 2020 – 2024 tercapai 2.438,64% terhadap target Rp345.000.000,00. Perkembangan capaian atas nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi dibandingkan dengan target Renstra tahun 2020 – 2024 disajikan pada Gambar 3.1.

Tahun	Target (Juta Rupiah)	Realisasi (Juta Rupiah)
2020	115	139
2021	276	27
2022	345	8.413
2023	345	5.008
2024	345	-

Gambar 3.1 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja 1.1



Perbedaan capaian realisasi kinerja atas target Perkin tahun 2023 dengan target 2023 pada Renstra 2020-2024 dikarenakan adanya revisi Perkin di tahun berjalan dan tidak adanya revisi Renstra 2020-2024.

Nilai realisasi indikator kinerja di atas diperoleh atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah sesuai PKPT APP Sektor Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah dan Pemulihan Ekonomi, yaitu:

Pengawasan Akuntabilitas Pendapatan Daerah

Evaluasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 dan s.d April Tahun 2023 pada Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat.

Untuk meningkatkan kinerja di tahun 2024, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat akan melakukan upaya sebagai berikut:

1. Melakukan optimalisasi pada pemerintah daerah lainnya yang ada di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya guna menggali PAD yang masih bisa dapat dikembangkan.
2. Memberikan rekomendasi yang bersifat strategis kepada pemerintah daerah yang dievaluasi guna meningkatkan PAD.

1.2 NILAI EFISIENSI PENGELUARAN NEGARA DAN DAERAH

Indikator Kinerja nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah diukur dengan menghitung jumlah nilai pengurangan/pengalihan rencana belanja proyek/kegiatan/program yang tidak tepat. Nilai efisiensi pengeluaran negara/daerah yang dimaksud yaitu nilai yang menunjukkan besarnya pengurangan/pengalihan nilai pengeluaran yang tidak tepat berdasarkan hasil kegiatan pengawasan BPKP.

Realisasi nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah pada tahun 2023 adalah sebesar Rp29.659.330.875,00 atau mencapai 104,42% dari target sebesar Rp28.404.015.696,00. Rincian nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Rincian Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah

No	Uraian		Nilai (Rp)
Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah - Non investigasi			
1	Evaluasi atas Pengelolaan Dana BOS Reguler pada Pendidikan Dasar Tahun 2022 pada Kabupaten Fakfak	PE.09.02/ST-136/ PW27/2/2023 13 Maret 2023	137.700.418,00
2	Evaluasi atas Pengelolaan Dana BOS Reguler pada Pendidikan Menengah Tahun 2022 pada Provinsi Papua Barat	PE.09.02/ST-135/ PW27/2/2023 13 Maret 2023	69.485.000,00
3	Audit atas Pekerjaan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2023	PE.04.02/ST-389/ PW27/2/2023 26 Juli 2023	3.067.077.778,00
4	Evaluasi atas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2023	PE.09.02/ST-29/ PW27/3/2023 01 Februari 2023	2.672.285.392,00
5	Evaluasi atas Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2023	PE.09.02/ST-139/ PW27/3/2023 14 Maret 2023	20.607.779.379,00
6	Evaluasi atas Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2023	PE.09.02/ST-30/ PW27/3/2023 1 Februari 2023	721.708.000,00
Sub jumlah nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah - Non investigasi			27.276.035.967,50
Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah - Investigasi			
7	Audit atas Efektivitas Dana Otonomi Khusus pada Kabupaten Sorong Tahun 2022 dan 2023	PE.04.02/ST-251/ PW27/5/2023 15 Mei 2023	2.383.294.907,50
Sub jumlah nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah - Investigasi			2.383.294.907,50
Jumlah nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah			29.659.330.875,00

Jika dibandingkan dengan tahun 2022 maka realisasi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 92% seperti pada Tabel 3.7.

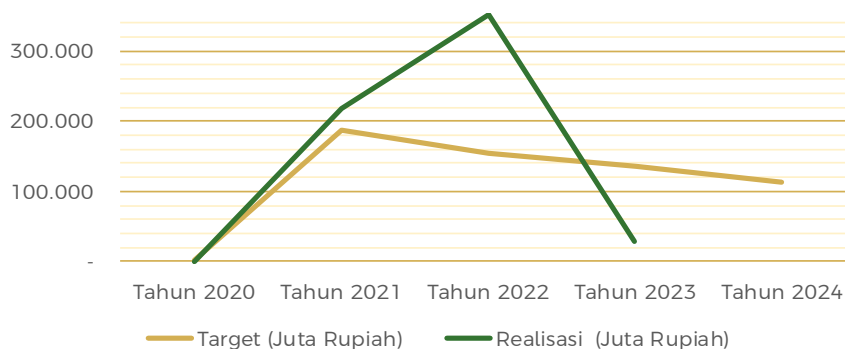
Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 1.2 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	+ / (-)	%
Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rp352.646.217.986,00	Rp29.659.330.875	-Rp322.986.887.112	-92%

Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah dibandingkan dengan target Renstra tahun 2020-2024 tercapai 21,77% terhadap target Rp136.270.000.000,00. Perkembangan capaian atas nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah dibandingkan dengan target Renstra tahun 2020 - 2024 disajikan pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja 1.2

Tahun	Target (Juta Rupiah)	Realisasi (Juta Rupiah)
2020	1.123	33
2021	186.779	218.120
2022	154.487	352.646
2023	136.270	29.659
2024	112.970	-



Nilai efisiensi pengeluaran negara/daerah tersebut diperoleh atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat (IPP), Bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah (APD), dan Bidang Investigasi sesuai PKPT yang mendukung beberapa sektor APP antara lain sebagai berikut:

1. Evaluasi atas Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2023;
2. Evaluasi atas Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2023;
3. Evaluasi atas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2023.
4. Evaluasi atas Pengelolaan Dana BOS Reguler pada Pendidikan Menengah Tahun 2022 pada Provinsi Papua Barat;
5. Evaluasi atas Pengelolaan Dana BOS Reguler pada Pendidikan Dasar Tahun 2022 pada Kabupaten Fakfak.
6. Audit atas Pekerjaan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2023
7. Audit atas Efektivitas Dana Otonomi Khusus pada Kabupaten Sorong Tahun 2022 dan 2023

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2024, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat akan melakukan upaya sebagai berikut:

1. Melanjutkan pelaksanaan evaluasi atas perencanaan dan penganggaran atas APBD Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya.
2. Memberikan bimbingan teknis peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan belanja daerah.
3. Meningkatkan kualitas rekomendasi terhadap hasil pengawasan yang dikaitkan dengan kualitas perencanaan, penganggaran dan belanja daerah.

1.3 NILAI PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH

Indikator Kinerja Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah diukur dengan menghitung jumlah nilai belanja yang dikembalikan ke kas negara/daerah, termasuk denda yang dikenakan dari hasil pengawasan BPKP dan nilai aset yang dipulihkan berdasarkan hasil kegiatan pengawasan BPKP.

Realisasi nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah pada tahun 2023 adalah sebesar Rp61.945.762.948,31 atau mencapai 109,54% dari target sebesar Rp 56.549.600.000,00. Rincian nilai penyelamatan tersebut diperoleh dari aktivitas pengawasan yang terinci pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Rincian Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah

No	Uraian	Nomor ST	Nilai (Rp)
Nilai penyelamatan pengeluaran negara dan daerah - Non investigasi			
1	Audit Keuangan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)/ National Slum Upgrading Project (NSUP) pada Kota Sorong Tahun Anggaran 2022	PE.01.02/ST-130/ PW27/2/2023 13 Maret 2023	542.485.801,00
2	Audit Keuangan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)/ National Slum Upgrading Project (NSUP) pada Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2022	PE.01.02/ST-133/ PW27/2/2023 13 Maret 2023	21.300.000,00
3	Evaluasi atas Pengelolaan Dana BOS Reguler pada Pendidikan Dasar Tahun 2022 pada Kabupaten Fakfak	PE.09.02/ST-136/ PW27/2/2023 13 Maret 2023	251.883.500,00
4	Evaluasi atas Pengelolaan Dana BOS Reguler pada Pendidikan Menengah Tahun 2022 pada Provinsi Papua Barat	PE.09.02/ST-135/ PW27/2/2023 13 Maret 2023	360.969.000,00
5	Laporan Hasil Reviu atas Pemutusan Kontrak Pekerjaan Paket Preservasi Jalan Makbon-Mega (MYC) Tahun 2021-2023	PE.12.02/ST-646/ PW27/2/2023	8.914.876.130,00
6	Evaluasi atas Efektivitas Penggunaan Transfer ke Daerah Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong	PE.09.02/ST-446/ PW27/3/2023 18 Agustus 2023	49.661.076,77
7	Evaluasi Infrastruktur SPAM pada Kabupaten Manokwari	PE.11.02/ST-683/ PW27/3/2023 15 November 2023	19.107.731,00
Sub jumlah nilai penyelamatan pengeluaran negara dan daerah - Non investigasi			10.160.283.238,77
Nilai penyelamatan pengeluaran negara dan daerah - Investigasi			
8	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Kas PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Wasior Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2022	PE.03.02/ST-122/ PW27/5/2023 06 Maret 2023	870.146.000,00
9	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Hibah KONI Papua Barat Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021 yang bersumber dari BPKAD Provinsi Papua Barat dan DISPORA Provinsi Papua Barat	PE.03.02/ST-50/ PW27/5/2023 06 Februari 2023	32.079.736.283,21

No	Uraian	Nomor ST	Nilai (Rp)
10	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa dan ADD Kampung Kasih Distrik Mariat Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021	PE.03.02/ST-399/ PW27/5/2023 01 Agustus 2023	1.127.199.384,00
11	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa dan ADD Kampung Meosmanggara Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2019	PE.03.02/ST-517/ PW27/5/2023 15 September 2023	566.140.982,00
12	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pemeliharaan Halaman Kantor, Belanja Makan dan Minum Tamu Pimpinan, Pembersihan Lahan Kantor, dan Belanja Bahan Pembersih Kantor pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2021	PE.03.02/ST-532/ PW27/5/2023 29 September 2023	3.112.867.331,00
13	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Sewa Gedung Kantor Sementara DPRD Kabupaten Teluk Bintuni periode bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Maret 2023	PE.03.02/ST-566/ PW27/5/2023 12 Oktober 2023	1.688.085.257,99
14	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Ruas Jalan Kampung Simeii-Kampung Obo Distrik Kuri Kabupaten Teluk Bintuni pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2022	PE.03.02/ST-637/ PW27/5/2023 6 November 2023	5.629.261.261,00
15	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Transaksi Pendebetan Rekening RKUD Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020	PE.03.02/ST-714/ PW27/5/2023 26 November 2023	794.965.000,00
16	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah pada Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2020	PE.03.02/ST-719/ PW27/5/2023 12 Januari 2023	1.479.704.600,00
17	Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan antara Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Sorong dan Wajib Pajak Petrogas atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (Listrik Non PLN) untuk Periode/Masa Pajak Tahun 2022	PE.09.01/ST-253/ PW27/5/2023 15 Mei 2023	1.587.322.000,91
18	Audit atas Penyesuaian Harga Akibat Kenaikan Harga BBM dan/atau Aspal pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Mawin 1 Cs yang Berlokasi di Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Manokwari Selatan Tahun Anggaran 2022	PE.04.02/ST-573/ PW27/5/2023 23 Oktober 2023	796.819.289,94
19	Audit atas Penyesuaian Harga Akibat Kenaikan Harga BBM dan/atau Aspal Paket Kontrak Jembatan Telaga 1 CS	PE.04.02/ST-575/ PW27/5/2023 23 Oktober 2023	577.789.075,11

No	Uraian	Nomor ST	Nilai (Rp)
20	Audit atas Penyesuaian Harga Akibat Kenaikan Harga BBM dan/atau Aspal pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Log Cs yang berlokasi di Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2022	PE.04.02/ST-591/ PW27/5/2023 25 Oktober 2023	883.604.487,75
21	Audit atas Penyesuaian Harga Akibat Kenaikan Harga BBM dan/atau Aspal pada Peket Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jembatan Werianggi-Ambuni yang berlokasi di Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2022	PE.04.02/ST-596/ PW27/5/2023 30 Oktober 2023	572.302.251,36
22	Audit atas Efektivitas Dana Otonomi Khusus pada Kabupaten Manokwari Tahun 2022 dan 2023	PE.04.02/ST-231/ PW27/5/2023 09 Mei 2023	13.927.127,19
23	Audit atas Efektivitas Dana Otonomi Khusus pada Kabupaten Sorong Tahun 2022 dan 2023	PE.04.02/ST-251/ PW27/5/2023 15 Mei 2023	5.609.378,08
Sub jumlah nilai penyelamatan pengeluaran negara dan daerah - Investigasi			51.785.479.709,54
Jumlah nilai penyelamatan pengeluaran negara dan daerah			61.945.762.948,31

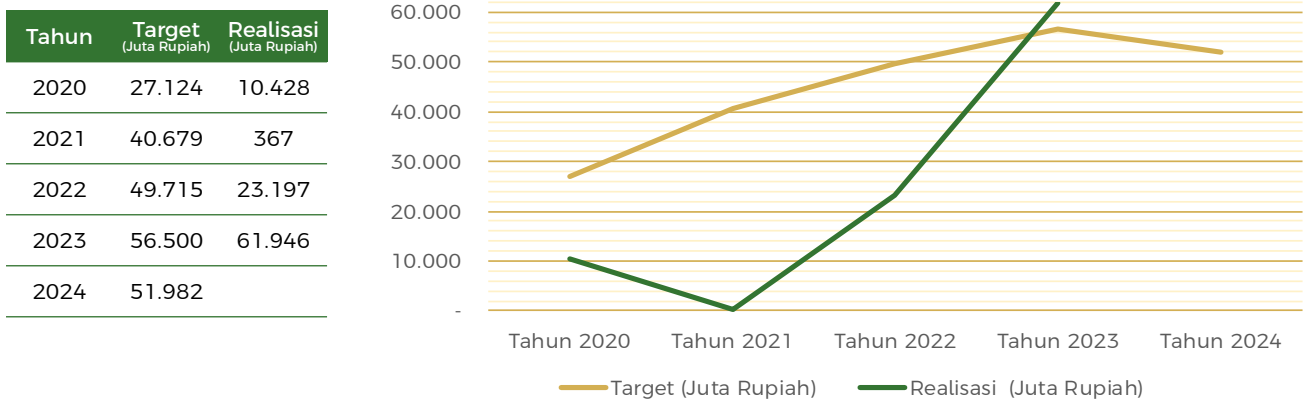
Jika dibandingkan dengan tahun 2022 maka capaian tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 167% seperti pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 1.3 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	+ / (-)	%
Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah	23.197.176.917	61.945.762.948,31	38.748.586.031,31	167%

Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah dibandingkan dengan target Renstra tahun 2020 - 2024 tercapai 109,64% terhadap target Rp56.500.000.000,00. Perkembangan capaian atas nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah dibandingkan dengan target Renstra tahun 2020 - 2024 disajikan pada Gambar 3.3.

Gambar 3.3 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja 1.3



Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah tersebut diperoleh atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang IPP dan Bidang Investigasi sesuai PKPT APP Sektor Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas, Percepatan Penyelesaian Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas, Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah dan Desa, serta Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih antara lain sebagai berikut:

1. Evaluasi atas Pengelolaan Dana BOS Reguler
2. Evaluasi Pembangunan Infrastruktur SPAM
3. Monitoring dan Evaluasi Efektivitas Penggunaan Transfer ke Daerah
4. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Tindak Pidana Korupsi,
5. Pemberian Keterangan Ahli.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2023, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat akan melakukan upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kerja sama dengan mitra kerja tidak hanya APH tetapi juga APIP Daerah agar kegiatan pengawasan keinvestigasian dapat dilaksanakan lebih menyeluruh;
2. Meningkatkan dan menjaga kualitas hasil pengawasann.

Risiko pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah

Capaian kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah sebesar 114,47% dapat diraih dengan mengelola risiko yang teridentifikasi mengekspos sasaran kegiatan ini. *Residual risk* tertinggi yang yang dikelola adalah:

1. Ketersediaan sumber daya manusia yang kurang dalam rangka pemenuhan kebutuhan unit kerja;
2. Stakeholder tidak menyiapkan/menyerahkan data;
3. Terjadinya kesalahan menentukan jumlah klaim/eskalasi/kerugian keuangan negara;
4. Hasil Audit digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

SASARAN KEGIATAN 2: MENINGKATNYA PENGAWASAN PEMBANGUNAN ATAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Rata-rata capaian kinerja Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional adalah 108,82%. Capaian sasaran kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional diukur melalui oleh 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan;
2. Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi.

Capaian masing-masing indikator kinerja disajikan pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10 Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan 2

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
2.1	Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan	(%) Persen	85,00	100,00	117,65%
2.2	Jumlah kegiatan pembangunan prioritas daerah yang diawasi	Kegiatan Prioritas Daerah	2	2	100,00%
Rata-rata kinerja Sasaran Kegiatan 2					108,82%

Uraian masing-masing indikator kinerja sasaran kegiatan “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional” adalah sebagai berikut:

2.1 PERSENTASE HAMBATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN YANG DISELESAIKAN

Salah satu aktivitas pengawasan BPKP adalah Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (EHKP). Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP) didefinisikan sebagai sebuah kondisi dimana proses pembangunan tidak dapat mencapai output, outcome, dan manfaat yang telah ditetapkan karena adanya masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan kewenangan para pihak terkait. Penugasan EHKP tersebut pada dasarnya adalah *case-based* yang bersumber dari pengembangan hasil pengawasan, *current issues*, atau permintaan instansi/Badan Usaha (BU).

Indikator persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan dihitung berdasarkan proporsi hasil penugasan EHKP yang efektif (kesepakatan penyelesaian hambatan terwujud dan dilaksanakan) terhadap total penugasan HKP.

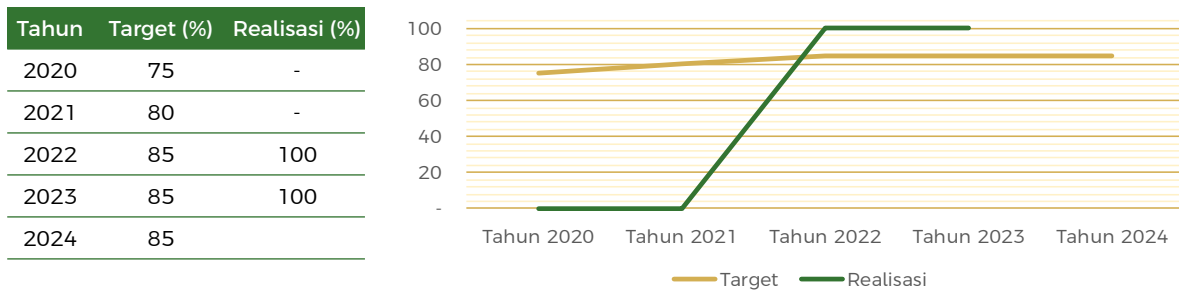
Realisasi persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan pada tahun 2023 adalah sebanyak 100% atau mencapai 117,65% dari target sebanyak 85%. Perolehan indikator persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan pada tahun 2023 dibandingkan nilai realisasi tahun 2022 tetap berada di angka 100% (tidak mengalami kenaikan maupun penurunan) seperti pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 2.1 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	+ / (-)	%
Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	100%	100%	-	0% (tetap)

Jumlah persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan dibandingkan dengan target Renstra tahun 2020-2024 tercapai 117,65% dari target sebanyak 85%. Perkembangan capaian atas persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan dibandingkan dengan target Renstra tahun 2020-2024 disajikan pada gambar 3.5.

Gambar 3.4 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja 2.2



Nilai realisasi indikator kinerja di atas diperoleh atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh bidang Investigasi sesuai PKPT APP sektor Pengendalian Kecurangan dan Hambatan Kelancaran Pembangunan dan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah yaitu:

Hambatan Kelancaran Pembangunan

Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan antara Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Sorong dan Wajib Pajak Petrogas atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (Listrik Non PLN) untuk Periode/Masa Pajak Tahun 2022

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2024, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat akan melakukan upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kerja sama dengan mitra kerja sehingga HKP dapat terselesaikan;
2. Meningkatkan mutu kualitas hasil evaluasi hambatan kelancaran pembangunan.

2.2 JUMLAH KEGIATAN PEMBANGUNAN PRIORITAS DAERAH YANG DIAWASI

Indikator jumlah kegiatan pembangunan prioritas daerah yang diawasi dihitung berdasarkan jumlah kegiatan pembangunan yang menjadi bagian program prioritas pemerintah daerah yang dilakukan pengawasan oleh BPKP.

Realisasi jumlah kegiatan pembangunan prioritas daerah yang diawasi pada tahun 2023 adalah sebanyak 2 kegiatan prioritas daerah atau mencapai 100% dari target sebanyak 2 kegiatan prioritas daerah. Perolehan indikator jumlah kegiatan pembangunan prioritas daerah yang diawasi pada tahun 2023 dibandingkan nilai realisasi tahun 2022 tetap berada di angka 100% (tidak mengalami kenaikan maupun penurunan) seperti pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 2.2 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	+/(-)	%
Jumlah kegiatan pembangunan prioritas daerah yang diawasi	2	2	-	0% (tetap)

Indikator kinerja ini merupakan indikator yang baru ditetapkan pada tahun 2023 dan belum ditargetkan pada Renstra 2020 - 2024 sehingga realisasi indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan target Renstra 2020 - 2024.

Nilai realisasi indikator kinerja di atas diperoleh dari pelaksanaan PKPT Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) yang dilakukan oleh Bidang APD, antara lain sebagai berikut:

1. Evaluasi Atas Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata Bahari di Kaimana Provinsi Papua Barat
2. Evaluasi atas Program Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Papua Barat

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2024, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat akan melakukan upaya sebagai berikut:

1. Melanjutkan kegiatan pengawasan di daerah terhadap isu kewilayahan;
2. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam melakukan kegiatan pengawasan APPD;
3. Meningkatkan mutu kualitas hasil pengawasan di daerah.

Risiko pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional

Capaian kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional sebesar 108,82% dapat diraih dengan mengelola risiko yang teridentifikasi mengekspos sasaran kegiatan ini. *Residual risk* tertinggi yang dikelola adalah:

1. Pelaksanaan penugasan tidak sesuai dengan target kinerja dalam dokumen perencanaan;
2. Pedoman tidak dipahami pengguna;
3. Pegawai BPKP terlibat benturan kepentingan.

SASARAN KEGIATAN 3: MENINGKATNYA KESADARAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN PADA K/L/D/BU YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB PERWAKILAN BPKP

Rata-rata capaian kinerja “Meningkatnya Kesadaran Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan pada K/L/D/BU yang Menjadi Tanggung Jawab Perwakilan BPKP” adalah 113,44%. Capaian sasaran kegiatan “Meningkatnya Kesadaran Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan pada K/L/D/BU yang Menjadi Tanggung Jawab Perwakilan BPKP” diukur melalui oleh 1 (satu) indikator kinerja, yaitu persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti, dengan capaian disajikan pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13 Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan 3

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
3.1	Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti	(%) Persen	80,00	90.75	113,44%
Rata-rata kinerja Sasaran Kegiatan 3			80,00	90.75	113,44%

Uraian masing-masing indikator kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP adalah sebagai berikut.

3.1 PERSENTASE REKOMENDASI STRATEGIS YANG DITINDAKLANJUTI

Indikator persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti dihitung berdasarkan proporsi rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan rekomendasi strategis yang dihasilkan oleh pengawasan BPKP. Kegiatan pengawasan yang dilakukan BPKP tidak hanya penugasan yang bersifat *assurance* tetapi juga *consulting*. Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, BPKP telah memberikan rekomendasi-rekomendasi yang bersifat strategis. Rekomendasi strategis ini diartikan saran/rekomendasi yang bersifat kebijakan maupun implementasi prosedur yang memberikan nilai tambah/perbaikan bagi tata kelola instansi pemerintah/Badan Usaha (BU).

Realisasi persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti pada tahun 2023 adalah sebanyak 90,75% atau mencapai 113,44% dari target sebanyak 80%. Selama tahun 2023 Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat telah memberikan rekomendasi strategis sebanyak 67 rekomendasi

strategis dengan progress tindak lanjut atas rekomendasi tersebut sebesar 90,75%.

Perolehan indikator persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti pada tahun 2023 dibandingkan nilai realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan 9,19% seperti pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 3.1 dengan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	+/(-)	%
Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti	83,11	90.75	7.64	9.19%

Indikator kinerja ini merupakan indikator yang baru ditetapkan pada tahun 2023 dan belum ditargetkan pada Renstra 2020 – 2024 sehingga realisasi indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan target Renstra 2020 - 2024.

Indikator kinerja ini didukung oleh kegiatan pengawasan dari seluruh bidang yang memberikan rekomendasi yang strategis bagi mitra kerja antara lain:

1. Reviu Tata Kelola atas Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Pupuk Kabupaten Fakfak;
2. Evaluasi Atas Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata Bahari di Kaimana Provinsi Papua Barat;
3. Evaluasi atas Program Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Papua Barat;
4. Audit Tujuan Tertentu atas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara pada Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2023; dan
5. Bimbingan teknis/pendampingan dalam rangka peningkatan kapabilitas pada APIP daerah di wilayah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Risiko pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional

Capaian kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional sebesar 113,44% dapat diraih dengan mengelola risiko yang teridentifikasi mengekspos sasaran kegiatan ini. *Residual risk* tertinggi yang yang dikelola adalah:

1. Pelaksanaan penugasan tidak sesuai dengan target kinerja dalam dokumen perencanaan;
2. Pedoman tidak dipahami pengguna;
3. Pegawai BPKP terlibat benturan kepentingan.

SASARAN KEGIATAN 4: MENINGKATNYA PENGAWASAN PEMBANGUNAN ATAS BADAN USAHA

Rata-rata capaian kinerja “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha” adalah 66,67%. Capaian sasaran kegiatan “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha” diukur oleh 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu:

1. Jumlah BUMD dengan kinerja sehat;
2. Jumlah BLUD dengan kinerja sehat;
3. Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan.

Capaian masing-masing indikator kinerja disajikan pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15 Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan 3

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
4.1	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	1	0	0,00%
4.2	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	1	1	100,00%
4.3	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	10	10	100,00%
Rata-rata kinerja Sasaran Kegiatan 1					66,67%

Uraian masing-masing indikator kinerja sasaran kegiatan “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha” adalah sebagai berikut:

4.1 JUMLAH BUMD DENGAN KINERJA SEHAT

Indikator jumlah BUMD dengan kinerja sehat dihitung berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan terhadap dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Realisasi kinerja jumlah BUMD dengan kinerja sehat pada tahun 2023 adalah sebesar 0 BUMD atau tercapai 0% dari target 1 BUMD. Indikator jumlah BUMD dengan kinerja sehat dihitung berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan terhadap dua Badan Usaha Jasa Air atau PDAM, yaitu Perumda Air Minum Minyei Arfak Kabupaten Manokwari dan Perumda Air Minum Tirta Pala Kabupaten Fakfak. Berdasarkan indikator kinerja Kementerian PUPR, capaian Perumda Air Minum Minyei Arfak Kabupaten Manokwari adalah sebesar 2,46 atau masuk kategori “Kurang Sehat” dan nilai kinerja Perumda Air Minum Tirta Pala Kabupaten Fakfak adalah sebesar 2,50 atau “Kurang Sehat”. Sedangkan berdasarkan indikator kinerja Kepmendagri 47 Tahun 1999, capaian kinerja Perumda Air Minum Minyei Arfak Kabupaten Manokwari adalah sebesar 47,62 atau Cukup dan nilai kinerja Perumda Air Minum Tirta Pala Kabupaten Fakfak adalah sebesar 59,15 atau Cukup.

Dalam mencapai target tersebut, Bidang Akuntan Negara telah melaksanakan PKPT Pengawasan atas BUMD Jasa Air dengan penugasan yakni Evaluasi Kinerja pada Perumda Air Minum Minyei Arfak Kabupaten Manokwari Tahun 2023 dan Evaluasi Kinerja pada Perumda Air Minum Tirta Pala Kabupaten Fakfak Tahun 2023.

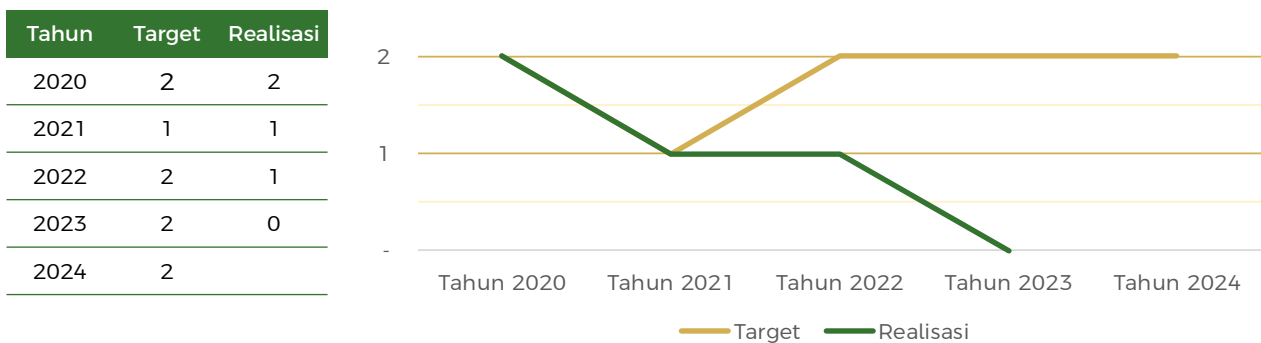
Perolehan jumlah BUMD dengan kinerja sehat pada tahun 2023 dibandingkan nilai realisasi tahun 2022 mengalami penurunan seperti dalam Tabel 3.16.

Tabel 3.16 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 4.1 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	+ / (-)	%
Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	1	0	-1	-100%

Jumlah BUMD dengan kinerja sehat dibandingkan dengan target Renstra tahun 2020 – 2024 tercapai 0% terhadap target 2 (dua) BUMD seperti disajikan pada Gambar 3.5.

Gambar 3.5 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja 3.1



Hambatan yang menyebabkan target BUMD dengan kinerja sehat tidak tercapai disebabkan, antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Teknis
 - a. Sumber air baku terbatas.
 - b. Instalasi pipa sudah tua, banyak bocor, berada ditengah jalan.
2. Faktor Non Teknis
 - a. Pemotongan pipa produksi oleh masyarakat ulayat.
 - b. Pembayaran tagihan rekening air tidak lancar.

Untuk memperbaiki kinerja tahun 2024, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat akan meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan BUMD dalam penerapan tata kelola, manajemen risiko dan sistem pengendalian intern perusahaan.

4.2 JUMLAH BLUD DENGAN KINERJA SEHAT

Indikator Jumlah BLUD dengan kinerja sehat dihitung berdasarkan hasil evaluasi kinerja dengan nilai baik.

Capaian kinerja jumlah BLUD dengan kinerja sehat pada tahun 2023 terealisasi 1 BLUD atau 100% dari target 1 BLUD. BLUD dengan kinerja sehat tersebut terjadi pada satu BLUD, yakni BLUD RSUD Dr. Alberth H. Torey Kabupaten Teluk Wondama.

Berdasarkan *Balanced Scorecards* ARSADA, capaian kinerja BLUD RSUD Dr. Alberth H. Torey Kabupaten Teluk Wondama pada aspek Pembelajaran dan Pertumbuhan, Proses Layanan Internal, Pelanggan dan Keuangan mendapatkan skor 73,50 atau kategori “Baik” dalam kelompok “BB”.

Berdasarkan Evaluasi Tata Kelola yang mengacu Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2021 tentang Pedoman Penilaian Tata Kelola dan Kinerja (Tingkat Maturitas) Badan Layanan Umum (dengan dilakukan penyesuaian bagi BLUD RSUD), Kinerja BLUD RSUD Dr. Alberth H. Torey Kabupaten Teluk Wondama yang dinilai pada indikator Perencanaan Strategis, Etika Bisnis, Stakeholder Relationship, Manajemen Risiko, Pengawasan dan Pelaporan mendapatkan skor 62 atau kategori “cukup” dalam kelompok “B”.

Perolehan jumlah BLUD dengan kinerja sehat pada tahun 2023 dibandingkan nilai realisasi tahun 2022 adalah tetap seperti dalam Tabel 3.17.

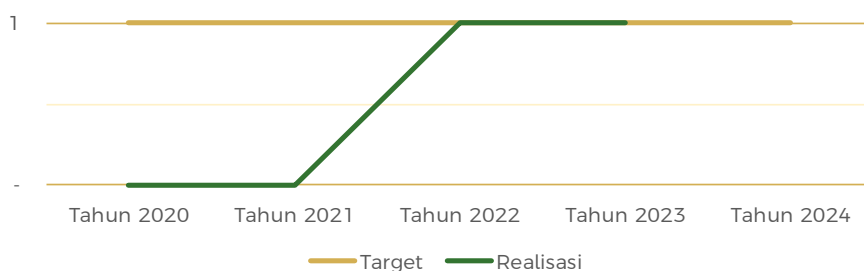
Tabel 3.17 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 4.2 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	+/(-)	%
Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	1	1	0	0% (tetap)

Jumlah BLUD dengan kinerja sehat dibandingkan dengan target Renstra tahun 2020 - 2024 tercapai 100% terhadap target 1 (satu) BLUD seperti disajikan pada Gambar 3.6.

Gambar 3.6 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja 4.2

Tahun	Target	Realisasi
2020	1	-
2021	1	-
2022	1	1
2023	1	1
2024	1	



Nilai realisasi indikator kinerja di atas diperoleh atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Akuntan Negara sesuai PKPT APP Non Prioritas, yaitu Evaluasi Kinerja pada BLUD RSUD Dr. Alberth H. Torey Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2023.

Untuk meningkatkan kinerja di tahun 2024, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat melakukan upaya mendorong perbaikan tata Kelola terhadap BLUD yang belum berkinerja sehat.

4.3 JUMLAH BUMDES YANG MAMPU MENYUSUN LAPORAN

Indikator Kinerja Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan diukur dengan menghitung jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan setelah adanya pendampingan penyusunan laporan keuangan oleh BPKP.

Capaian kinerja Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan pada tahun 2023 adalah sebesar 100%, yaitu realisasi 10 BUMDes dari target 10 BUMDes. BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan tahun 2022 tersebut adalah:

1. BUM Desa Pandu Upokarti Kampung Desay Distrik Prafi
2. BUM Desa Mulya Bersama Kampung Prafi Mulya Distrik Prafi
3. BUM Desa Sinar Papua Kampung Sidey Baru Distrik Sidey
4. BUM Desa Bogakarya Kampung Sumberboga Distrik Masni
5. BUM Desa Harapan Jowen Kampung Jowen Distrik Masni
6. BUM Desa Macuan Makmur Kampung Macuan Distrik Masni
7. BUM Desa Undi Mesta Oruk Kampung Undi Distrik Masni
8. BUM Desa Wariori Maju Bersama Kampung Wariror Distrik Masni
9. BUM Desa Titian Maju Bersama Kampung Bowi Subur Distrik Masni
10. BUM Desa Bangun Asanyar Kampung Udapi Hilir Distrik Prafi

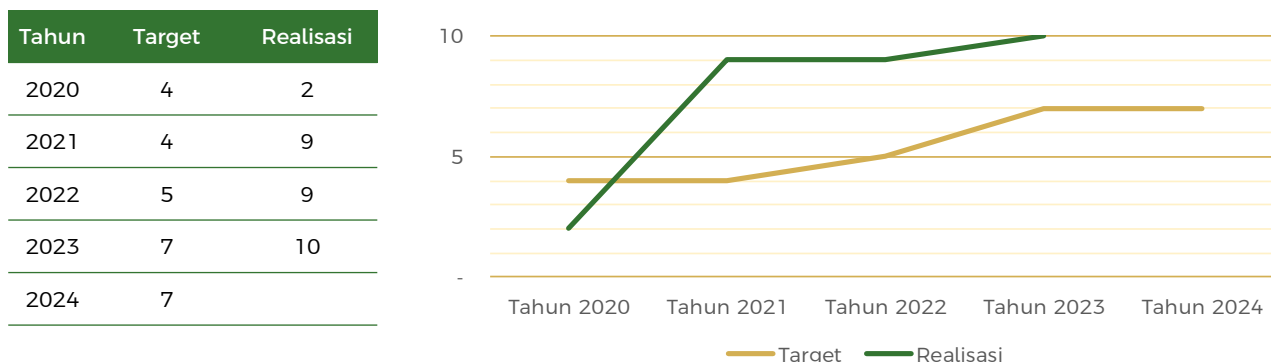
Perolehan jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan pada tahun 2023 dibandingkan nilai realisasi tahun 2022 adalah meningkat sebesar 11,11% seperti dalam Tabel 3.18.

Tabel 3.18 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 3.3 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	+ / (-)	%
Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	9	10	1	11,11%

Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan dibandingkan dengan target Renstra tahun 2020 – 2024 tercapai 143% terhadap target 7 (tujuh) BUMDes. Perkembangan capaian terhadap Renstra tahun 2020 – 2024 disajikan pada Gambar 3.7.

Gambar 3.7 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja 3.3



Untuk meningkatkan kinerja di tahun 2024, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat akan melakukan Upaya:

1. Koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung di Kabupaten mengenai pelaksanaan sosialisasi dan bimtek aplikasi Forsa BUM Desa untuk desa/kampung di wilayah Provinsi Papua Barat;
2. Memantau dan memastikan bahwa seluruh BUM Kampung telah mempertanggungjawabkan keuangannya dan menyusun laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi Forsa BUMDes.

Risiko pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha

Capaian kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha sebesar 66,67% diraih dengan mengelola risiko yang teridentifikasi mengekspos sasaran kegiatan ini. *Residual risk* tertinggi yang yang dikelola adalah:

1. Hasil Kegiatan Consulting (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) tidak dapat ditindaklanjuti;
2. Tim tidak dapat menemukan AOI/kelemahan penerapan GCG/MR/Satuan Pengawas Internal/Sistem Pengendalian Internal.

SASARAN KEGIATAN 5: MENINGKATNYA PENGAWASAN PEMBANGUNAN ATAS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI

Rata-rata capaian kinerja “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi” adalah 79,41%. Capaian Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi” diukur dengan menggunakan 4 (empat) indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti
2. Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang Dimanfaatkan/ Ditindaklanjuti
3. Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik
4. Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik

Capaian masing-masing indikator kinerja disajikan pada Tabel 3.19.

Tabel 3.19 Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan 5

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
5.1	Persentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/ Ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00%
5.2	Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang Dimanfaatkan/ Ditindaklanjuti	%	85,00	100,00	117,65%
5.3	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Pemda	3	3	100,00%
5.4	Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Badan Usaha	1	0	0,00%
Rata-rata kinerja Sasaran Kegiatan 5					79,41%

Uraian kinerja atas 4 (empat) indikator kinerja “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi” adalah sebagai berikut:

5.1 PERSENTASE HASIL PENGAWASAN REPRESIF YANG DIMANFAATKAN/DITINDAKLANJUTI

Indikator kinerja persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti diukur dengan menghitung perbandingan antara jumlah K/L/P/BU/APH yang menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan berdasarkan laporan hasil audit BPKP dengan jumlah penugasan pengawasan represif yang dilakukan. Pengawasan represif yang dimaksud yaitu pengawasan BPKP yang berorientasi represif dalam konteks pengendalian korupsi meliputi Audit Investigatif, Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), dan Pemberian Keterangan Ahli.

Realisasi persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti sebesar 100% atau mencapai 100% dari target tahun 2023 sebesar 100%. Hal ini berarti hasil pengawasan represif Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat seluruhnya telah dimanfaatkan/ditindaklanjuti oleh mitra kerja (APH).

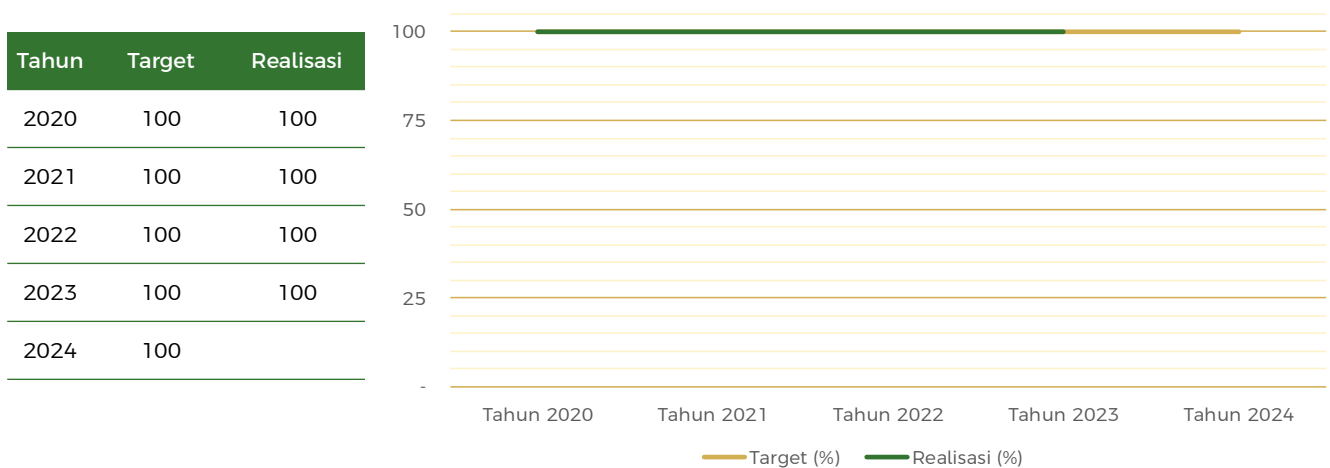
Perolehan nilai persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti pada tahun 2023 dibandingkan nilai realisasi tahun 2022 adalah tetap seperti pada tabel 3.20.

Tabel 3.20 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 5.1 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	+ / (-)	%
Persentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/ Ditindaklanjuti	100%	100%	-	0% (tetap)

Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti dibandingkan dengan target Renstra tahun 2020-2024 tercapai 100% terhadap target 100%. Capaian atas persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti dibandingkan dengan target Renstra tahun 2020-2024 disajikan dalam Gambar 3.8.

Gambar 3.8 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja 5.1



Capaian indikator ini diperoleh dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Investigasi atas PKPT APP Sektor Pengendalian Kecurangan dan Hambatan Kelancaran Pembangunan.

1. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara,
2. Pemberian Keterangan Ahli (PKA).

Capaian kinerja tahun 2023 didukung oleh:

1. Kerja sama yang baik dengan para mitra terutama aparat penegak hukum (APH);
2. Anggaran untuk pelaksanaan APP sudah tersedia sesuai kebutuhan;
3. Permintaan Ekspose dan Audit PKKN yang melimpah dari APH;
4. Rendal investigasi yang selalu responsif dan solutif terhadap permasalahan yang ditemukan oleh Tim Perwakilan.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2024, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat akan mempererat hubungan kerja

sama dengan mitra kerja (stakeholders) baik di wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya melalui koordinasi dan sinergi yang berkelanjutan dalam melaksanakan penugasan audit investigatif, audit PKKN, dan audit tujuan tertentu sesuai dengan standar audit.

5.2 PERSENTASE HASIL PENGAWASAN PREVENTIF DAN EDUKATIF YANG DIMANFAATKAN/DITINDAKLANJUTI

Indikator kinerja persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti diukur dengan menghitung perbandingan antara jumlah K/L/P/BU yang menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil pengawasan BPKP dengan jumlah K/L/P/BU sasaran pengawasan preventif/edukatif. Strategi preventif bertujuan mencegah terjadinya korupsi melalui penerapan sistem yang mampu mengendalikan korupsi melalui *Fraud Control Plan* (FCP) dan Profiling Risiko Fraud/Kecurangan. Sedangkan strategi edukatif menciptakan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman, perilaku serta budaya anti korupsi melalui proses pembelajaran informal yang terstruktur. Strategi ini menjadikan pembelajaran sebagai faktor kunci pemberantasan korupsi. Proses ini dilaksanakan melalui pembentukan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK), Kegiatan Narasumber Budaya Anti Korupsi dan Kegiatan Workshop.

Realisasi persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti sebesar 100% atau mencapai 117,5% dari target tahun 2023 sebesar 85%. Realisasi persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 adalah tetap seperti dalam Tabel 3.21.

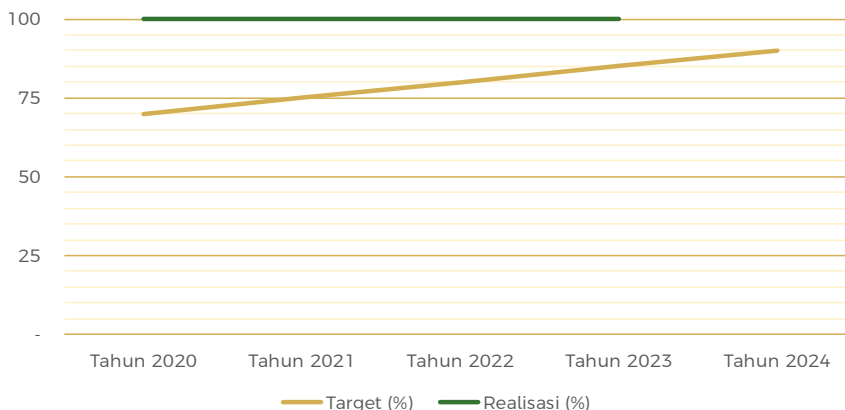
Tabel 3.21 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 5.2 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	+ / (-)	%
Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang Dimanfaatkan/ Ditindaklanjuti	100%	100%	-	0% (tetap)

Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti tahun 2023 dibandingkan dengan target Renstra tahun 2020-2024 tercapai 117,65% terhadap target nilai 85%. Perkembangan capaian atas persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti tahun 2023 dibandingkan dengan target Renstra tahun 2020-2024 disajikan pada Gambar 3.9.

Gambar 3.9 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja 5.2

Tahun	Target	Realisasi
2020	70	100
2021	75	100
2022	80	100
2023	85	100
2024	90	100



Capaian indikator ini diperoleh dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Investigasi atas PKPT APP Sektor Pengendalian Kecurangan dan Hambatan Kelancaran Pembangunan.

1. Sosialisasi dan Diagnostic Assessment Fraud Control Plan (FCP) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Papua Barat;
2. Narasumber Kegiatan Webinar Kontribusi Generasi Milenial Dalam Pencegahan Korupsi (MPAK);
3. Coaching Clinics Implementasi Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) pada Inspektorat Kabupaten Manokwari Selatan.

Capaian kinerja tahun 2023 didukung oleh kerja sama yang baik dengan para mitra kerja. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2024, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat akan melakukan upaya:

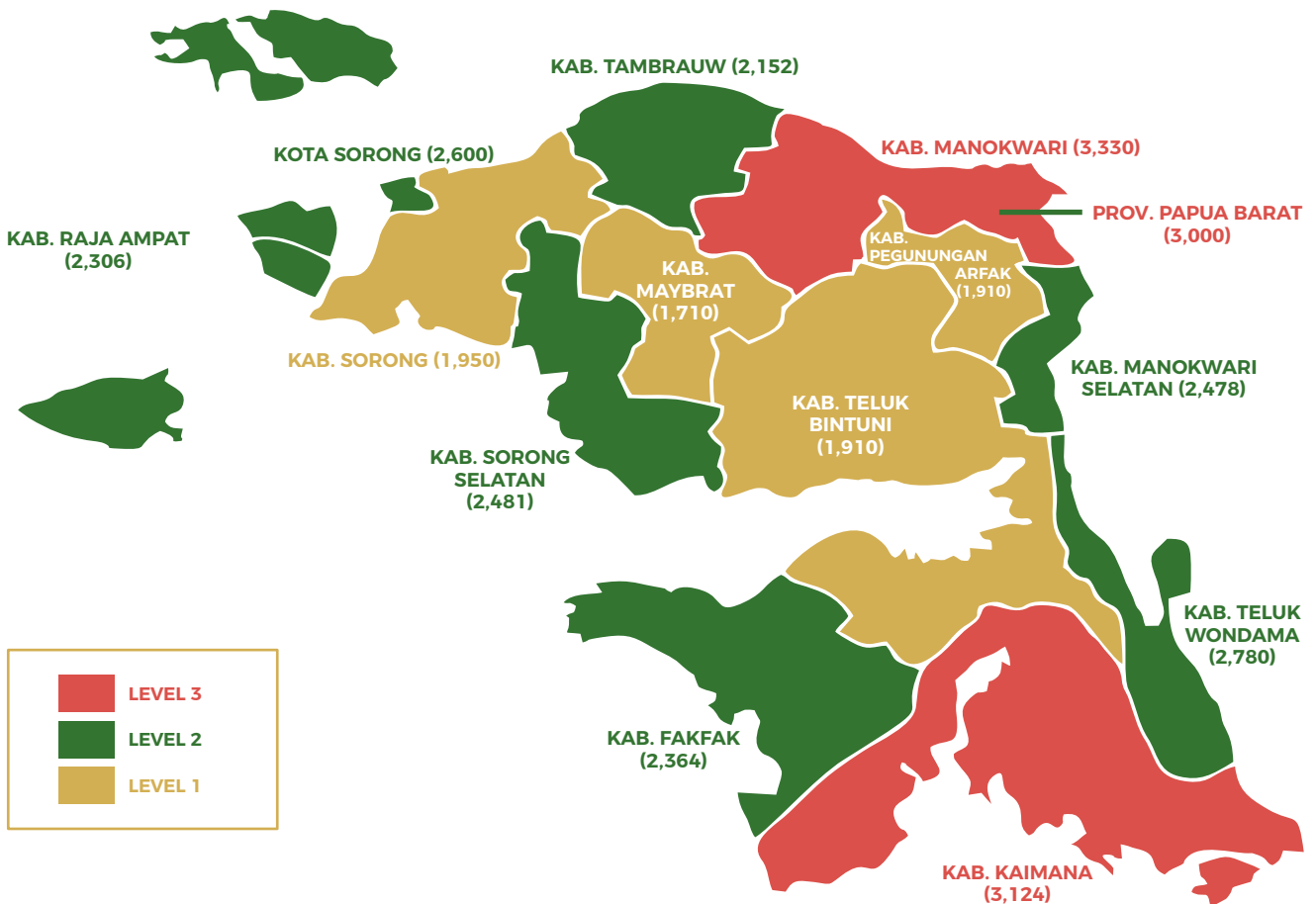
1. Mempererat hubungan kerja sama dengan mitra kerja (stakeholders) baik di wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya melalui koordinasi dan sinergi yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan pemantauan tindak lanjut atas saran/rekomendasi/Area of Improvement (AOI) atas hasil pengawasan BPKP.
3. Meningkatkan kompetensi SDM untuk meningkatkan mutu dan kualitas hasil pengawasan.
4. Mengalokasikan sumber daya SDM dan anggaran dengan lebih cermat untuk melaksanakan pengawasan sesuai kapasitas dan kompetensi yang dimiliki.
5. Akan lebih proaktif dalam memberikan usulan dan masukan atas pedoman yang disusun oleh rendal.

5.3 JUMLAH PEMDA DENGAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI BAIK

Indikator jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi baik diukur berdasarkan jumlah Pemda dengan skor Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) minimal 3,00 atau level 3 berdasarkan hasil penilaian/validasi oleh bidang Investigasi. IEPK merupakan komposit dari tiga pilar yang mempresentasi pengelolaan risiko korupsi secara komprehensif dan berada dalam perspektif Governance Risk Control (GRC). Ketiga pilar tersebut adalah kapabilitas pengelolaan risiko korupsi, penerapan strategi pencegahan, dan penanganan kejadian korupsi

Realisasi jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi baik pada tahun 2023 adalah 3 Pemda atau mencapai 100% dari target sebanyak 3 Pemda. Kedua pemda yang telah mencapai skor IEPK 3 tersebut adalah Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari, dan Kabupaten Kaimana, sebagaimana terlihat pada gambar 3.10.

Gambar 3.10 Skor IEPK Pemerintah Daerah di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya



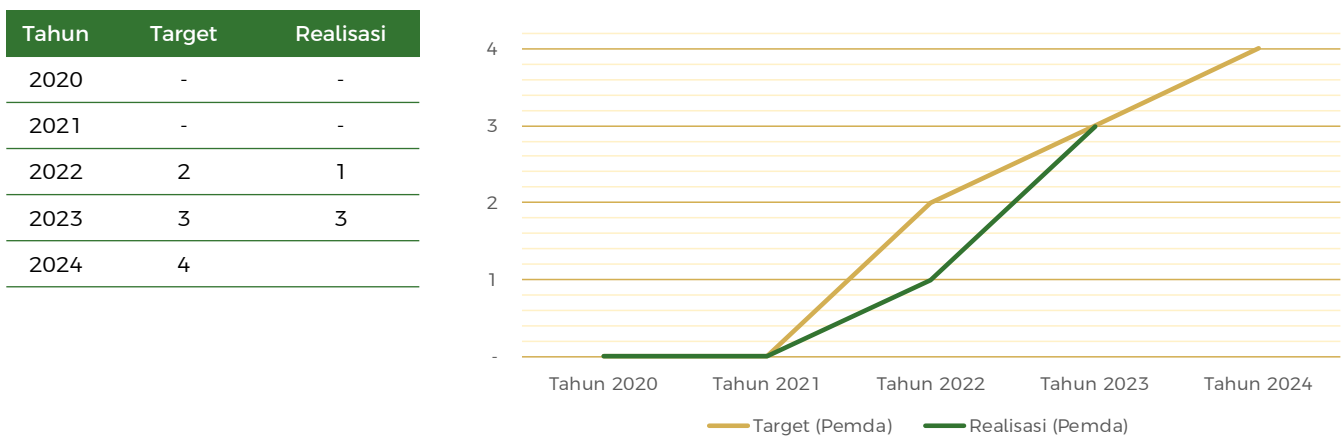
Perolehan indikator jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi baik pada tahun 2023 dibandingkan nilai realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 200% seperti dalam Tabel 3.22.

Tabel 3.22 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 5.3 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	+ / (-)	%
Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi baik	1	3	2	200%

Perkembangan capaian atas jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi baik dibandingkan dengan target Renstra tahun 2020-2024 disajikan pada Gambar 3.11.

Gambar 3.11 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja 5.3



Capaian indikator ini didukung dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Investigasi atas PKPT APP Pengendalian Kecurangan dan Hambatan Kelancaran Pembangunan, yaitu:

1. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun 2023.
2. Pendampingan Penilaian Mandiri Indikator IEPK pada Kabupaten Manokwari Tahun 2023.
3. Monitoring dan Validasi Hasil Penilaian Mandiri Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada Pemerintah Kabupaten Manokwari Tahun 2023.
4. Monitoring dan Validasi Hasil Penilaian Mandiri Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun 2023.
5. Monitoring dan Validasi Hasil Penilaian Mandiri Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada Pemerintah Kota Sorong Tahun 2023.
6. Sosialisasi, Bimtek dan Validasi Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada Pemerintah Kabupaten Kaimana.

Untuk meningkatkan kinerja di tahun 2024, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat akan terus mendorong dan berkoordinasi dengan Pemda untuk meningkatkan Efektivitas Pengendalian Korupsi (EPK) terutama terhadap Pemda yang menjadi target level 3 IEPK.

5.4 JUMLAH BADAN USAHA DENGAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI BAIK

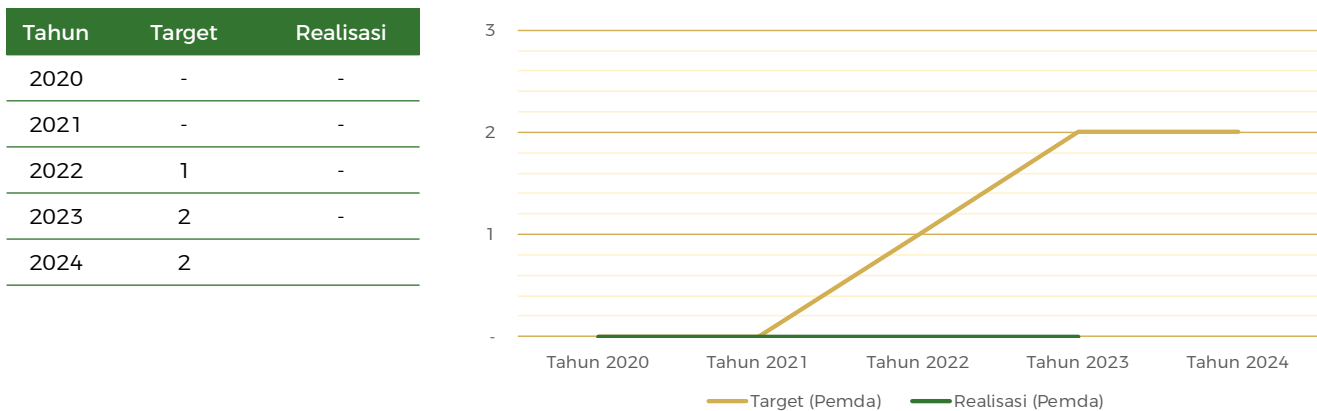
Indikator jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik diukur berdasarkan jumlah Badan Usaha dengan skor Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) minimal 3,00 atau level 3. IEPK merupakan komposit dari tiga pilar yang mempresentasi pengelolaan risiko korupsi secara komprehensif dan berada dalam perspektif Governance Risk Control (GRC). Ketiga pilar tersebut adalah kababilitas pengelolaan risiko korupsi, penerapan strategi pencegahan, dan penanganan kejadian korupsi

Realisasi jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik pada tahun 2023 adalah 0 atau 0% dari target sebanyak 1 Badan Usaha.

Indikator kinerja ini tidak ditargetkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga perolehan indikator jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik pada tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2022.

Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik dibandingkan dengan target Renstra tahun 2020-2024 tercapai 0% dari target sebanyak 2 Badan Usaha, seperti disajikan pada Gambar 3.12.

Gambar 3.12 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja 5.4



Indikator ini didukung dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Investigasi atas PKPT APP Pengendalian Kecurangan dan Hambatan Kelancaran Pembangunan, yaitu kegiatan Pengukuran Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Minyei Arfak Kabupaten Manokwari.

Capaian indikator jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik pada tahun 2023 masih belum memenuhi target. Faktor-faktor Penghambat Tercapainya Kinerja

1. Pedoman belum dibuat Rendal sehingga tidak bisa mengeksekusi penugasan (pada akhirnya bertumpuk pada triwulan III dan IV).

2. Piloting Penugasan dari Rendal dilakukan pada K/L/P/BU yang Ideal, tidak sesuai dengan kondisi Pemda di Lapangan.
3. Pelaksanaan APP yang sudah memiliki timeline terkadang menghambat pelaksanaan Audit PKKN/AI karena keterbatasan SDM.
4. Anggaran Penugasan Keinvestigasian minim, harus menunggu pergeseran RO dari APP atau Dana Mitra.

Karena itu, untuk meningkatkan kinerja di tahun 2024, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat akan terus mendorong dan berkoordinasi dengan Badan Usaha untuk meningkatkan Efektivitas Pengendalian Korupsi (EPK) terutama terhadap Badan Usaha yang menjadi target level 3 IEPK.

Risiko pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi

Capaian kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah sebesar 79,41% diraih dengan mengelola risiko yang teridentifikasi mengekspos sasaran kegiatan ini. *Residual risk* tertinggi yang yang dikelola adalah:

1. Ahli gagal meyakinkan majelis hakim di dalam pemberian keterangan ahli;
2. Majelis hakim dan/atau Penasihat hukum terdakwa menolak ahli dari BPKP untuk memberikan keterangan ahli di persidangan;
3. Auditor tidak dapat menemukan akar permasalahan korupsi pada organisasi;
4. Ancaman dari pihak ketiga;
5. Fraud Control Plan (FCP) gagal diterapkan;
6. Fraud Control Plan (FCP) sudah diterapkan tetapi gagal mendeteksi kecurangan.

SASARAN KEGIATAN 6: MENINGKATNYA PENGAWASAN PEMBANGUNAN ATAS KUALITAS PENGENDALIAN INTERN PADA K/L/P/BU

Rata-rata capaian kinerja Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU adalah 121,63%. Capaian sasaran kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU diukur melalui oleh 9 (sembilan) indikator kinerja, yaitu:

1. Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3
2. Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3
3. Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3
4. Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3
5. Jumlah Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3
6. Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah
7. Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel
8. Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai
9. Jumlah BLU/D dengan MRI \geq Level 3

Capaian masing-masing indikator kinerja disajikan pada Tabel 3.23.

Tabel 3.23 Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan 6

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
6.1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Provinsi	1	1	100,00%
6.2	Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Pemkab/ Kota	8	4	50,00%
6.3	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Provinsi	1	1	100,00%
6.4	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Kabupaten/ Kota	6	1	16,67%
6.5	Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3	Kabupaten/ Kota	3	0	0,00%
6.6	Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Pemda	3	0	0,00%
6.7	Jumlah Desa yang pengelolaannya akuntabel	Desa	25	102	408,00%
6.8	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	25	30	120,00%
6.9	Jumlah BLU/D dengan MRI \geq Level 3	BLU/D	1	0	0,00%
Rata-rata kinerja Sasaran Kegiatan 6					88,30%

Uraian masing-masing indikator kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU adalah sebagai berikut:

6.1 JUMLAH APIP PROVINSI DENGAN KAPABILITAS APIP \geq LEVEL 3

Indikator jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 dihitung dari jumlah APIP Provinsi yang berada pada kapabilitas APIP Level 3 berdasarkan hasil penilaian BPKP sesuai Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Capaian kinerja Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 pada tahun 2023 adalah sebesar 100% dengan realisasi 1 APIP Provinsi dari target 1 APIP Provinsi yaitu Inspektorat Provinsi Papua Barat. Inspektorat Provinsi Papua Barat telah mempertahankan kapabilitas APIP Level 3 yang sudah diperoleh pada tahun 2022.

Realisasi indikator kinerja jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas \geq Level 3 tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 adalah tetap yaitu 1 APIP, seperti dalam Tabel 3.24.

Tabel 3.24 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 6.1 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	+/(-)	%
Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	1	1	-	0% (tetap)

Kinerja ini diperoleh dari kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP (P3A) sesuai PKPT APP Sektor Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih melalui Pengawasan atas Peningkatan Kapabilitas APIP, yaitu:

1. Workshop terkait Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR);
2. Monitoring Area of Improvement (Aoi) kapabilitas APIP pada Inspektorat Provinsi Papua Barat;
3. Evaluasi atas penilaian mandiri kapabilitas APIP pada Inspektorat Provinsi Papua Barat.

6.2 JUMLAH APIP KABUPATEN/KOTA DENGAN KAPABILITAS APIP \geq LEVEL 3

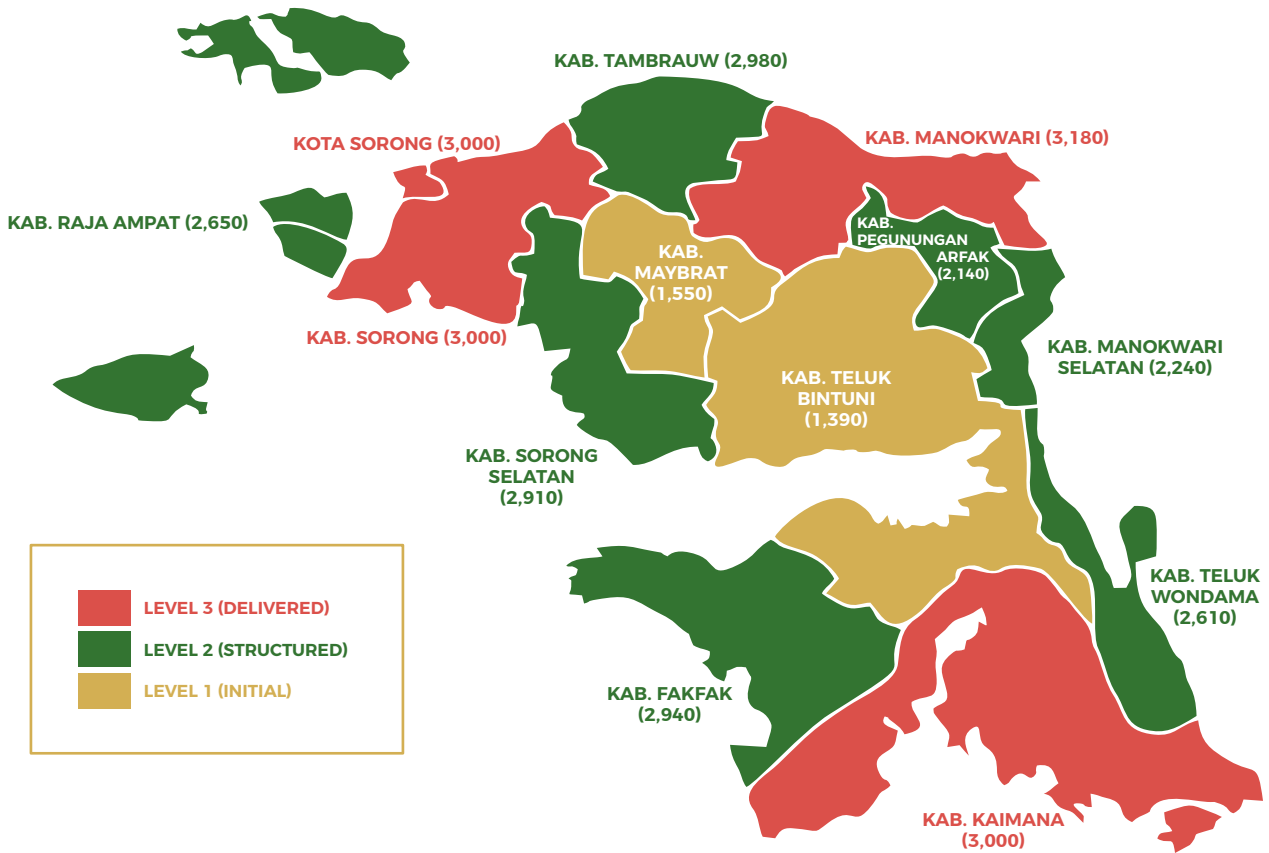
Indikator jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 dihitung dari jumlah APIP Kabupaten/Kota yang berada pada kapabilitas APIP Level 3 berdasarkan hasil penilaian BPKP sesuai Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Capaian kinerja Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 pada tahun 2023 adalah sebesar 50% dengan realisasi 4 APIP Kabupaten/Kota dari target 8 APIP Kabupaten/Kota. Keempat APIP tersebut adalah:

1. Inspektorat Kabupaten Sorong;
2. Inspektorat Kabupaten Manokwari;
3. Inspektorat Kota Sorong;
4. Inspektorat Kabupaten Kaimana.

Peta sebaran level kapabilitas APIP Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya dapat dilihat pada gambar 3.13.

Gambar 3.13 Level Kapabilitas APIP Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya



Realisasi indikator kinerja jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas \geq Level 3 tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 2 APIP, seperti dalam tabel 3.25.

Tabel 3.25 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 6.2 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	+ / (-)	%
Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	2	4	2	100%

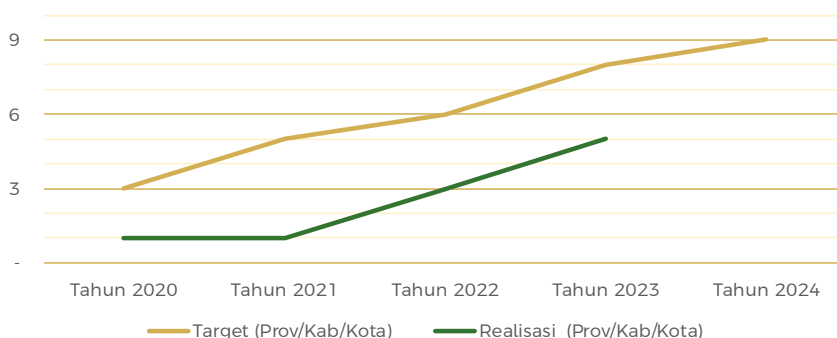
Kinerja ini diperoleh dari kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP (P3A) sesuai PKPT APP Sektor Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih melalui Pengawasan atas Peningkatan Kapabilitas APIP, yaitu:

1. Workshop terkait Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR);
2. Bimbingan teknis tematik pengawasan;
3. Monitoring Area of Improvement (Aoi) kapabilitas APIP;
4. Evaluasi atas penilaian mandiri kapabilitas APIP.

Seluruh realisasi indikator kinerja jumlah APIP dengan Kapabilitas \geq Level 3 termasuk Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota masih belum tercapai jika dibandingkan target Renstra tahun 2021 - 2024 seperti pada Gambar 3.14.

Gambar 3.14 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja jumlah APIP dengan Kapabilitas \geq Level 3

Tahun	Target	Realisasi
2020	3	1
2021	5	1
2022	6	3
2023	8	5
2024	9	



Tidak tercapainya kinerja jumlah APIP Daerah dengan Kapabilitas \geq Level 3 ini dikarenakan:

1. Tingginya target kinerja tidak diimbangi oleh sumber daya yang cukup baik SDM maupun anggaran. Sedangkan jumlah APIP yang dibina cukup banyak dengan kondisi geografis yang berjauhan.
2. Workshop secara online kurang efektif karena kendala jaringan di daerah.
3. Kurangnya SDM APIP di daerah sehingga mempengaruhi kegiatan pengawasan APIP daerah.
4. Kurangnya komitmen pimpinan APIP untuk meningkatkan level kapabilitas APIP.

Untuk meningkatkan kinerja di tahun 2024, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat akan melakukan:

1. Meningkatkan kerja sama dan mendorong komitmen pimpinan APIP Daerah di wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya dalam peningkatan kapabilitas APIP;
2. Mendorong dan membina APIP Daerah untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung kapabilitas APIP Level 3 seperti penerapan Manajemen Risiko (MR), Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR), dan Audit Kinerja;
3. Mendorong APIP Daerah untuk mengalokasikan SDM yang kompeten dan menyediakan dukungan anggaran yang memadai untuk peningkatan kompetensi yang mendukung kegiatan pengawasan;
4. Mendorong APIP Daerah meningkatkan kualitas hasil pengawasan seperti melaksanakan pengawasan keuangan desa menggunakan aplikasi Siswaskeudes;
5. Monitoring pelaksanaan *Area of Improvement (AoI)* atas hasil evaluasi sebelumnya;
6. Melakukan bimbingan teknis bersifat tematik.

6.3 JUMLAH PROVINSI DENGAN MATURITAS SPIP \geq LEVEL 3

Indikator kinerja jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 diukur dengan menghitung jumlah Provinsi di wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya yang telah mencapai Maturitas SPIP \geq Level 3 melalui tahapan evaluasi berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Capaian kinerja jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 pada tahun 2023 adalah sebesar 100% atau terealisasi 1 Provinsi dari target 1 Provinsi yaitu Provinsi Papua Barat.

Realisasi indikator kinerja jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 1 Pemda, seperti dalam tabel 3.26.

Tabel 3.26 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 6.3 dengan Tahun 2021

Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	+ / (-)	%
Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	0	1	1	100,00%

Kinerja ini diperoleh dari kegiatan pengawasan PKPT APP Sektor Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih yang dilaksanakan oleh Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) melalui Pengawasan atas Peningkatan Maturitas SPIP, yaitu:

1. Bimbingan Teknis Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2. Workshop Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi bagi Pemerintah Daerah;
3. Evaluasi Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

6.4 JUMLAH KABUPATEN/KOTA DENGAN MATURITAS SPIP \geq LEVEL 3

Indikator kinerja jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 diukur dengan menghitung jumlah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya yang telah mencapai Maturitas SPIP \geq Level 3 melalui tahapan evaluasi berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Capaian kinerja jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 pada tahun 2023 adalah sebesar 16,67% atau terealisasi 1 Kabupaten dari

target 1 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Raja Ampat. Realisasi indikator kinerja jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 adalah tetap seperti dalam Tabel 3.27.

Tabel 3.27 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 6.4 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	+/(-)	%
Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	1	1	0	0,00% (tetap)

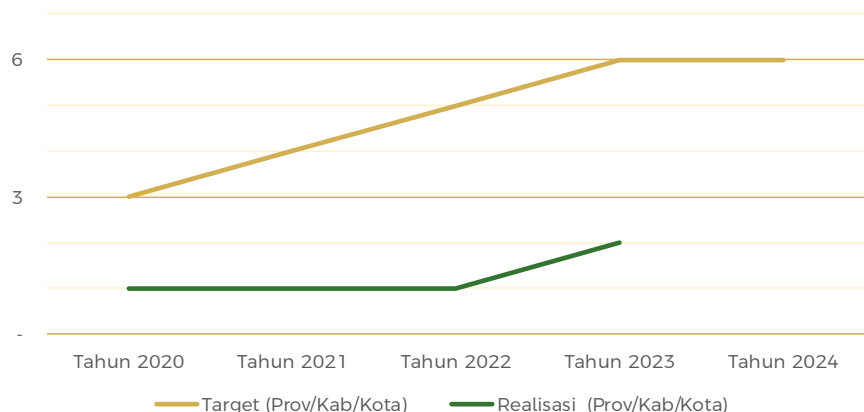
Kinerja ini diperoleh dari kegiatan pengawasan PKPT APP Sektor Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih yang dilaksanakan oleh Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) melalui Pengawasan atas Peningkatan Maturitas SPIP, yaitu:

1. Bimbingan Teknis Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2. Workshop Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi bagi Pemerintah Daerah;
3. Evaluasi Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Seluruh realisasi indikator kinerja jumlah Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 termasuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota masih belum tercapai jika dibandingkan target Renstra tahun 2021 - 2024 seperti pada Gambar 3.15.

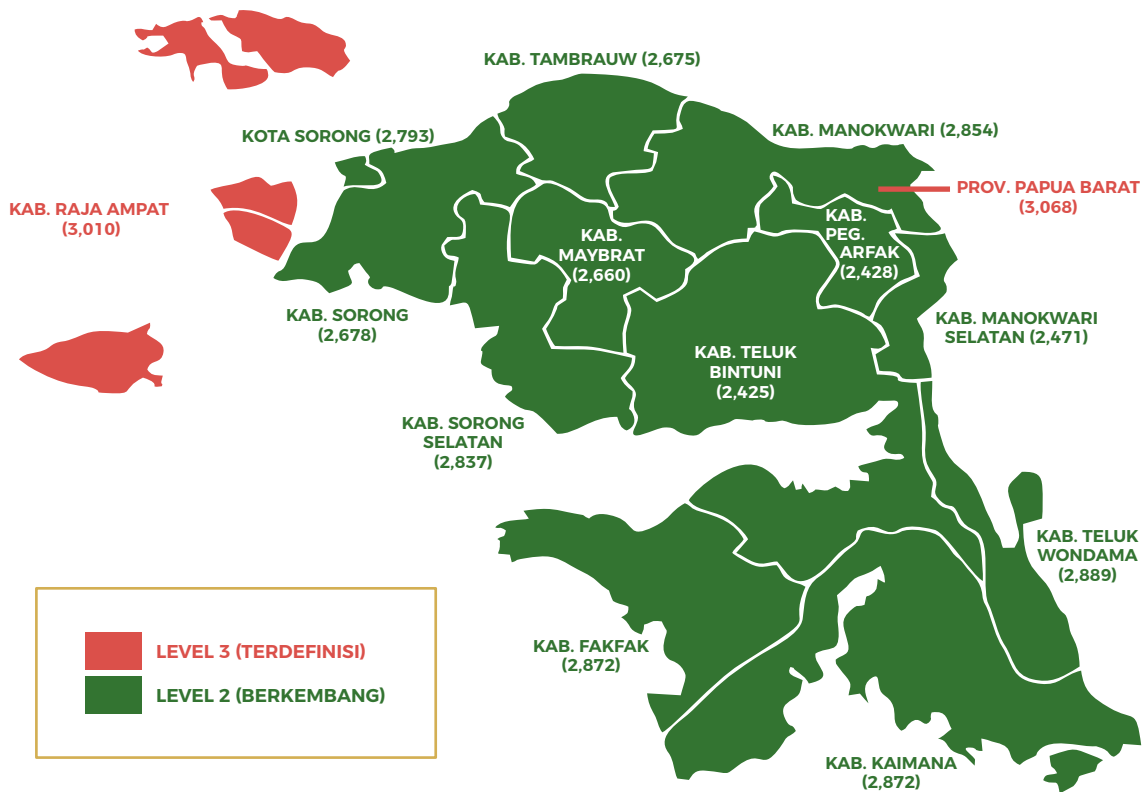
Gambar 3.15 Perkembangan Capaian jumlah Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3

Tahun	Target	Realisasi
2020	3	1
2021	4	1
2022	5	1
2023	6	2
2024	6	



Gambaran level maturitas SPIP seluruh pemda di wilayah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya disajikan pada Gambar 3.16.

Gambar 3.16 Level Maturitas SPIP pada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya



Hambatan dalam pencapaian kinerja ini antara lain :

1. Terjadinya kasus hukum yang melibatkan pimpinan pemda;
2. Belum optimalnya dukungan pimpinan pemerintah daerah terkait dengan penyelenggaraan SPIP;
3. Masih sangat terbatasnya sarana prasarana termasuk dukungan penyediaan teknologi informasi untuk penyelenggaraan SPIP.

Untuk meningkatkan kinerja di tahun 2024, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat akan melakukan:

1. Meningkatkan kerja sama dan mendorong komitmen pimpinan Daerah di wilayah Provinsi Papua Barat dalam peningkatan maturitas SPIP;
2. Berkoordinasi dengan APIP Daerah untuk mendorong dan membina penyelenggaraan SPIP pada OPD di wilayah Pemda APIP terkait;
3. Monitoring pelaksanaan Area of Improvement (AoI) atas hasil evaluasi tahun sebelumnya.

6.5 JUMLAH KABUPATEN/KOTA DENGAN MRI ≥ LEVEL 3

Indikator kinerja jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI ≥ Level 3 diukur dengan menghitung jumlah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya yang memiliki Indeks Manajemen Risiko (MRI) pada ≥ Level 3 melalui tahapan evaluasi berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah. Penilaian MRI ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian maturitas SPIP terintegrasi.

Capaian kinerja jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3 pada tahun 2023 adalah sebesar 0% atau terealisasi 0 Kabupaten/Kota dari target sebanyak 3 Kabupaten/Kota. Realisasi indikator kinerja jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3 tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami penurunan seperti dalam Tabel 3.28.

Tabel 3.28 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 6.5 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	+ / (-)	%
Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3	1	0	-1	-100,00%

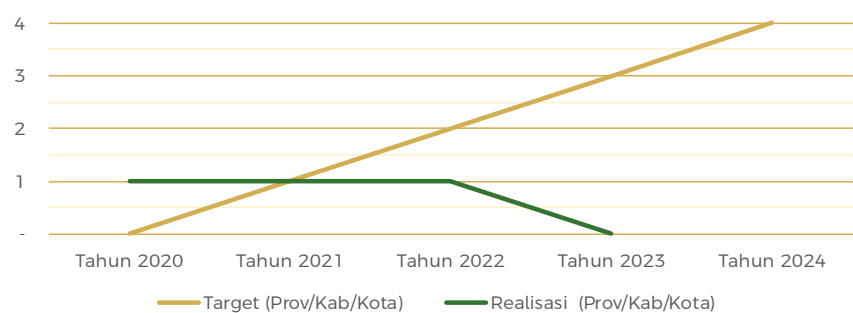
Kinerja ini diperoleh dari kegiatan pengawasan PKPT APP Sektor Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih yang dilaksanakan oleh Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) melalui Pengawasan atas Peningkatan Maturitas SPIP, yaitu:

1. Bimbingan Teknis Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dan Manajemen Risiko;
2. Evaluasi Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Seluruh realisasi indikator kinerja jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3 masih belum tercapai jika dibandingkan target Renstra tahun 2020 - 2024 seperti pada Gambar 3.17.

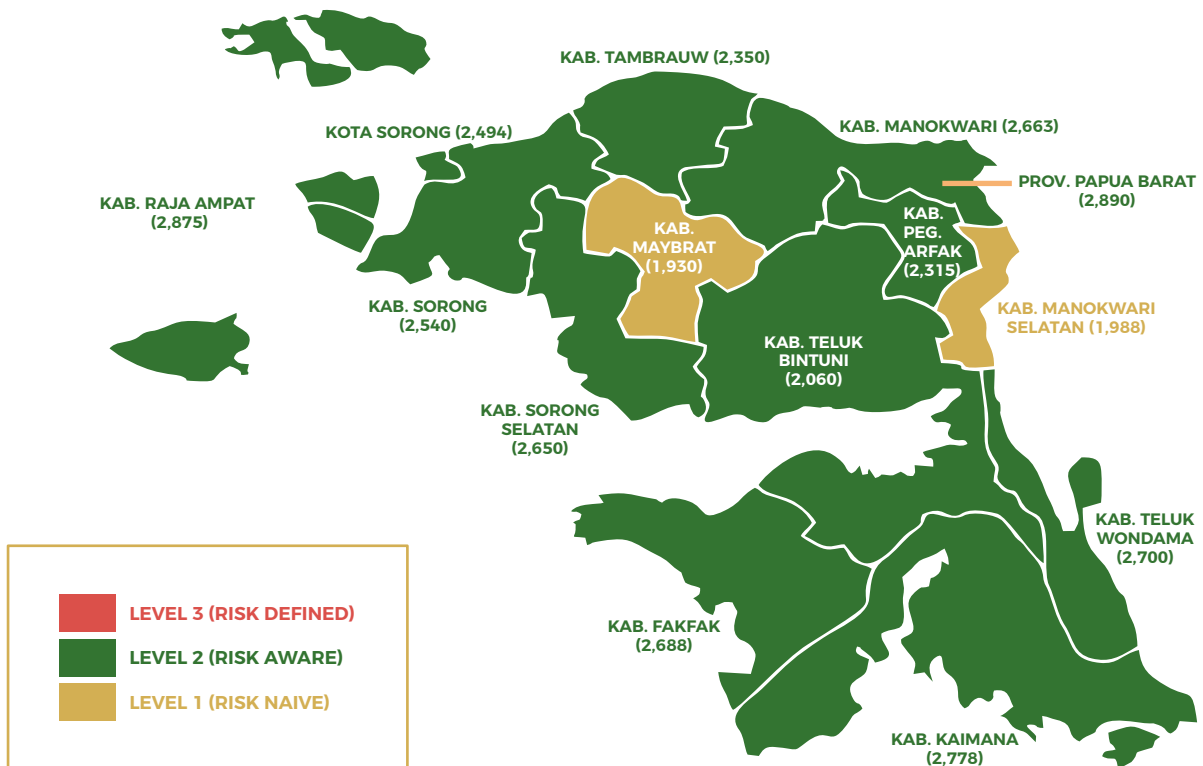
Gambar 3.17 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja 6.5

Tahun	Target	Realisasi
2020	-	1
2021	1	1
2022	2	1
2023	3	0
2024	4	



Gambaran level manajemen risiko seluruh pemda di wilayah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya disajikan pada Gambar 3.18.

Gambar 3.18 MRI pada Pemerintah Daerah di provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya



Hambatan dalam pencapaian kinerja ini antara lain:

1. Belum optimalnya dukungan pimpinan pemerintah daerah terkait dengan peningkatan Manajemen Risiko (MR);
2. Kebijakan MR pemda masih sebatas formalitas dan belum diimplementasikan dengan efektif;
3. Kurangnya SDM Pemda yang memiliki kompetensi terkait manajemen risiko;
4. Masih sangat terbatasnya sarana prasarana termasuk dukungan penyediaan teknologi informasi untuk peningkatan MRI.

Untuk meningkatkan kinerja di tahun 2024, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat akan melakukan:

1. Meningkatkan kerja sama dan mendorong komitmen pimpinan Daerah di wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya dalam penerapan Manajemen Risiko (MR);
2. Berkoordinasi dengan APIP Daerah untuk mendorong dan membina Manajemen Risiko (MR) pada OPD di wilayah Pemda APIP terkait;
3. Monitoring pelaksanaan Area of Improvement (AoI) atas hasil evaluasi tahun sebelumnya.

6.6 JUMLAH PEMDA YANG AKUNTABEL DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KINERJA DAERAH

Indikator kinerja Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah diukur berdasarkan banyaknya jumlah pemda di wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya yang

akuntabel (efisien dan efektif) dalam pengelolaan keuangan dan kinerja. Pengertian Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja disini adalah Pemda yang memperoleh Opini LKPD WTP dan nilai evaluasi SAKIP minimal BB.

Realisasi jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja pada tahun 2023 adalah sebanyak 0 pemda atau mencapai 0% dari target sebanyak 3 pemda. Ini dikarenakan seluruh pemda di wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya sudah memperoleh opini LKPD WTP namun tidak satu pun yang memperoleh nilai evaluasi SAKIP BB ke atas.

Indikator kinerja Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah tidak ditargetkan di tahun 2022 sehingga realisasi tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2022. Indikator kinerja Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah pada Perkin tahun 2023 dan Renstra 2020 – 2024 memiliki satuan dan target yang berbeda sehingga tidak dapat diperbandingkan.

Nilai realisasi indikator kinerja di atas didukung oleh pelaksanaan beberapa PKPT Non Prioritas yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) antara lain sebagai berikut:

1. Asistensi, bimbingan teknis, workshop, maupun coaching clinic FMIS.
2. Konsultasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
3. Pendampingan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023

Hambatan tercapainya kinerja di atas adalah:

1. Kurangnya komitmen pimpinan pemda dalam upaya perbaikan/ peningkatan implementasi SAKIP di daerahnya;
2. Kurangnya SDM pemda yang memahami implementasi SAKIP;
3. Masih terbatasnya pembinaan yang dilakukan terkait SAKIP di daerah.

Untuk meningkatkan kinerja di tahun 2024, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat akan melaksanakan:

1. Mendorong pemda untuk meningkatkan dan memperbaiki implementasi SAKIP di daerahnya;
2. Mengusulkan diklat bagi SDM pemda terkait SAKIP;
3. Meningkatkan kegiatan pembinaan SAKIP di daerah.

6.7 JUMLAH DESA YANG PENGELOLAAN KEUANGANNYA AKUNTABEL

Indikator jumlah desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel diukur dari jumlah desa di wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Suatu desa dikatakan telah memiliki pengelolaan keuangan yang akuntabel apabila memenuhi kriteria antara lain:

1. Menggunakan kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa;
2. Menggunakan Aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan;
3. Membuat Laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan yang disyaratkan pada setiap tahapan;
4. Menyusun laporan realisasi anggaran berdasarkan APBDs;
5. Melakukan pengadministrasian dokumen/berkas/data keuangan.

Realisasi jumlah desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel pada tahun 2023 adalah sebanyak 102 desa atau mencapai 408% dari target sebanyak 25 desa. Desa-desanya tersebut terdiri dari 30 desa di Kabupaten Manokwari Selatan dan 72 desa di Kabupaten Fakfak dengan rincian pada Tabel 3.29.

Tabel 3.29 Desa yang Pengelolaan Keuangannya Akuntabel

Kabupaten	Kecamatan	Desa	
Kabupaten Manokwari Selatan	Distrik Ransiki	1. Kampung Ransiki	
		Distrik Oransbari	2. Kampung Oransbari
			3. Kampung Sidomulyo
			4. Kampung Waroser
			5. Kampung Margo Rukun
			6. Kampung Muari
			7. Kampung Watariri
			8. Kampung Masabui
			9. Kampung Warbiadi
			10. Kampung Margomulyo
			11. Kampung Sindang Jaya
			12. Kampung Wandoki
			13. Kampung Akeju
			14. Kampung Masabui II
	Distrik Dataran Isim		15. Kampung Isim
		16. Kampung Duhugesas	
		17. Kampung Tubes	
		18. Kampung Umohousi	
		19. Kampung Tohosta	
		20. Kampung Hugomot	
		21. Kampung Dhisu	
		22. Kampung Inyuara	
		23. Kampung Desra	
		24. Kampung Mindermes	
		25. Kampung Sibjo	
	26. Kampung Dibera		
	Distrik Tahota	27. Kampung Yarmatum	
		28. Kampung Reyob	
		29. Kampung Kaprus	
	30. Kampung Seimeba		
Kabupaten Fakfak	Distrik Fakfak	1. Kampung Gewerpe	
		2. Kampung Wrikapal	
	Distrik Fakfak Barat	3. Kampung Kiat	
		4. Kampung Purwasak	
		5. Kampung Wurunkendik	
		6. Kampung Kwuhkendak	
		7. Kampung Purwahab Tonggo	
8. Kampung Porum			

Kabupaten	Kecamatan	Desa	
Kabupaten Fakfak	Distrik Kokas	9. Kampung Mandoni	10. Kampung Sekar
	Distrik Fakfak Barat	11. Kampung Ugar	12. Kampung Sisir
		13. Kampung Baru	14. Kampung Patimburak
		15. Kampung Kinam	16. Kampung Mambunibuni
		17. Kampung Kriawaswas	18. Kampung Sosar
		19. Kampung Pang Wadar	20. Kampung Masina
		21. Kampung Kimina Kra	
	Distrik Fakfak Tengah	22. Kampung Katemba	23. Kampung Mandopma
		24. Kampung Kanantare	
	Distrik Karas	25. Kampung Faur	26. Kampung Arak
	Distrik Bomberay	27. Kampung Onimsari	28. Kampung Mekarsari
		29. Kampung Bumi Moroh Indah	30. Kampung Onim Jaya
		31. Kampung Wono Rejo	
	Distrik Kramongmongga	32. Kampung Kramongmongga	33. Kampung Mamur
		34. Kampung Nembukteb	35. Kampung Pikpik
		36. Kampung Kwamkwamur	37. Kampung Tentreda
	Distrik Teluk Patipi	38. Kampung Degen	39. Kampung Patipi Pasir
		40. Kampung Patipi Pulau	41. Kampung Muhri
	Distrik Pariwari	42. Kampung Tanama	43. Kampung Kapaurtutin
		44. Kampung Sekban	
	Distrik Wartutin	45. Kampung Werpigan	46. Kampung Wartutin
47. Kampung Siboru		48. Kampung Kamandur Tetar	
Distrik Fakfak Timur Tengah	49. Kampung Kalamanuk	50. Kampung Krabelang	
	51. Kampung Darembang	52. Kampung Goras	
	53. Kampung Mitimber	54. Kampung Waremu	
	55. Kampung Mbahamdandra	56. Kampung Goras Selatan	
Distrik Kayauni	57. Kampung Kaburbur	58. Kampung Ubadari	
	59. Kampung Homorkokma	60. Kampung Pattukar	
	61. Kampung Kayuni	62. Kampung Warpa	
Distrik Furwagi	63. Kampung Salakiti	64. Kampung Tawar	
	65. Kampung Rumbati	66. Kampung Werfra	
	67. Kampung Twootkindik		
Distrik Tomage	68. Kampung Wonodadi Mulya	69. Kampung Tomage	
	70. Kampung Otoweri	71. Kampung Wamosan	
	72. Kampung Wasa Mulya		

Data tersebut sudah direkonsiliasi secara nasional melalui aplikasi Situwassa.

Realisasi indikator kinerja jumlah desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 80 desa seperti dalam Tabel 3.30.

Tabel 3.30 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 6.7 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	+ / (-)	%
Jumlah desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	22	102	80	363,34%

Nilai realisasi indikator kinerja di atas diperoleh dari pelaksanaan beberapa PKPT APP yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) antara lain sebagai berikut:

1. Evaluasi atas Tata Kelola dan Perencanaan Pembangunan Desa,
2. Pelatihan Desa Anti Korupsi,
3. Monitoring dan Evaluasi atas Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa,
4. Evaluasi Atas Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Desa,
5. Workshop evaluasi keuangan dan pembangunan desa,
6. Evaluasi Program Pengembangan Potensi Desa.

Indikator kinerja ini merupakan indikator yang baru ditetapkan pada tahun 2022 dan belum ditargetkan pada Renstra 2020 - 2024 sehingga realisasi indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan target Renstra 2020 - 2024.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2024, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat akan melakukan upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kerja sama dengan mitra kerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat;
2. Meningkatkan kegiatan pengawasan terkait pengelolaan keuangan desa baik berupa kegiatan assurance maupun consulting;
3. Monitoring atas rekomendasi yang diberikan.

6.8 JUMLAH DESA YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN ASET DESA SECARA MEMADAI

Indikator jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai diukur dari jumlah desa di wilayah Provinsi Papua Barat yang telah melaksanakan pengelolaan aset desa secara memadai. Suatu desa dikatakan telah memiliki pengelolaan aset desa secara memadai apabila memenuhi kriteria antara lain:

1. Mengimplementasikan kebijakan yang berlaku,
2. Melakukan inventarisasi /pemeriksaan aset,
3. Membuat Buku/Daftar Aset desa,
4. Laporan inventarisasi/pemeriksaan aset,
5. Daftar aset disertai nilai masing-masing aset.

Realisasi jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai pada tahun 2023 adalah sebanyak 30 desa atau mencapai 120% dari target sebanyak 25 desa. Realisasi indikator kinerja desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 8 desa seperti dalam tabel 3.31.

Tabel 3.31 Perbandingan Capaian Indikator 6.8 dengan tahun 2022

Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	+/(-)	%
Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	22	30	8	36.36%

Desa-desa tersebut terdiri dari 30 desa di Kabupaten Manokwari Selatan dengan rincian pada Tabel 3.32.

Tabel 3.32 Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai

Kabupaten	Kecamatan	Desa
Kabupaten Manokwari Selatan	Distrik Ransiki	1. Kampung Ransiki
	Distrik Oransbari	2. Kampung Oransbari
		3. Kampung Sidomulyo
		4. Kampung Waroser
		5. Kampung Margo Rukun
		6. Kampung Muari
		7. Kampung Watariri
		8. Kampung Masabui
		9. Kampung Warbiadi
		10. Kampung Margomulyo
		11. Kampung Sindang Jaya
		12. Kampung Wandoki
		13. Kampung Akeju
		14. Kampung Masabui II

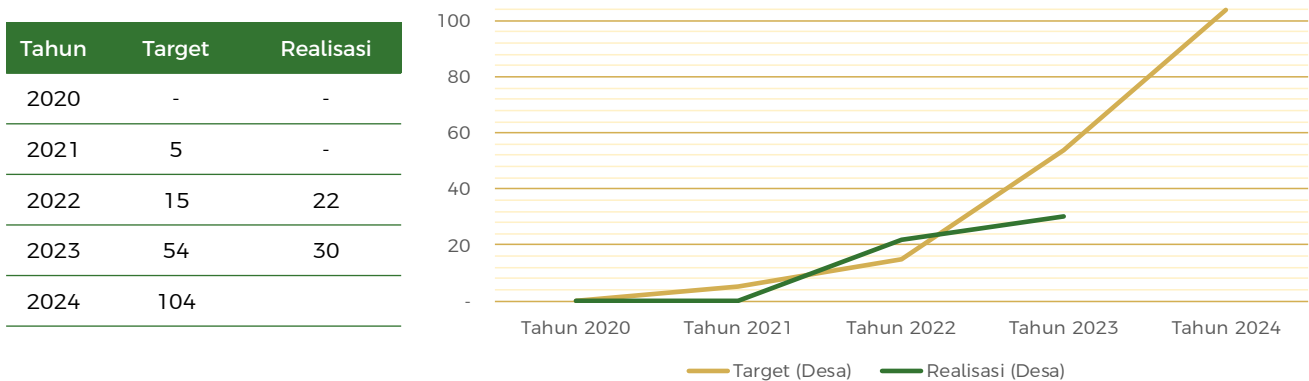
Kabupaten	Kecamatan	Desa	
Kabupaten Manokwari Selatan	Distrik Dataran Isim	15. Kampung Isim	16. Kampung Duhuges
		17. Kampung Tubes	18. Kampung Umohousi
		19. Kampung Tohosta	20. Kampung Hugomot
		21. Kampung Dihisu	22. Kampung Inyuara
		23. Kampung Desra	24. Kampung Mindermes
	Distrik Tahota	25. Kampung Sibjo	26. Kampung Dibera
		27. Kampung Yarmatum	28. Kampung Reyob
		29. Kampung Kaprus	30. Kampung Seimeba

Nilai realisasi indikator kinerja di atas diperoleh dari pelaksanaan beberapa PKPT APP yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) antara lain sebagai berikut:

1. Monitoring dan Evaluasi atas Akuntabilitas Tata Kelola Aset Desa, Pengawasan atas Pengendalian Intern Tata Kelola Desa;
2. Pelatihan Peningkatan Kapasitas bagi Aparatur Kampung melalui Pelatihan Siskeudes dan Penataan Aset Kampung di Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2023.

Perkembangan capaian atas desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai dibandingkan dengan target Renstra tahun 2020 – 2024 disajikan pada Gambar 3.19.

Gambar 3.19 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja 6.8



Perbedaan capaian realisasi kinerja terhadap target Perkin Tahun 2023 dengan target 2023 pada Renstra 2020-2024 dikarenakan adanya revisi Perkin di tahun berjalan yang tidak diikuti dengan revisi target pada Renstra 2020-2024.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2024, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat akan melakukan upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kerja sama dengan mitra kerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat;

2. Meningkatkan kegiatan pengawasan terkait pengelolaan aset desa baik berupa kegiatan assurance maupun consulting;
3. Monitoring atas rekomendasi yang diberikan.

6.9 JUMLAH BLUD DENGAN MRI \geq LEVEL 3

Indikator kinerja jumlah BLUD dengan MRI \geq level 3 diukur dengan menghitung jumlah BLUD di Wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya yang telah memiliki karakteristik MRI \geq level 3.

Capaian kinerja Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3 pada tahun 2023 adalah sebesar 0%, yaitu realisasi 0 BLUD dari target 1 BLUD. Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3 pada tahun 2023 dibandingkan nilai realisasi tahun 2022 adalah tetap seperti dalam Tabel 3.33.

Tabel 3.33 Perbandingan Capaian Indikator 6.8 dengan tahun 2022

Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	+/(-)	%
Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3	0	0	0	0,00% (tetap)

Indikator kinerja ini merupakan indikator yang baru ditetapkan pada tahun 2022 dan belum ditargetkan pada Renstra 2020 - 2024 sehingga realisasi indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan target Renstra 2020 - 2024.

Dalam mencapai target tersebut, Bidang Akuntan Negara telah melaksanakan PKPT Manajemen Risiko Badan Usaha dan Badan Layanan dengan melakukan pemetaan (mapping), sosialisasi bimbingan teknis penyusunan pedoman manajemen risiko dan evaluasi tingkat maturitas penerapan manajemen risiko.

Hambatan yang menyebabkan target kinerja BLUD dengan MRI \geq level 3 tidak tercapai disebabkan, antara lain sebagai berikut:

1. Perkada MR di Prov/Kab/Kota, termasuk BLUD di Papua Barat dan Papua Barat Daya baru terbit tahun 2023 dan belum dikomunikasikan dan/atau dipahami seluruh OPD;
2. Register risiko RSUD masih formalitas, sebatas memenuhi persyaratan akreditasi RSUD;
3. SDM BLUD belum ada yang mengikuti diklat MR;
4. BLUD belum mengalokasikan anggaran pelatihan dan mitigasi risiko.

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun 2024, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat akan berupaya:

1. Menyelenggarakan Program Pelatihan Mandiri (PPM) dan mendorong SDM internal untuk meningkatkan kompetensi MR dengan mempelajari pedoman tentang BLUD dan manajemen risiko.

2. Meminta dukungan dan komitmen kepada kepala daerah untuk mendorong/menginstruksikan kepada direktur BLUD dan BUMD agar menerapkan manajemen risiko.
3. Memilih dan menetapkan BLUD untuk menjadi sasaran pengawasan intern (sosialisasi, bimbingan teknis/asistensi penyusunan kebijakan/pedoman MR, dan penilaian risiko/risk assessment), monitoring penerapan MR dan coaching clinic.
4. Melakukan penilaian maturitas MR BLUD dan BUMD di BLUD RSUD teluk Wondama.

Risiko pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU

Capaian kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU adalah 88,30% dapat diraih dengan mengelola risiko yang teridentifikasi mengekspos sasaran kegiatan ini. *Residual risk* tertinggi yang yang dikelola adalah:

1. Komitmen Kepala Daerah dan/atau Pimpinan APIP masih kurang dalam hal peningkatan kapabilitas APIP;
2. Kualitas Kegiatan Consulting (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) kurang optimal;
3. Hasil Kegiatan Consulting (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) terlambat ditindaklanjuti;
4. SDM yang ada belum memenuhi kompetensi yang dibutuhkan;
5. Auditan tidak mau melanjutkan tahapan penugasan (FCP, SPIP, MR, dsb) ke tahap berikutnya.

SASARAN KEGIATAN 7: MENINGKATNYA TATA KELOLA UNIT KERJA

Rata-rata capaian kinerja Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja adalah 109,67%. Capaian sasaran kegiatan Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja diukur melalui oleh 7 (tujuh) indikator kinerja, yaitu:

1. Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja;
2. Nilai SAKIP Unit Kerja;
3. Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja);
4. Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja);
5. Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja;
6. Skor IKPA Unit Kerja;
7. Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja.
8. Capaian masing-masing indikator kinerja disajikan pada Tabel 3.34.

Tabel 3.34 Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan 7

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
7.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor skala 100	75,00	81.07	108.09%
7.2	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor skala 100	82,00	82.15	105,43%

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
7.3	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)	(%) Persen	70,00	90,00	128.57%
7.4	Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	(%) Persen	100,00	100,00	100,00%
7.5	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks skala 100	75,00	84.35	112.47%
7.6	Skor IKPA Unit Kerja	Indeks skala 100	95,00	91.56	96.38%
7.7	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks skala 100	80,00	97.60	122.00%
Rata-rata kinerja Sasaran Kegiatan 6					109.67%

Uraian masing-masing indikator kinerja sasaran kegiatan “Meningkatnya Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja” adalah sebagai berikut:

7.1 NILAI SKOR ZONA INTEGRITAS UNIT KERJA

Indikator kinerja nilai skor Zona Integritas (ZI) unit kerja diukur dengan penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas yang mengacu kepada pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB.

Pada tahun 2023, realisasi nilai skor Zona Integritas adalah sebesar 81,07 atau mencapai 108% dari target sebesar 75. Nilai skor Zona Integritas ini diperoleh atas hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat pada tahun 2023.

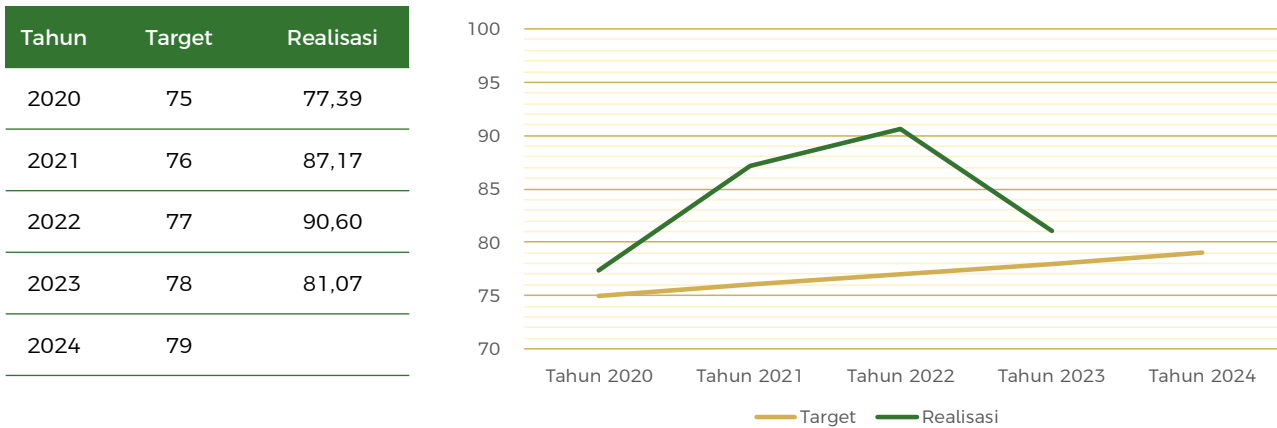
Realisasi kinerja skor Zona Integritas tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 telah mengalami penurunan sebesar 10,52% seperti dalam Tabel 3.35.

Tabel 3.35 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 7.1 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	+/(-)	%
Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	90,60	81.07	-9.53	-10.52%

Nilai skor Zona Integritas tahun 2023 dibandingkan dengan target Renstra tahun 2020 - 2024 tercapai 104% terhadap target skor 78. Perkembangan capaian atas nilai skor Zona Integritas tahun 2023 dibandingkan dengan target Renstra tahun 2020 - 2024 disajikan pada Gambar 3.20.

Gambar 3.20 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja 7.1



Capaian kinerja didukung antara lain oleh:

1. Telah membentuk Tim untuk pelaksanaan zona integritas;
2. Terdapat media sosialisasi pembangunan WBK/WBBM;
3. Pimpinan berperan sebagai role model pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM;
4. SDM menggunakan teknologi informasi dalam menunjang kegiatan operasional;
5. Penempatan pegawai mengacu pada kebutuhan berdasarkan formasi jabatan;
6. Rotasi pegawai dilakukan berdasarkan kompetensi jabatan dan pengembangan karier pegawai;
7. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten.

Untuk meningkatkan kinerja di tahun 2024, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat akan melakukan upaya sebagai berikut:

1. Komitmen yang kuat untuk perbaikan birokrasi di unit kerja yang belum merata;
2. Perlu peningkatan kembali atas penataan tata laksana dari hasil inovasi yang telah dibangun unit kerja yang berdampak terhadap kinerja , layanan dan integritas pegawai;
3. Membudayakan sharing vision oleh atasan kepada bawahan secara berjenjang, sehingga implementasi manajemen kinerja menjadi lebih tepat dan fokus pada pencapaian target kinerja, hal tersebut juga sebagai upaya untuk membangun budaya kinerja organisasi yang terus melakukan perbaikan berkelanjutan;
4. Mendorong implementasi kebijakan pengawasan internal, yaitu tentang pengendalian gratifikasi, Whistle Blowing System, benturan kepentingan, dan sistem pengendalian internal(SPI), meningkatkan manajemen risiko yang dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya risiko kegagalan pencapaian kinerja dan penyimpangan integritas dengan penyempurnaan peta risiko dan mitigasi risiko secara berkelanjutan.

7.2 NILAI SAKIP UNIT KERJA

Indikator kinerja nilai SAKIP diperoleh dari nilai implementasi SAKIP melalui sistem penilaian mandiri dan evaluasi dari Inspektorat BPKP atas hasil penilaian mandiri tersebut. Penilaian implementasi SAKIP ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan BPKP Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan BPKP.

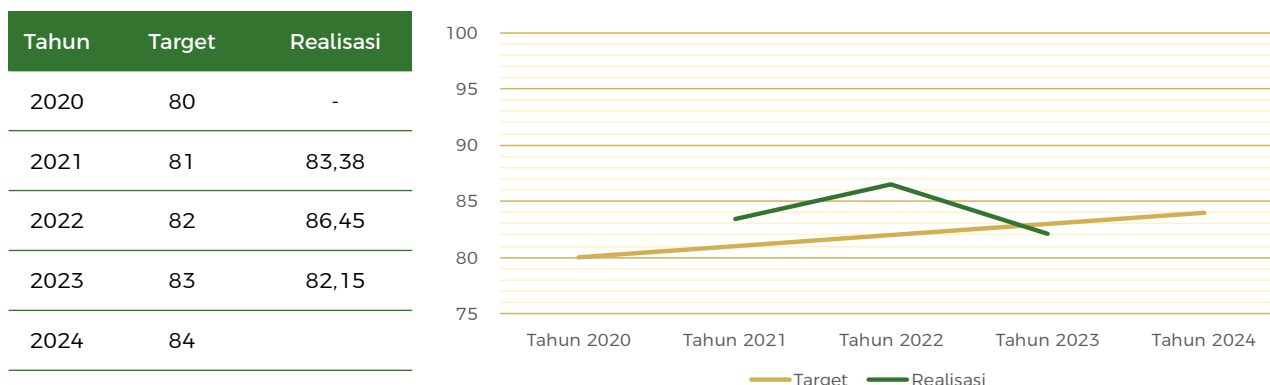
Pada tahun 2023, nilai SAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat terealisasi sebesar 82,15 atau mencapai 100,18% dari target sebesar 82. Nilai ini merupakan hasil penilaian setelah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat atas penilaian mandiri tahun 2023. Realisasi kinerja nilai SAKIP tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 telah mengalami penurunan sebesar 4,97% seperti dalam Tabel 3.36.

Tabel 3.36 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 7.2 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	+/(-)	%
Nilai SAKIP Unit Kerja	86,45	82,15	-4,3	-4,97%

Nilai SAKIP unit kerja tahun 2023 dibandingkan dengan target Renstra tahun 2020 – 2024 tercapai 98,98% terhadap target skor 83. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan target kinerja pada Perkin tahun 2023 dengan Renstra 2020 – 2024. Perkembangan capaian atas nilai SAKIP unit kerja tahun 2023 dibandingkan dengan target Renstra tahun 2020 – 2024 disajikan pada Gambar 3.21.

Gambar 3.21 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja 7.2



Capaian kinerja Nilai SAKIP unit kerja tahun 2023 didukung oleh:

1. Manajerial SDM dan anggaran yang cukup memadai;
2. Pelaksanaan penugasan didukung penggunaan aplikasi SIMA dan BISMA secara tertib;

3. Penyusunan output hasil pengawasan berupa Sintesa Hasil Pengawasan (SHP) secara tepat waktu;
4. Pengukuran dan monitoring kinerja secara berkelanjutan melalui media eSakip dan aplikasi pendukung kinerja lainnya.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2024, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat akan melakukan:

1. Meningkatkan upaya atas evaluasi program yang telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program;
2. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SIMA, e-SAKIP, BISMA, dan lain-lain;
4. Meningkatkan koordinasi antar bidang dalam upaya meningkatkan kinerja Perwakilan terutama untuk indikator kinerja yang bersifat lintas bidang

7.3 PERSENTASE EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN UNIT KERJA (SPIP UNIT KERJA)

Indikator kinerja persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Unit kerja) diukur dari jumlah pengendalian intern yang berhasil menurunkan risiko ke bawah selera risiko dibandingkan dengan jumlah seluruh pengendalian intern yang ada.

Pada tahun 2023, efektivitas pengendalian intern (SPIP Unit kerja) terealisasi sebesar 90% atau mencapai 128.57% dari target sebesar 70%.

Realisasi kinerja persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Unit kerja) tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 telah mengalami penurunan sebesar 10% seperti dalam Tabel 3.37.

Tabel 3.37 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 7.3 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	+ / (-)	%
Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)	100,00	90,00	-10,00	-10,00%

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan dalam Perkin tahun 2021 dan belum termuat dalam Renstra tahun 2020 – 2024 sehingga realisasinya tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 maupun target Renstra Tahun 2020 – 2024.

Pencapaian persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP) Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dilakukan dengan berbagai upaya penting antara lain:

1. Melakukan monitoring atas setiap pengendalian yang dibangun;

2. Mendokumentasikan setiap langkah pengendalian yang telah dilaksanakan sebagai dasar penilaian SPIP;
3. Meningkatkan kompetensi pegawai terkait Manajemen Risiko (MR).

Untuk meningkatkan kinerja di tahun 2024, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat akan melakukan:

1. Menggali lebih dalam melalui FGD untuk menciptakan pengendalian yang lebih handal dalam rangka meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan.
2. Meningkatkan kesadaran seluruh komponen organisasi akan pentingnya SPIP dalam mencapai tujuan organisasi sehingga tercipta sinergi yang baik antar komponen organisasi.

7.4 PERSENTASE PENYELESAIAN RTP (MRI UNIT KERJA)

Indikator kinerja persentase penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja) diukur dari persentase jumlah pelaksanaan tindak pengendalian dibandingkan dengan seluruh tindak pengendalian yang direncanakan (RTP) untuk mengendalikan risiko yang berada di atas selera risiko pada tahun 2023.

Pada tahun 2023, penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja) terealisasi sebesar 100% atau mencapai 100% dari target sebesar 100%. Pada tahun 2023 Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat telah mengidentifikasi risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak 31 risiko. Atas risiko-risiko tersebut selanjutnya disusun sebanyak 57 Rencana Tindak Pengendalian (RTP) untuk mengurangi kejadian/dampak risiko. Dan keseluruhan RTP tersebut telah dilaksanakan pada tahun 2023.

Realisasi kinerja persentase penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja) tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 adalah tetap seperti dalam Tabel 3.38.

Tabel 3.38 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 7.4 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	+ / (-)	%
Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	100,00	100,00	-	0% (tetap)

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan dalam Perkin tahun 2021 dan belum termuat dalam Renstra tahun 2020 – 2024 sehingga realisasinya tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 maupun target Renstra Tahun 2020 – 2024.

Pencapaian persentase penyelesaian RTP (MRI) Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dilakukan dengan berbagai upaya yaitu:

1. Melibatkan semua bidang/bagian dalam melakukan identifikasi risiko sehingga seluruh risiko di Perwakilan teridentifikasi dengan baik;

2. Melakukan koordinasi intensif dengan para pengelola kegiatan RTP dari setiap bidang/bagian sehingga jelas apa tanggung jawab masing-masing bidang/bagian tersebut;
3. RTP ditentukan dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya;
4. Melakukan monitoring pelaksanaan RTP dan memastikan pelaksanaannya sesuai rencana;
5. Penggunaan aplikasi RMIS untuk memudahkan monitoring implementasi MR.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2024, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat akan melakukan:

1. Meningkatkan kompetensi pegawai terkait MR dalam bentuk pengusulan diklat terkait MR, Program Pelatihan Mandiri (PPM), maupun sosialisasi kebijakan terkini;
2. Menggali dan mengidentifikasi lebih dalam lagi risiko-risiko yang mungkin timbul dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat;
3. Melakukan FGD dengan semua bidang/bagian untuk mendapatkan masukan terbaik dalam memitigasi risiko-risiko yang teridentifikasi;
4. Mencatat dan melaporkan setiap kejadian risiko dan melihat trendnya untuk memprediksi kemungkinan keterjadian dan dampaknya di masa depan.

7.5 INDEKS KUALITAS LAYANAN EKSTERNAL UNIT KERJA

Indikator kinerja indeks kualitas layanan eksternal unit kerja diukur dengan perolehan indeks kualitas layanan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat atas hasil survey responden sebagai penerima layanan. Pada tahun 2023, indeks kualitas layanan eksternal unit kerja sebesar 84,35 atau mencapai 112,47% dari target sebesar 75.

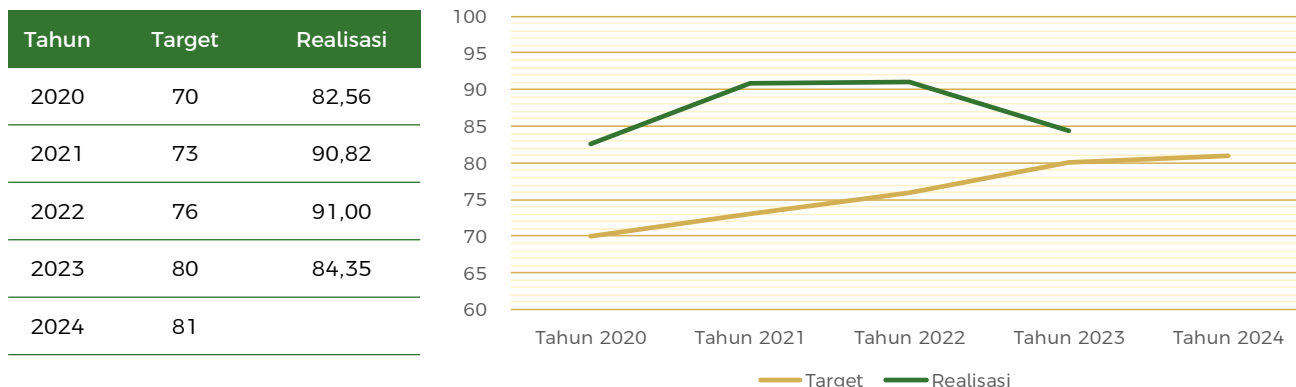
Realisasi kinerja indeks kualitas layanan eksternal unit kerja tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 telah mengalami penurunan sebesar 7,31% seperti dalam Tabel 3.39.

Tabel 3.39 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 7.5 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	+ / (-)	%
Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	91,00	84,35	-6,65	-7.31%

Indeks kualitas layanan eksternal unit kerja tahun 2023 dibandingkan dengan target Renstra tahun 2020 – 2024 tercapai 105,43% terhadap target nilai 80. Perkembangan capaian atas indeks kualitas layanan eksternal unit kerja tahun 2023 dibandingkan dengan target Renstra tahun 2020 – 2024 disajikan pada Gambar 3.22.

Gambar 3.22 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja 7.5



Pencapaian indeks kualitas layanan eksternal Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dilakukan dengan berbagai upaya penting antara lain:

1. Memastikan setiap penugasan dan pelayanan sesuai standard dan SOP yang telah ditetapkan serta melaksanakan penjaminan kualitas (reviu berjenjang) atas setiap penugasan;
2. Melakukan kerja sama dengan mitra kerja seperti Kejaksaan dan Kepolisian dalam menuntaskan kasus yang menimbulkan potensi kerugian negara/ daerah;
3. Membantu mitra kerja dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Untuk meningkatkan kinerja di tahun 2024, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat akan melakukan:

1. Terus menjaga integritas pegawai dalam setiap penugasan dan pelayanan kepada mitra kerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat;
2. Meningkatkan kompetensi dan kemampuan pegawai untuk menunjang pelayanan kepada mitra kerja, antara lain berupa diklat dan PPM.
3. Meningkatkan Respon admin untuk penanganan pengaduan (SP4AN L4POR!) dan diberikan tambahan nomor PIC admin Perwakilan (HUMAS).
4. Fasilitasi pegawai untuk melaksanakan/mengikuti sosialisasi pedoman maupun mengadakan PPM di kantor.

7.6 SKOR IKPA UNIT KERJA

Indikator kinerja skor IKPA diukur dengan perolehan skor Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Pada tahun 2023, skor IKPA Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat sebesar 91,56 atau mencapai 96,4% dari target sebesar 95. Skor IKPA tersebut dihasilkan dan diukur oleh Kementerian Keuangan berdasarkan data OM-SPAN melalui aplikasi spanint.kemenkeu.go.id.

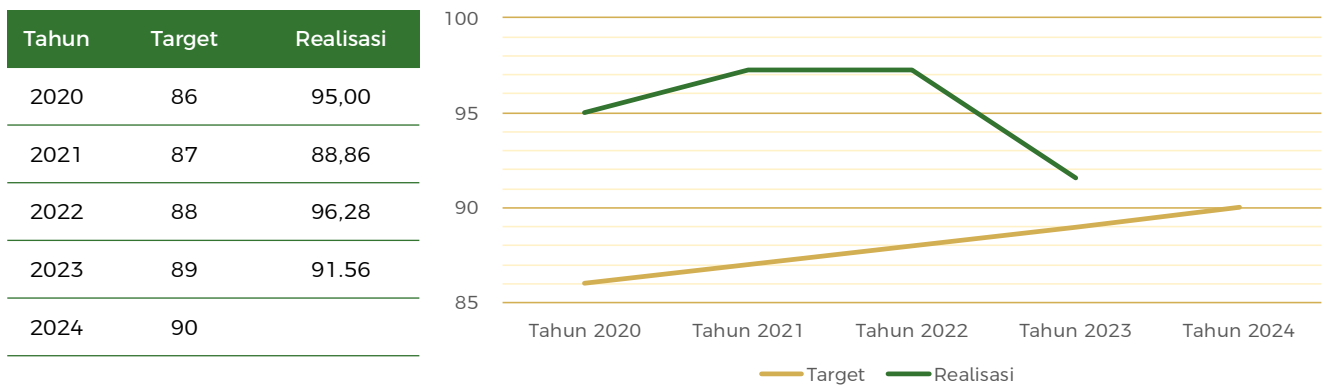
Realisasi kinerja skor IKPA tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 telah mengalami penurunan sebesar 5,86% seperti dalam Tabel 3.40.

Tabel 3.40 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 7.6 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	+/(-)	%
Skor IKPA Unit Kerja	97,26	91,56	-5,70	-5.86%

Skor IKPA tahun 2023 dibandingkan dengan target Renstra tahun 2020 – 2024 tercapai 102,87% terhadap target nilai 89. Perkembangan capaian atas Skor IKPA tahun 2023 dibandingkan dengan target Renstra tahun 2020 – 2024 disajikan pada Gambar 3.23.

Gambar 3.23 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja 7.6



Perbedaan capaian realisasi kinerja terhadap target Perkin tahun 2023 dengan target pada Renstra 2020-2024 dikarenakan adanya revisi Perkin di tahun berjalan yang tidak diikuti dengan revisi target pada Renstra 2020-2024.

Penyebab realisasi kinerja skor IKPA tidak mencapai target antara lain:

1. Terjadi perlambatan laju penyerapan setiap awal triwulan;
2. Penugasan cenderung pasif di awal bulan menyebabkan laju serapan menjadi merosot;
3. Tarik ulur eksekusi belanja modal dan pegawai.

Upaya penguatan dukungan keuangan di tahun 2024, antara lain:

1. Fleksibilitas namun tetap akuntabel;
2. Cepat, tepat dan akurat dalam proses pertanggungjawaban;

3. Partner sharing antara bagian keuangan dengan bidang-bidang lain dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan;
4. Karena anggaran semakin besar, bidang dan bagian keuangan harus bersinergi menciptakan rencana yang optimis dan realistis.

7.7 NILAI PENGELOLAAN BMN UNIT KERJA

Indikator kinerja nilai pengelolaan BMN diukur dengan perolehan pengelolaan BMN Baik sesuai ketentuan. Pada tahun 2023, nilai pengelolaan BMN Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat terealisasi sebesar 97,6% atau mencapai 122% dari target sebesar 80.

Realisasi kinerja nilai pengelolaan BMN tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 telah mengalami kenaikan sebesar 5,26% seperti dalam Tabel 3.41.

Tabel 3.41 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 7.7 dengan Tahun 2021

Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2022	+ / (-)	%
Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	92,72	97.60	4,88	5,26%

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan dalam Perkin tahun 2021 dan belum termuat dalam Renstra tahun 2020 – 2024 sehingga realisasinya tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 maupun target Renstra Tahun 2020 – 2024.

Pencapaian persentase penyelesaian RTP (MRI) Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dilakukan dengan berbagai upaya penting antara lain:

1. Pelabelan pada BMN hasil pengadaan tahun 2023;
2. Perawatan secara berkala terhadap BMN seperti AC, kendaraan dinas, gedung kantor, printer dan BMN lain yang rentan kerusakan;
3. Pembaruan data BMN pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) secara rutin;
4. Pelaporan pada aplikasi SIMAK BMN dilaksanakan tepat waktu;
5. BMN dengan kondisi rusak berat dan tidak dapat dimanfaatkan dalam operasional kantor telah dilakukan proses penghapusan dan telah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Utama BPKP sesuai Keputusan Kepala BPKP Nomor PL.07/KEP-840/K.SU/05/2022 tanggal 21 Oktober 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat.

Untuk meningkatkan kinerja di tahun 2024, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat akan melakukan:

1. Mengusulkan proses penghapusan terhadap BMN yang rusak berat dan tidak efisien dan tidak efektif lagi digunakan dalam operasional kantor;

2. Inventarisasi fisik terhadap BMN secara berkala;
3. Melakukan perawatan secara berkala terhadap BMN.
4. Evaluasi dan meningkatkan komponen yang belum terisi pada IKK pengelolaan BMN sehingga mendapatkan nilai maksimal.

Risiko pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja

Capaian kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja sebesar 109,67% dapat diraih dengan mengelola risiko yang teridentifikasi mengekspos sasaran kegiatan ini. *Residual risk* tertinggi yang yang dikelola adalah:

1. Aplikasi tidak dapat digunakan;
2. Hasil penilaian mandiri (self assessment) tidak menyajikan informasi yang akurat;
3. Penyusunan perjanjian kinerja tidak tepat waktu.

C. CAPAIAN KINERJA OUTPUT

Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat telah menetapkan target output pada RKA tahun 2023 yang dikelompokkan ke dalam 2 (dua) program utama sebagaimana terinci pada Tabel 3.42.

Tabel 3.42 Target Output RKA Tahun 2023

Rincian Output	Kinerja Output	
	Satuan	Target
Program Pengawasan Pembangunan		
3701.UAG.U21 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Sumber Daya Manusia	SHP	9
3701.UAG.U22 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Infrastruktur dan Konektivitas	SHP	7
3701.FAG.U11 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah dan Desa	SHP	6
3701.FAG.028 Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	SHP	24
3701.UAG.U23 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Ekonomi	SHP	5
3701.UAG.U27 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Daerah	SHP	3
3701.UAG.U52 Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	SHP	13
3701.UAG.U53 Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	SHP	4
3701.FAG.U31 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD	SHP	2
3701.UAG.U41 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Kecurangan	SHP	2
Program Dukungan Manajemen		
3676.EBA.962 Layanan Umum	Layanan	1
3676.EBA.994 Layanan Perkantoran	Layanan	1
3676.EBB.951 Layanan Sarana Internal	Unit	920
3676.EBB.971 Layanan Prasarana Internal	Unit	5
3701.FAG.711 Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	SHP	2
Jumlah Target Output		987

Realisasi output tahun 2023 mencapai 1.029 SHP/Layanan/Unit atau 104,26% dari target 987 SHP/Layanan/Unit dengan rincian terdapat pada Tabel 3.43.

Tabel 3.43 Realisasi Output Tahun 2023

Rincian Output	Kinerja Output			
	Satuan	Target	Realisasi	%
Program Pengawasan Pembangunan				
3701.UAG.U21 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Sumber Daya Manusia	SHP	9	12	133,33%
3701.UAG.U22 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Infrastruktur dan Konektivitas	SHP	7	18	257,14%
3701.FAG.U11 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah dan Desa	SHP	6	11	183,33%
3701.FAG.028 Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	SHP	24	32	133,33%
3701.UAG.U23 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Ekonomi	SHP	5	9	180,00%
3701.UAG.U27 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Daerah	SHP	3	3	100,00%
3701.UAG.U52 Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	SHP	13	13	100,00%
3701.UAG.U53 Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	SHP	4	4	100,00%
3701.FAG.U31 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD	SHP	2	2	100,00%
3701.UAG.U41 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Kecurangan	SHP	2	3	150,00%
Program Dukungan Manajemen				
3676.EBA.962 Layanan Umum	Layanan	1	1	100,00%
3676.EBA.994 Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	100,00%
3676.EBB.951 Layanan Sarana Internal	Unit	920	927	100,76%
3676.EBB.971 Layanan Prasarana Internal	Unit	5	6	120,00%
3701.FAG.711 Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	SHP	2	4	200,00%
Jumlah Target Output		987	1.029	104,26%

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat pada tahun 2023 adalah sebesar Rp66.512.262.649,00 atau terserap 99,58% dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp66.795.363.000,00. Rincian penggunaan anggaran per jenis belanja disajikan pada Tabel 3.44. Rincian penggunaan anggaran per kegiatan disajikan pada Tabel 3.45.

Tabel 3.44 Anggaran dan Realisasi Keuangan Menurut Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Belanja Pegawai	13.413.684.000,00	3.326.397.503,00	99,35
2	Belanja Barang	7.893.817.000,00	7.792.323.440,00	98,71
3	Belanja Modal	45.487.862.000,00	45.393.541.706,00	99,79
Jumlah		66.795.363.000,00	66.512.262.649,00	99,58

Tabel 3.45 Anggaran dan Realisasi Keuangan Menurut Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
I. Program Dukungan Manajemen				
1	Layanan Perkantoran	16.479.310.000,00	16.351.949.171,00	99,23
2	Layanan Umum	751.930.000,00	744.785.385,00	99,05
3	Layanan Sarana Internal	4.082.069.000,00	4.082.064.460,00	100,00
4	Layanan Prasarana Internal	41.405.793.000,00	41.311.477.246,00	99,77
Jumlah Program		62.719.102.000,00	62.490.276.262,00	99,64
II. Program Pengawasan				
1	Pengawasan Pembangunan Negara/Daerah	4.076.261.000,00	4.021.986.387,00	98,67
Jumlah Program		4.076.261.000,00	4.021.986.387,00	98,67
Jumlah Total		66.795.363.000,00	66.512.262.649,00	99,58

E. ANALISIS EFISIENSI

Secara umum, proses kegiatan operasional BPKP telah dilaksanakan secara efisien ditinjau dari penggunaan dana dan SDM. Efisiensi capaian outcome dihitung berdasarkan perbandingan capaian outcome dengan capaian input dana dan SDM. Dan efisiensi capaian output dihitung berdasarkan perbandingan capaian output dengan capaian input dana dan SDM.

Efisiensi berhubungan erat dengan produktivitas. Kegiatan operasional disebut efisien bila:

1. Suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan menggunakan input serendah-rendahnya (*spending well*);
2. Adanya penurunan atau penghapusan biaya yang tidak perlu (*cost reduction*).

Analisis efisiensi dilakukan per sasaran kegiatan. Penyimpulan efisiensi adalah sebagai berikut:

1. Efisien jika rasio efisiensi sama atau lebih besar dari 100%;
2. Belum efisien jika rasio efisiensi lebih kecil dari 100%.

Berdasarkan capaian kinerja outcome, rata-rata capaian efisiensi kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat tahun 2023 adalah sebesar 93,78% untuk penggunaan dana dan 93,49% untuk penggunaan SDM atau dengan kata lain masih belum efisien. Rincian hasil penghitungan efisiensi berdasarkan capaian kinerja outcome tahun 2023 disajikan pada Tabel 3.46.

Tabel 3.46 Hasil Penghitungan Efisiensi Berdasarkan Capaian Kinerja Outcome Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Capaian Input (%)		Capaian Outcome (%)	Efisiensi	
		Dana	SDM		Dana	SDM
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	98,61%	98,38%	114,47%	116,09%	116,36%
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	99,31%	100,00%	108,82%	109,58%	108,82%
3	Meningkatnya Kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP	98,57%	96,76%	113,44%	115,08%	117,24%
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	96,89%	100,00%	66,67%	68,81%	66,67%
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	99,04%	99,38%	79,41%	80,18%	79,91%
6	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	98,57%	99,55%	88,30%	89,57%	88,70%
7	Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja	99,64%	99,94%	109,67%	110,07%	109,74%
Rata-rata		98,66%	99,14%	97,25%	98,48%	98,20%

Berdasarkan capaian kinerja output, rata-rata capaian efisiensi Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat tahun 2023 adalah sebesar 128,74% untuk penggunaan dana dan 128,17% untuk penggunaan SDM atau dengan kata lain sudah efisien. Rincian hasil penghitungan efisiensi berdasarkan capaian kinerja output tahun 2023 disajikan pada Tabel 3.47.

Tabel 3.47 Hasil Penghitungan Efisiensi Berdasarkan Capaian Kinerja Output Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Capaian Input (%)		Capaian Output (%)	Efisiensi	
		Dana	SDM		Dana	SDM
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	98,61%	98,38%	158,70%	160,93%	161,32%
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	99,31%	100,00%	180,00%	181,25%	180,00%
3	Meningkatnya Kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP	98,57%	96,76%	100,00%	101,45%	103,35%
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	96,89%	100,00%	100,00%	103,21%	100,00%
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	99,04%	99,38%	150,00%	151,45%	150,93%
6	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	98,57%	99,55%	100,00%	101,45%	100,46%
7	Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja	99,64%	99,94%	101,08%	101,45%	101,14%
Rata-rata		98,66%	99,14%	127,11%	128,74%	128,17%

F. KINERJA LAINNYA

Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat juga mendapatkan kinerja selain yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 baik dalam bentuk penghargaan maupun apresiasi antara lain:

1. Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat mendapatkan penghargaan SDM AWARDS TAHUN 2023 dengan Predikat Terbaik untuk kategori Pengelolaan Manajemen Data dan Penilaian Kinerja.
2. Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat mendapatkan penghargaan Peringkat Pertama atas pencapaian penyusunan Laporan Keuangan (LK) Terbaik per semester I tahun 2023.
3. Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat menjadi Juara 2 Lomba Microlearning tahun 2023 dalam rangka HUT BPKP Ke-40.
4. Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat menerima penghargaan sebagai Strategic Partner on Local Government Financial Advisory dari Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Provinsi Papua Barat.





Bab 4

Penutup

- A. Kesimpulan Kinerja Tahun 2023
- B. Rencana Tindak Tahun 2024



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN KINERJA TAHUN 20223

Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat di wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya. Tahun 2023 merupakan periode pelaporan keempat yang merefleksikan pelaksanaan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat 2020-2024, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Pencapaian kinerja merupakan wujud sinergi seluruh jajaran Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dalam menghadapi berbagai tantangan di tahun 2023.

Secara rata-rata, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat belum berhasil mencapai target sasaran kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023. Rata-rata capaian sasaran kegiatan pada tahun 2023 adalah sebesar 97,25%, dengan 4 (empat) sasaran kegiatan mencapai atau melebihi 100,00% dan 3 (tiga) sasaran kegiatan kurang dari 100,00%. Capaian tertinggi sebesar 114,47% terdapat pada sasaran kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah sedangkan capaian

terendah sebesar 66,67% terdapat pada sasaran kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha.

Selain capaian kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat juga menghasilkan kinerja lain dalam bentuk penghargaan-penghargaan yang diterima baik penghargaan internal maupun eksternal BPKP yaitu:

1. Penghargaan SDM AWARDS TAHUN 2023 dengan Predikat Terbaik untuk kategori Pengelolaan Manajemen Data dan Penilaian Kinerja dari Biro SDM BPKP
2. Penghargaan Peringkat Pertama atas pencapaian penyusunan Laporan Keuangan (LK) Terbaik per semester I tahun 2023 dari Biro Keuangan BPKP.
3. Juara 2 Lomba Microlearning tahun 2023 HUT BPKP Ke 40.

Penghargaan sebagai Strategic Partner on Local Government Financial Advisory dari Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Provinsi Papua Barat.

B. RENCANA TINDAK TAHUN 2024

Meskipun capaian kinerja tahun 2023 belum sesuai dengan harapan, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat telah melaksanakan berbagai strategi untuk memastikan seluruh sasaran kinerja tercapai. Ini menandakan masih terdapat hambatan atau kendala dalam upaya pencapaian kinerja yang optimal. Kendala tersebut berasal dari internal maupun eksternal Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat. Beberapa kendala yang menghambat pencapaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut:

1. Kendala internal

- a. Tingginya target Perkin tidak diimbangi dengan kuantitas dan kualitas SDM.
- b. Beberapa target IKK dalam Perkin tidak didukung dengan APP baik kegiatan assurance maupun consulting dalam PKPT.

- c. Kegiatan pengawasan belum dilakukan secara kolaboratif dan sinergi antar bidang.
- d. Kegiatan pemantauan tindak lanjut atas hasil temuan atau rekomendasi Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat belum dilaksanakan secara berkelanjutan.

2. Kendala eksternal

- a. Kurangnya komitmen dari pimpinan pemda dalam mewujudkan peningkatan Kapabilitas APIP, Maturitas SPIP, MRI, IEPK serta tata kelola BUMD maupun BLUD.
- b. Kebijakan manajemen risiko di daerah masih bersifat formalitas dan belum diimplementasikan dengan baik.

- c. Para pimpinan beserta jajaran di Pemda belum menyadari arti pentingnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- d. Data mitra/klien yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pengawasan tidak bisa terpenuhi atau tidak tersedia.
- e. Mitra/klien kurang responsif dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan BPKP.
- f. Kegiatan pembinaan tidak berjalan maksimal karena terkendala kondisi geografis dan biaya besar, sedangkan kegiatan consulting secara online terkendala jaringan komunikasi di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya yang tidak merata.
- g. Khusus untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya sebagai Daerah Otonom Baru belum berjalan secara normal, karena belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas SDM pemerintah daerah.

Hambatan-hambatan tersebut akan menjadi motivasi bagi Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat untuk menyusun strategi atau langkah-langkah strategis dalam upaya peningkatan kinerja di tahun 2024. Upaya-upaya yang akan dilaksanakan di tahun 2024 antara lain:

1. Meningkatkan kompetensi SDM melalui kegiatan PPM secara rutin atau berkala dan mengusulkan para PFA mengikuti diklat yang diselenggarakan Pusdiklatwas BPKP.
2. Melakukan mapping IKK dalam Perkin 2024 ke dalam PKPT 2024, sehingga semua target IKK dalam Perkin bisa didukung dengan kegiatan APP.
3. Mengidentifikasi ulang risiko prioritas atas konteks sasaran kegiatan yang tidak tercapai pada tahun 2023 dengan menetapkan rencana tindak pengendalian atas risiko prioritas tersebut.
4. Mengoptimalkan penugasan lintas bidang secara bersama-sama terutama terkait kegiatan pengawasan atas governance, risk, control (GRC) Pemerintah Daerah seperti SPIP, Manajemen Risiko, Efektivitas Pengendalian Korupsi, dan Kapabilitas APIP.
5. Melaksanakan kegiatan monitoring tindak lanjut atas hasil temuan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat secara berkelanjutan dan berkala baik ke pemerintah daerah, unit kerja instansi

vertical, maupun Badan usaha (BUMN/D, BLUD).

6. Pimpinan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat akan menjalin koordinasi dan komunikasi yang lebih intens dengan para Kepala Daerah dan pimpinan Instansi Vertikal di wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.
7. Meningkatkan sinergi, koordinasi, dan kolaborasi dengan mitra kerja demi terselenggaranya kegiatan pengawasan yang efektif;
8. Meningkatkan kegiatan pengawasan dan pembinaan terkait dengan kualitas pengendalian intern pemerintah daerah seperti SPIP, Manajemen Risiko dan Kapabilitas APIP.
9. Mendorong pemda menerapkan kebijakan manajemen risiko di daerah.
10. Melakukan pengawasan terhadap permasalahan dan isu-isu strategis yang dihadapi oleh mitra kerja dengan mengembangkan metode pengawasan berbasis teknologi informasi (database dan aplikasi).
11. Mendorong pemenuhan SDM APIP untuk memiliki kompetensi yang memadai.
12. Melaksanakan kegiatan pengawasan secara sinergi dan kolaborasi antara Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dan APIP sehingga dapat diwujudkan kegiatan pengawasan yang efektif.
13. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan lebih intens kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya, terutama melalui kegiatan pengawasan consulting dalam memfasilitasi penyusunan infrastruktur tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kapasitas SDM baik pengelola keuangan maupun APIP.

Selanjutnya tahun 2024 merupakan tahun terakhir periode Renstra tahun 2020-2024 dan merupakan tahun politik di Indonesia. Tanggung jawab Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat sebagai perpanjangan tangan BPKP Pusat di daerah menjadi lebih besar karena tidak hanya berfokus pada kinerja akhir yang harus dicapai tetapi juga harus mampu mengawal isu-isu strategis di wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya. Oleh karena itu, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat akan terus hadir dan memberi manfaat dalam mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan Indonesia khususnya di wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya.





Kilas Peristiwa 2023



KILAS PERISTIWA 2023

JAN



Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagai Pejabat Fungsional Auditor Madya

FEB



Senam Jumat Sehat dan Sharing Session dengan tema Mancing Itu Asik di Komplek Kantor Perkantoran Arfai Manokwari

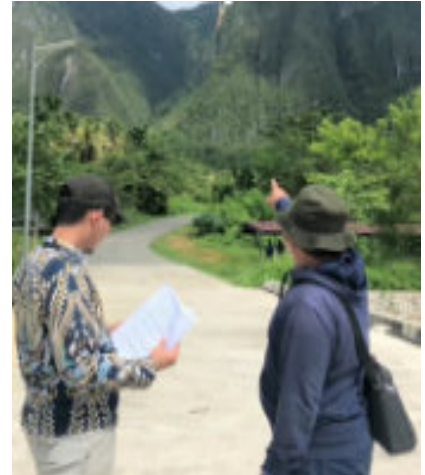


Vaksinasi Covid-19 Dosis ke-4 atau Booster ke-2 bagi seluruh pegawai di Lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat



Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara BPKP dengan empat daerah otonomi baru di Papua, yaitu Provinsi Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan

MAR



Evaluasi atas Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata Bahari di Kaimana Provinsi Papua Barat,



Pembahasan akhir (exit meeting) Hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Provinsi Papua Barat Tahun 2023, di Ruang Rapat Kantor Gubernur Papua Barat

APR

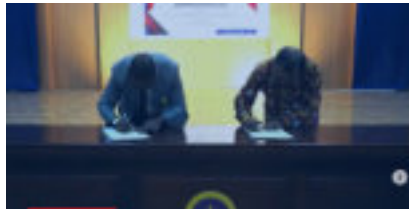


Penyambutan kehadiran CPNS baru pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat

MEI



HUT BPKP ke-40



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penguatan Tata Kelola Perguruan Tinggi antara Universitas Papua (UNIPA) dan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat di Aula Pasca Sarjana Kampus Universitas Papua

JUN



Sosialisasi Hasil Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern (Rakornas Wasin) Tahun 2023 dan Internalisasi Peraturan BPKP Nomor 2 tahun 2023 tentang Manajemen Penugasan Pengawasan di Lingkungan BPKP serta Indeks Kesehatan Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2022



Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat menyelenggarakan Workshop Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tingkat Regional Se-Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2023 di Sorong





JUL



Bedah Sintesis Hasil Pengawasan (SHP) oleh Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat

AGS



Penyerahan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Semester I Tahun 2023 kepada Pj. Gubernur Provinsi Papua Barat, Paulus Waterpauw



Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Bersama BPK RI Provinsi Papua Barat, DJP Papua Barat, dan Bea Cukai Manokwari mengadakan kegiatan olahraga bersama di Gedung Keuangan Negara (GKN) Manokwari.



Perpisahan dengan Kepala Perwakilan, Zainuri, Ak

SEP



Koordinasi dengan Pj. Gubernur Provinsi Papua Barat, Paulus Waterpauw terkait peningkatan tata Kelola pemerintahan di Provinsi Papua Barat



Koordinasi dengan Pj. Gubernur Provinsi Papua Barat Daya (PBD) Muhammad Musa'ad terkait pengawalan penyelenggaraan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya

OKT



Ekspos panel hasil evaluasi jenjang pertama atas hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP pada tiga Inspektorat Daerah yaitu Inspektorat Kabupaten Raja Ampat, Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan dan Inspektorat Kota Sorong di Aula Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat



Sharing Session dengan tema "Mental Health Awareness di Lingkungan Kerja" Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat

NOV



Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa/Kampung Tingkat Kabupaten pada Kabupaten Manokwari yang bertempat di Aula Sasana Karya Kantor Bupati Manokwari

DES



Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat menerima penghargaan sebagai Strategic Partner on Local Government Financial Advisory dari Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Provinsi Papua Barat



Rapat Kerja (Raker) Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat



Focus Group Discussion (FGD) atas Hasil Audit Tujuan Tertentu (ATT) atas Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara Tahun 2023 di Wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya





Lampiran



TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN SASARAN KEGIATAN TAHUN 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2023		Keuangan		SDM (OH)					
				Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	%		
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1.1 Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	4.360.24	5.007,83	114,85%	2.339.459.000	2.306.949.807	15.889	15.631	98,61%	98,38%	
		1.2 Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rupiah (Juta)	23.468.38	29.659,33	126,38%							
		1.3 Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (Juta)	56.570.05	61.945,76	109,50%							
Rata-rata kinerja Sasaran Kegiatan 1				84.398,67	96.612,92	114,47%	2.339.459.000	2.306.949.807	15.889	15.631	98,61%	98,38%	
2	Meningkatnya Pelaksanaan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	2.1 Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan	(%) Persen	85,00	100,00	117,65%	133.488.000	132.564.099	1.252	1.252	99,31%	100,00%	
		2.2 Jumlah kegiatan pembangunan prioritas daerah yang diawasi	Kegiatan Prioritas Daerah	2	2	100,00%							
Rata-rata kinerja Sasaran Kegiatan 2				80	90,75	113,44%	133.488.000	132.564.099	1.252	1.252	99,31%	100,00%	
3	Meningkatnya Kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP	3.1 Persentasi rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti	(%) Persen	80	90,75	113,44%	359.369.000	354.231.441	1.017	984	98,57%	96,76%	
		Rata-rata kinerja Sasaran Kegiatan 3	80	90,75	113,44%	359.369.000							354.231.441
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	4.1 Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	1	0	0,00%	24.720.000	23.951.000	215	215	96,89%	100,00%	
		4.2 Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	1	1	100,00%							
		4.3 Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	10	10	100,00%							
Rata-rata kinerja Sasaran Kegiatan 4				100,00	100,00	100,00%	24.720.000	23.951.000	215	215	96,89%	100,00%	
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	5.1 Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	(%) Persen	100,00	100,00	100,00%	126,67%	125.489.300	125.489.300	1.295	1.287	99,04%	199,38%
		5.2 Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	(%) Persen	85,00	100,00	117,65%							
		5.3 Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik	Pemda	3	3	100,00%							
		5.4 Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Pemda	1	0	0,00%							
Rata-rata kinerja Sasaran Kegiatan 4				66,67%	125.489.300	125.489.300	1.295	1.287	99,04%	199,38%			

6	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	6.1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Provinsi	1	1	100,00%	961.698.000	947.984.084	98,57%	6.398	6.369	99,55%	
		6.2	Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Kab/Kota	8	4	50,00%							
		6.3	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Provinsi	1	1	100,00%							
		6.4	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Kabupaten/Kota	6	1	16,67%							
		6.5	Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3	Kabupaten/Kota	3	0	0,00%							
		6.6	Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Pemda	3	0	0,00%							
		6.7	Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	25	102	408,00%							
		6.8	Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	25	30	120,00%							
		6.9	Jumlah BLU/D dengan MRI \geq Level 3	BLU/D	1	0	0,00%							
Rata-rata kinerja Sasaran Kegiatan 6								88,30%	961.698.000	947.984.084	98,57%	6.398	6.369	99,55%
7	Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja	7.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75,00	81,07	108,09%	62.849.925.000	62.621.092.918	99,64%	5.026	5.023	99,94%	
		7.2	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82,00	82,15	100,18%							
		7.3	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)	(%) Persen	70,00	90,00	128,57%							
		7.4	Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	(%) Persen	100,00	100,00	100,00%							
		7.5	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	75,00	84,35	112,47%							
		7.6	Skor IKPA Unit Kerja	Indeks Skala 100	95,00	91,56	96,38%							
		7.7	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala 100	80,00	97,60	122,00%							
		Rata-rata kinerja Sasaran Kegiatan 7												109,67%
Rata-rata kinerja Perwakilan								97,25%	66.795.363.000	66.512.262.649	99,58%	31.092	30.761	98,94%

PERBANDINGAN REALISASI SASARAN KEGIATAN TAHUN 2023 DENGAN REALISASI TAHUN 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian		
				Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	9	10=8-9
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/ Daerah	1.1 Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi 1.2 Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah 1.3 Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (Juta) Rupiah (Juta) Rupiah (Juta)	5.007,83 29.659,33 23.197,18	8.413,30 352.646,22 366,59	-3.405,47 -322.986,89 22.830,59	114,85% 126,38% 579,93%	184,46% 105,01% 3,09%	10=8-9 -69,61% 21% 0,53%
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	2.1 Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan 2.2 Jumlah kegiatan pembangunan prioritas daerah yang diawasi	(%) Persen Kegiatan Prioritas Daerah	100,00 2	100 2	- -	117,65% 100,00%	117,65% 100,00%	0% 0%
3	Meningkatnya Kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/ D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP	3.1 Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti	(%) Persen	90,75	83,11	7,64	113,44%	103,89%	9,55%
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	4.1 Jumlah BUMD dengan kinerja sehat 4.2 Jumlah BLUD dengan kinerja sehat 4.3 Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMD BLUD BUMDes	1 1 9	1 - 9	- 1 -	100,00% 100,00% 180,00%	100,00% - 900,00%	100,00% 100,00% 500,00%
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	5.1 Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti 5.2 Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti 5.3 Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik 5.4 Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	(%) Persen (%) Persen Pemda Pemda	100,00 100,00 3 0	100 100 1 -	- - 2 N/A	100,00% 117,65% 100,00% 0,00%	100,00% 125,00% 50,00% -	0% -7% 50% N/A

6	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	6.1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP >= Level 3	1	1	-	100,00%	100,00%	0%	1	100,00%
		6.2	Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP >= Level 3	4	2	2	50,00%	100,00%	-50%	8	25,00%
		6.3	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP >= Level 3	1	0	1	100,00%	0,00%	100%	6	16,67%
		6.4	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP >= Level 3	1	1	-	16,67%	50,00%	-33%	4	25,00%
		6.5	Jumlah Kab/Kota dengan MRI >= Level 3	0	1	-1	0,00%	50,00%	-50%	-	-
		6.6	Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	0	-	N/A	0,00%	-	N/A	104	-
		6.7	Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	102	22	80	408,00%	110,00%	298%	-	-
		6.8	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	30	22	8	120,00%	110,00%	10%	-	21,15%
		6.9	Jumlah BLU/D dengan MRI >= Level 3	0	0	-	0,00%	0,00%	0%	3	0,00%
7	Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja	7.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	81,07	90,60	-9,53	108,09%	120,80%	-13%	79	114,68%
		7.2	Nilai SAKIP Unit Kerja	82,15	86,45	-4,30	100,18%	105,43%	-5%	84	102,92%
		7.3	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)	90,00	100,00	-10,00	128,57%	142,86%	-14%	-	-
		7.4	Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	100,00	100,00	-	100,00%	100,00%	0%	-	-
		7.5	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	84,35	91,00	-6,65	112,47%	121,33%	-9%	81	112,35%
		7.6	Skor IKPA Unit Kerja	91,56	97,26	-5,70	96,38%	102,38%	-6%	90	108,07%
		7.7	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	97,60	92,72	4,88	122,00%	115,90%	6%	Baik	-

TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN (IOK) TAHUN 2023

No	Sasaran Kegiatan	Rata-rata Capaian Sasaran Kegiatan	Rincian Output	Kinerja Output			
				Satuan	Target	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	114,47%	3701.UAG.U21 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Sumber Daya Manusia	SHP	9	12	133,33%
			3701.UAG.U22 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Infrastruktur dan Konektivitas	SHP	7	18	257,14%
			3701.FAG.U11 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah dan Desa	SHP	6	11	183,33%
			3701.FAG.028 Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/ Daerah	SHP	24	32	133,33%
Rata-rata Sasaran Kegiatan 1					46	73	158,70%
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	108,82%	3701.UAG.U23 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Ekonomi	SHP	5	9	180,00%
Rata-rata Sasaran Kegiatan 2					5	9	180,00%
3	Meningkatnya Kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP	113,44%	3701.UAG.U27 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Daerah	SHP	3	3	100,00%
Rata-rata Sasaran Kegiatan 3					3	3	100,00%
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	66,67%	3701.FAG.U31 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD	SHP	2	2	100,00%
Rata-rata Sasaran Kegiatan 4					2	2	100,00%
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	79,41%	3701.UAG.U41 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Kecurangan	SHP	2	3	150,00%
Rata-rata Sasaran Kegiatan 5					2	3	150,00%
6	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	88,30%	3701.UAG.U52 Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	SHP	13	13	100,00%
			3701.UAG.U53 Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	SHP	4	4	100,00%
Rata-rata Sasaran Kegiatan 5					2	3	150,00%
JUMLAH SASARAN KEGIATAN PENGAWASAN					75	107	142,67%
7	Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja	109,67%	3676.EBA.962 Layanan Umum	Layanan	1	1	100,00%
			3676.EBA.994 Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	100,00%
			3676.EBB.951 Layanan Sarana Internal	Unit	920	927	100,76%
			3676.EBB.971 Layanan Prasarana Internal	Unit	5	6	120,00%
			3701.FAG.711 Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	SHP	2	4	200,00%
JUMLAH SASARAN KEGIATAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA					929	939	101,08%
TOTAL					1.004	1.046	104,18%

Pagu (Rp)	Anggaran		Target (OH)	SDM		Efisiensi Dana	Efisiensi SDM
	Realisasi (Rp)	%		Realisasi (OH)	%		
9	10	11	12	13	14	15	16
355.968.000	354.060.957	99,46%	2.022	1.878	92,88%	Efisien	Efisien
261.603.000	258.462.818	98,80%	2.388	2.385	99,87%	Efisien	Efisien
504.350.000	496.167.718	98,38%	5.830	5.846	100,27%	Efisien	Efisien
1.217.538.000	1.198.258.314	98,42%	5.649	5.522	97,75%	Efisien	Efisien
2.339.459.000	2.306.949.807	98,61%	15.889	15.631	98,38%	Efisien	Efisien
133.488.000	132.564.099	99,31%	1.252	1.252	100,00%	Efisien	Efisien
133.488.000	132.564.099	99,31%	1.252	1.252	100,00%	Efisien	Efisien
359.369.000	354.231.441	98,57%	1.017	984	96,76%	Efisien	Efisien
359.369.000	354.231.441	98,57%	1.017	984	96,76%	Efisien	Efisien
24.720.000	23.951.000	96,89%	215	215	100,00%	Efisien	Efisien
24.720.000	23.951.000	96,89%	215	215	100,00%	Efisien	Efisien
126.704.000	125.489.300	99,04%	1.295	1.287	99,38%	Efisien	Efisien
126.704.000	125.489.300	99,04%	1.295	1.287	99,38%	Efisien	Efisien
850.458.000	843.270.734	99,15%	6.183	6.171	99,81%	Efisien	Efisien
111.240.000	104.713.350	94,13%	215	198	92,09%	Efisien	Efisien
961.698.000	947.984.084	98,57%	6.398	6.369	99,55%	Efisien	Efisien
3.945.438.000	3.891.169.731	98,62%	26.066	25.738	98,74%	Efisien	Efisien
751.930.000	744.785.385	99,05%	3.318	3.318	100,00%	Efisien	Efisien
16.479.310.000	16.351.949.171	99,23%				Efisien	
4.082.069.000	4.082.064.460	100,00%				Efisien	
41.405.793.000	41.311.477.246	99,77%				Efisien	
130.823.000	130.816.656	100,00%	1.708	1.705	99,82%	Efisien	Efisien
62.849.925.000	62.621.092.918	99,64%	5.026	5.023	99,94%	Efisien	Efisien
66.795.363.000	66.512.262.649	99,58%	31.092	30.761	98,94%	Efisien	Efisien

PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN TAHUN 2023 DAN 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Output Kegiatan (IOK)	Satuan		Realisasi 2022		Naik / (Turun)		Capaian (%)		Naik / (Turun)
			4	5	6	7=5-6	8	9	10=8-9		
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/ Daerah	3701.UAG.U21 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Sumber Daya Manusia	SHP	12	6	7=5-6	8	9	133,33%	10=8-9	
		3701.UAG.U22 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Infrastruktur dan Konektivitas	SHP	18	6	7=5-6	8	9	257,14%	10=8-9	
		3701.FAG.U11 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah dan Desa	SHP	11	6	7=5-6	8	9	183,33%	10=8-9	
		3701.FAG.028 Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	SHP	32	6	7=5-6	8	9	133,33%	10=8-9	
		Sub Jumlah Output Saskeg 1		73	11	62	158,70%	122,22%	36,48%		
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	3701.UAG.U23 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Ekonomi	SHP	9	63	63	180,00%				
		Sub Jumlah Output Saskeg 2		9	72	(63)	180,00%	126,32%	53,68%		
3	Meningkatnya Kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP	3701.UAG.U27 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Daerah	SHP	3	3	3	100,00%				
		Sub Jumlah Output Saskeg 3		3	-	N/A	100,00%	-	N/A		

4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	3701.FAG.U31 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD	SHP	2		100,00%	
		Sub Jumlah Output Saskeg 4		2	2	100,00%	200%
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	3701.UAG.U41 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Kecurangan	SHP	3		150,00%	
		Sub Jumlah Output Saskeg 5		3	1	150,00%	100%
6	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	3701.UAG.U52 Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah 3701.UAG.U53 Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	SHP	13		100,00%	
		Sub Jumlah Output Saskeg 6		17	5	100,00%	125%
7	Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja	3676.EBA.962 Layanan Umum 3676.EBA.994 Layanan Perkantoran 3676.EBB.951 Layanan Sarana Internal 3676.EBB.971 Layanan Prasarana Internal 3701.FAG.711 Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	Layanan Layanan Unit Unit SHP	1 1 927 6 4	1 1 23 - 1	100,00% 100,00% 100,76% 120,00% 200,00%	- - 0 N/A 100,00%
		Sub Jumlah Output Saskeg 7		939	26	101,08%	100%
		Jumlah seluruh output		1.046	117	104,18%	119,39%
							-15,21%

TINGKAT MATURITAS SPIP, KAPABILITAS APIP, MRI DAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI APIP




No	Nama Pemda	SPIP				APIP	
		Skor	Level	Predikat	Metode/Dasar Penetapan/ Penilaian	Skor	Level
1	Provinsi Papua Barat	3,0680	3	Terdefinisi	PM/PK dan BA Ekspose Panel Kedeputian	3,0000	3
2	Kabupaten Sorong	2,6780	2	Berkembang	Evaluasi PM/PK	3,0000	3
3	Kabupaten Manokwari	2,8540	2	Berkembang	PM/PK dan BA Ekspose Panel Kedeputian	3,1800	3
4	Kabupaten Fakfak	2,8720	2	Berkembang	PM/PK dan BA Ekspose Panel Kedeputian	2,9400	2
5	Kabupaten Raja Ampat	3,0100	3	Terdefinisi	PM/PK dan BA Ekspose Panel Kedeputian	2,6500	2
6	Kota Sorong	2,7930	2	Berkembang	PM/PK dan BA Ekspose Panel Kedeputian	3,0000	3
7	Kabupaten Teluk Bintuni	2,4250	2	Berkembang	Evaluasi PM/PK	1,3900	1
8	Kabupaten Kaimana	2,8720	2	Berkembang	PM/PK dan BA Ekspose Panel Kedeputian	3,0000	3
9	Kabupaten Tambrau	2,6750	2	Berkembang	Evaluasi PM/PK	2,9800	2
10	Kabupaten Manokwari Selatan	2,4710	2	Berkembang	Evaluasi PM/PK	2,2400	2
11	Kabupaten Maybrat	2,2660	2	Berkembang	Evaluasi PM/PK	1,5500	1
12	Kabupaten Pegunungan Arfak	2,4280	2	Berkembang	Evaluasi PM/PK	2,1400	2
13	Kabupaten Teluk Wondama	2,8890	2	Berkembang	Evaluasi PM/PK	2,6100	2
14	Kabupaten Sorong Selatan	2,8370	2	Berkembang	Evaluasi PM/PK	2,9100	2

APIP		MR			IEPK		
Predikat	Skor	Level	Predikat	Metode/Dasar Penetapan/ Penilaian	Skor	Level	Metode/Dasar Penetapan/ Penilaian
Delivered	2,8900	2	Risk Aware	PM/PK dan BA Ekspose Panel Kedeputan	3,000	3	Validasi/penilaian oleh Bidang Investigasi
Delivered	2,5400	2	Risk Aware	Evaluasi PM/PK	1,950	1	Evaluasi PM/PK
Delivered	2,6630	2	Risk Aware	PM/PK dan BA Ekspose Panel Kedeputan	3,330	3	Validasi/penilaian oleh Bidang Investigasi
Structured	2,6880	2	Risk Aware	PM/PK dan BA Ekspose Panel Kedeputan	2,364	2	PM/PK dan BA Ekspose Panel Kedeputan
Structured	2,8750	2	Risk Aware	PM/PK dan BA Ekspose Panel Kedeputan	2,306	2	PM/PK dan BA Ekspose Panel Kedeputan
Delivered	2,4940	2	Risk Aware	PM/PK dan BA Ekspose Panel Kedeputan	2,600	2	PM/PK dan BA Ekspose Panel Kedeputan
Initial	2,0600	2	Risk Aware	Evaluasi PM/PK	1,910	1	Evaluasi PM/PK
Delivered	2,7780	2	Risk Aware	PM/PK dan BA Ekspose Panel Kedeputan	3,124	3	Validasi/penilaian oleh Bidang Investigasi
Structured	2,3500	2	Risk Aware	Evaluasi PM/PK	2,152	2	Evaluasi PM/PK
Structured	1,9880	1	Risk Naive	Evaluasi PM/PK	2,478	2	Evaluasi PM/PK
Initial	1,9300	1	Risk Naive	Evaluasi PM/PK	1,710	1	Evaluasi PM/PK
Structured	2,3150	2	Risk Aware	Evaluasi PM/PK	1,910	1	Evaluasi PM/PK
Structured	2,7000	2	Risk Aware	Evaluasi PM/PK	2,780	2	Evaluasi PM/PK
Structured	2,6500	2	Risk Aware	Evaluasi PM/PK	2,481	2	Evaluasi PM/PK



PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA BARAT

Jalan Angkasa Mulyono, Amban, Manokwari

-  bpkp.go.id/pabar.bpkp
-   @bpkp_pabar
-  @Bpkp Pabar
-  Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat



#HadirBermanfaat

